



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I

JALAN RAYA BANDARA IR.H.JUANDA NOMOR 23 SIDOARJO, 61254 JAWA TIMUR
TELEPON (031) 8688099/8688118 , FAKSIMILE (031) 8678471
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bbppmhkp.sby1@kkp.go.id

Nomor : B.3822/BBPPMHKP.SBY.I/TU.210/VII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengantar Penyampaian Laporan Kinerja

24 Juli 2026

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
Cq. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kinerja, Sekretariat BPPMHKP
di Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN-RB Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor : 62 / KEP-BKIPM / 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar PPMHKP
Surabaya I,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sri Anggoro



KKP
2026
KKP BEYOND

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA MAJU

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II
TAHUN 2026

**BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Surabaya I** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar PPMHKP Surabaya I selama periode April sampai dengan Juni 2026, sekaligus sebagai media evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Laporan ini juga merupakan implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Selama Triwulan II Tahun 2026, Balai Besar PPMHKP Surabaya I terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, optimalisasi pelayanan publik, peningkatan

kompetensi sumber daya manusia, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai capaian yang diperoleh pada periode ini menjadi dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang memerlukan tindak lanjut pada triwulan berikutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja pada periode mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai Balai Besar PPMHKP Surabaya I serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang semakin efektif, profesional, dan akuntabel.

Sidoarjo, 24 Juli 2026
Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

SRI ANGGORO

daftar isi

i	Kata Pengantar
daftar isi	ii
iii	daftar tabel
daftar gambar	iv
v	daftar grafik
Ringkasan Eksekutif	vi
1	Bab I Pendahuluan
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	12
20	Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab IV Penutup	88
90	Lampiran



Daftar Tabel :

Tabel 1. Uraian dan status capaian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2025	ix
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2025	15
Tabel 3. Anggaran Kegiatan Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun Anggaran 2026	16
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Revisi Juni 2026	17
Tabel 5. Anggaran Kegiatan Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun Anggaran 2026 Revisi Juni	18
Tabel 6. Capaian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026	21
Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026	22
Tabel 8. Kriteria dan bobot penilaian	37
Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Program 2 Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026	43
Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Program 3 Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026	47
Tabel 11. Tabel Jenjang Jabatan	48
Tabel 12. Tabel Kompetensi	49
Tabel 13. Pemetaan Komponen Kinerja	49
Tabel 14. Nama dan Nilai Hukuman Disiplin	49
Tabel 15. Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP	59
Tabel 16. Rekapitulasi data hasil perhitungan capaian indikator kinerja untuk persentase rencana umum pengadaan terumumkan triuwulan II tahun 2026	72
Tabel 17. Detail Indeks SKM per Unsur	75
Tabel 18. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM	77
Tabel 19. Data tagihan utilitas kantor, perbandingan pengeluaran antara Tahun 2026 (Triwulan I) dan tahun 2026 (Triwulan II)	80
Tabel 20. Realisasi Pendapatan dan Belanja	81



Daftar Gambar :

Gambar 1. Tim Kerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I	3
Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Tahun 2025	13
Gambar 3. Status indeks capaian IKU	19
Gambar 4 : Dashboard NPSS Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026	20
Gambar 5. Kategori nilai PM SAKIP	52
Gambar 6. Laporan SIDAK Triwulan II Tahun 2026	58
Gambar 7. Capaian (IKPA) lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026	67
Gambar 8. Grafik Indeks SKM Periode Triwulan II - 2026 per Unsur	75
Gambar 9. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	78

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026



Daftar Grafik :

Grafik 1 : Tren Indeks SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I TW. I 2026 – TW. II 2026

78

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Surabaya I disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama periode April sampai dengan Juni 2026. Laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026.

Selama Triwulan II Tahun 2026, Balai Besar PPMHKP Surabaya I terus melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui pengujian laboratorium, inspeksi dan sertifikasi, surveilans, monitoring residu dan cemaran, pembinaan pelaku usaha, penguatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi dengan unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II secara umum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang sesuai dengan target kumulatif Triwulan II, sedangkan indikator yang belum mencapai target terus dipantau melalui langkah-langkah percepatan dan tindak lanjut yang terukur agar target tahunan dapat dicapai secara optimal.

Meskipun demikian, pelaksanaan kinerja masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain dinamika produksi hasil kelautan dan perikanan, perubahan kondisi pasar, keterbatasan sumber daya, serta perlunya peningkatan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Balai Besar PPMHKP Surabaya I akan terus memperkuat manajemen kinerja, meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana, memperkuat kompetensi SDM, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai prinsip profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Balai Besar PPMHKP Surabaya I terdapat efisiensi anggaran yang dimana tidak diiringi dengan penyesuaian target Indikator kinerja. Anggaran Balai Besar PPMHKP Surabaya I mengalami perubahan dari yang semula sebesar Rp. 10.981.000.000,- kemudian mengalami efisiensi sebesar Rp. 117.800.000,- senilai 1,07% dari total pagu semula untuk menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Sehingga total pagu pagu anggaran Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II T.A 2026 yang efektif sebesar Rp. 10.863.200.000,-.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa Balai Besar PPMHKP Surabaya I berada pada jalur yang mendukung pencapaian target kinerja tahunan. Hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran strategis tercapai secara maksimal yaitu sebesar 116,12%. Hasil yang telah dicapai menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan langkah perbaikan pada semester berikutnya guna memastikan terwujudnya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang efektif, berdaya saing, serta mampu mendukung keamanan pangan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BPPMHKP yang menyelenggarakan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya. Dari hasil evaluasi capaian kinerja 12 IKU, seluruh capaiannya telah memenuhi atau melebihi target. Uraian dan status capaian dari 12 IKU tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:



Kode	No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target		Capaian	%	Target	Capaian	%
			2026	JUNI	JUNI		s/d JUNI	s/d JUNI	
SK.01		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan							
	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72,00	72,00	83,64	116,17	72,00	83,64	116,17
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72,00	72,00	87,21	120,00	72,00	87,21	120,00
	3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	71,00	71,00	85,43	120,00	71,00	85,43	120,00
SK.02		Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar							
	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I(%)	72,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target		Capaian	%	Target	Capaian	%
			2026	JUNI	JUNI		s/d JUNI	s/d JUNI	
SK.03		Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I							
	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	82,50	75,00	82,34	109,79	75,00	82,34	109,79
	6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	77,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	86,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	86,00	86,00	100,00	116,28	172,00	200,00	116,28
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	92,10	83,00	98,32	118,46	83,00	98,32	118,46
	10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	71,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	77,00	77,00	100,00	120,00	77,00	100,00	120,00
	12	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	89,00	89,00	91,71	103,04	89,00	91,71	103,04

Tabel 1. Uraian dan status capaian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2025



Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026

Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2026, Balai Besar PPMHKP Surabaya I mengelola anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 10.863.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.150.673.002,- atau 56,62%.

Persentase Realisasi anggaran Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026 mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,62% apabila dibandingkan dengan target penyerapan anggaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu sebesar 50% untuk Triwulan II.

Pertumbuhan persentase realisasi anggaran yang positif ini dipengaruhi rendahnya pagu anggaran Tahun 2026 bila dibandingkan pagu anggaran Tahun 2025. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 117.800.000,- senilai 1,07% dan blokir anggaran Sumber Dana PNPB sebesar Rp. 305.740.000,- dari total pagu semula sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam 2 program pembangunan kelautan dan perikanan, serta program Dukungan Manajemen. Namun dengan pemotongan tersebut, diharapkan tidak mengurangi kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam pencapaian target kinerja.

Capaian sasaran strategis BBPPMHKP Surabaya I sebesar 109,46% menunjukkan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah tercapai, bahkan melampaui target. Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan secara efektif dalam mendukung terwujudnya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui penyesuaian belanja perjalanan dinas dan belanja operasional perkantoran tidak memengaruhi pencapaian indikator kinerja, sehingga target kinerja organisasi tetap dapat direalisasikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan



Bab I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2026, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 54/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Balai Besar PPMHKP Surabaya I. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP selama tahun 2026. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, serta berpedoman pada **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014



tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan proses pemantauan pelaksanaan kinerja dilingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I pada setiap triwulan yang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi Balai Besar PPMHKP Surabaya I yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai capaian kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I selama satu tahun anggaran, meliputi realisasi terhadap sasaran strategis, program, serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, laporan ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, guna menjadi dasar dalam peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Melalui laporan kinerja ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang jelas, transparan, dan akuntabel mengenai kontribusi Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam mendukung terwujudnya sistem karantina ikan yang andal, serta mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia.

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Sesuai Kepmen KP No. 43 Tahun 2023 tentang Susunan organisasi Balai Besar PPMHKP Surabaya I, terdiri atas:

1. Tim Kerja Sektor Produksi Primer;
2. Tim Kerja Sektor Pasca Panen;
3. Tim Kerja Manajemen Mutu; dan
4. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Cakupan wilayah kerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Kabupaten Sidoarjo 2. Kota Batu 3. Kabupaten Kediri 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Lumajang 6. Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Trenggalek 8. Kota Probolinggo 9. Kota Pasuruan 10. Kota Kediri 11. Kabupaten Nganjuk 12. Kabupaten Ngawi 13. Kabupaten Pacitan 14. Kota Madiun 15. Kota Malang 16. Kabupaten Magetan 17. Kabupaten Ponorogo 18. Kabupaten Bondowoso 19. Kabupaten Madiun 20. Kabupaten Malang 21. Kabupaten Tulungagung 22. Kota Blitar 23. Kabupaten Blitar 24. Kabupaten Banyuwangi 25. Kabupaten Situbondo 26. Kabupaten Jember.



Gambar 1. Tim Kerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I

1.4. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai Besar PPMHKP Surabaya I dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai Besar PPMHKP Surabaya I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor kenegara tujuan. Penjaminan ketertelusuran (traceability)

produk, sehingga apabila terjadi masalah / penolakan mudah untuk menelusuri dan mengambil tindakan perbaikan.

Upaya menjamin keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi Cara penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Suplier, melakukan Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI), melakukan inspeksi pada UPI yang menerapkan sistem traceability, dan melakukan surveilen pada UPI terhadap konsistensi penerapakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 :

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, menindaklanjuti setiap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, melakukan verifikasi pengendalian sistem jaminan mutu di bidang budidaya dan penangkapan.

Sasaran Kegiatan 3 :

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

1.5. SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:



- a) **Bab I – Pendahuluan,**
menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b) **Bab II – Perencanaan Kinerja,**
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c) **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**
menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d) **Bab IV – Penutup,**
menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e) **Lampiran-lampiran,**
memuat Penetapan Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2021 dan hal-hal lainnya.

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “**Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan**”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 5;

2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Surabaya I menetapkan indikator dan target kinerja tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang diturunkan dari **Renstra Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan** dan **Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan**. BPPMHKP telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan revisi ke-5 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 29/KEP-BPPMHKP/2026 pada tanggal 25 Januari 2026. Rencana strategis BPPMHKP

tersebut merupakan penjabaran dari turunan dari Peta Strategi KKP. Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar PPMHKP Surabaya I, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I. Pada Triwulan II terdapat revisi Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tanggal 17 Juni 2026.



Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Tahun 2025

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/KEP-BPPMHKP/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BPPMHKP.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026 sebelum revisi diuraikan seperti pada Tabel 3 berikut ini :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
SK.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72
		3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	71
SK.02	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	71
SK.03	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	82,5



lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I	6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	77
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	86,2
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	86
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	92,1
	10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	71,75
	11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	77
	12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	3,5

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2025

Jumlah Anggaran Tahun 2026 sebelum revisi adalah sebesar Rp 11.599.678.000, -

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.193.220.000
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	68.000.000

3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	10.338.458.000
Total Anggaran Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026		11.599.678.000

Tabel 3. Anggaran Kegiatan Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun Anggaran 2026

Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026 revisi tanggal 17 Juni 2026 diuraikan seperti pada Tabel 5 berikut ini :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
SK.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72
		2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72
		3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	71
SK.02	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72
SK.03	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di	5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	82,5

lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I	6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	77
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	86,2
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	86
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	92,1
	10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	71,75
	11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	77
	12	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	89

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Revisi Juni 2026

Jumlah Anggaran Tahun 2026 setelah revisi tanggal 17 Juni 2026 adalah sebesar Rp 24.096.271.000, -

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	9.944.581.000
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	850.619.000
3.	Manajemen Mutu	68.000.000

Total Anggaran Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I Tahun 2026	10.863.200.000
---	-----------------------

Tabel 5. Anggaran Kegiatan Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun Anggaran 2026 Revisi Juni

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah <50;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

- b. Polarisasi *Minimize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target})\} \times 100\%$$

- c. Polarisasi *Stabilize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.



4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Status indeks capaian IKU

TRIWULAN II
TAHUN 2026

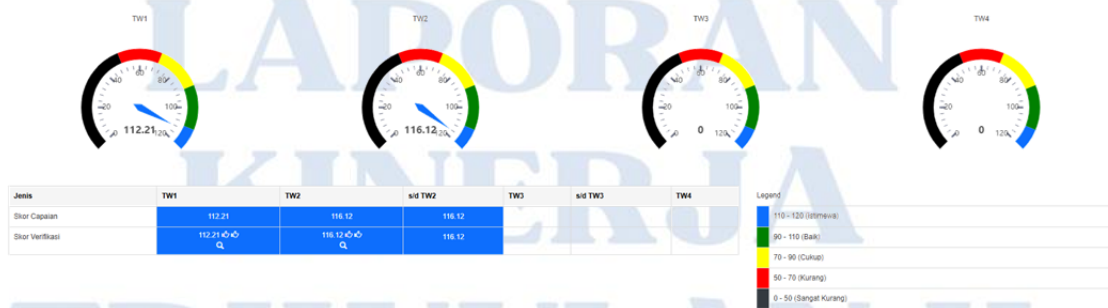
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I pada Triwulan II Tahun 2026 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 116,12% (Istimewa). NPSS merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I tiap triwulan di Tahun 2026 seperti pada Gambar berikut ini :



Gambar 4 : Dashboard NPSS Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis mendalam (Elaborasi) capaian kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target triwulan dan tahunan dijelaskan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TW I		TW II		SMT I		TARGET 2026
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72,00	83,64	72,00	83,64	72,00		72,00
2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72,00	87,21	72,00	87,21	72,00		72,00
3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	0,00	85,43	71,00	85,43	71,00		71,00

4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	0,00	82,34	75,00	82,34	75,00	82,50
6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	86,00	100,00	86,00	100,00	86,00	86,00
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	0,00	98,32	83,00	98,32	83,00	92,10
10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	77,00	100,00	77,00	100,00	77,00	77,00
12	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	89,00	91,71	89,00	91,71	89,00	89,00

Tabel 6. Capaian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa seluruh target IKK maupun IKU di Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026 telah berhasil dicapai. Dari 12 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK, secara keseluruhan pencapaiannya memenuhi target. Keberhasilan pencapaian tersebut akan diupayakan untuk dipertahankan serta terus ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan adalah (1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I; (2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I; (3). Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I; (4). Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

SASARAN KEGIATAN 01 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran program Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing diperoleh dari pencapaian indikator Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor, Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI dan Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan. Capaian nilai sasaran strategis ini pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 116,12%. Berikut tabel capaian Sasaran Program 1 berdasarkan Indikator Kinerjanya :

Kode	No	Sasaran/Indikator Kinerja	REALISASI TW II					2026				RENSTRA 2025 - 2029	
			2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW II	Realisasi TW II	%	Target	%
SK.01		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan											
	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)					100,00	72,00	72,00	83,64	116,17	72	116,17
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)					117,83	72,00	72,00	87,21	120,00	72	120,00
	3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)						71,00	71,00	85,43	120,00	71	120,00

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026

IKK 01. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
- Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

CARA PENGUKURAN

$$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Realisasi IKU UPT Tw.I

B = Realisasi IKU UPT Tw.II

Capaian IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II 2026 dan atau s/d Juni sebesar $(Tw.1+Tw.2)/2 = (81.95 + 85.33)/2 = 83.64$

Beberapa Tindakan yang telah dilakukan sebagai hasil tindak lanjut serta pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini antara lain :

1. CBIB

Merupakan suatu sistem pembudidayaan ikan yang menerapkan prinsip-prinsip teknis, manajerial, dan biosekuriti secara terpadu untuk menghasilkan produk perikanan yang aman dikonsumsi, bermutu, berdaya saing, serta ramah terhadap lingkungan. Penerapan CBIB bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses budidaya, mulai dari pemilihan lokasi, penggunaan benih, pengelolaan kualitas air, pemberian pakan, pengendalian penyakit, penggunaan obat ikan, hingga kegiatan panen dan penanganan pascapanen dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, CBIB menekankan pentingnya penggunaan benih yang sehat dan berkualitas, pakan yang memenuhi standar, pengelolaan lingkungan budidaya yang baik, serta penerapan biosekuriti untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit ikan. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan melakukan pencatatan terhadap seluruh kegiatan budidaya sebagai bagian dari sistem ketertelusuran (traceability), sehingga setiap tahapan produksi dapat dipantau dan dievaluasi secara berkesinambungan.



2. CPIB

Merupakan instrumen utama dalam sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya pada tahap hulu, khususnya dalam menghasilkan benih ikan yang bermutu, sehat, dan bebas dari kontaminan. Implementasi CPIB memastikan bahwa seluruh proses pembenihan—mulai dari pengelolaan induk, pemijahan, pemeliharaan larva, pemberian pakan, hingga distribusi benih—telah memenuhi prinsip food safety, biosecurity, traceability, serta kesehatan ikan (fish health management). Penerapan CPIB yang konsisten menjadi fondasi penting dalam menjamin keberhasilan produksi budidaya secara keseluruhan. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, penerapan CPIB berkontribusi langsung terhadap program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas unggulan, penguatan sistem jaminan mutu hasil perikanan dari hulu ke hilir, serta implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Selain itu, ketersediaan benih bermutu melalui penerapan CPIB juga mendukung pengembangan kawasan budidaya dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya.



3. CPIB Kapal

Merupakan standar penerapan sistem penanganan hasil perikanan di atas kapal yang bertujuan untuk menjaga mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil tangkapan sejak ikan dinaikkan ke atas kapal hingga didaratkan. Penerapan CPIB Kapal memastikan bahwa setiap tahapan penanganan dilakukan secara higienis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mutu ikan tetap terjaga serta memenuhi persyaratan pasar domestik maupun ekspor. Penerapan CPIB Kapal mencakup berbagai aspek penting, antara lain desain dan konstruksi kapal yang mendukung sanitasi, kebersihan ruang penyimpanan dan peralatan, ketersediaan air bersih dan es yang

memenuhi persyaratan, penanganan ikan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan fisik, pengendalian suhu selama penyimpanan, serta penerapan higiene dan sanitasi oleh seluruh awak kapal. Selain itu, dilakukan pengendalian terhadap potensi kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik yang dapat memengaruhi keamanan dan mutu hasil perikanan. Penerapan CPIB Kapal memberikan berbagai manfaat, di antaranya mempertahankan kesegaran dan mutu ikan, mengurangi kehilangan hasil (post-harvest losses), meningkatkan keamanan pangan, memperpanjang umur simpan produk, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Di samping itu, sertifikasi CPIB Kapal menjadi salah satu bentuk pengakuan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan penanganan hasil perikanan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, khususnya untuk memenuhi persyaratan perdagangan internasional.





4.CPOIB - CDOIB

Merupakan pedoman yang mengatur tata cara produksi obat ikan agar dihasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penerapan CPOIB bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tahapan proses produksi obat ikan dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi, dan terkendali, sehingga obat ikan yang dihasilkan aman digunakan, efektif dalam mendukung kesehatan ikan, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun keamanan pangan hasil perikanan. Penerapan CPOIB mencakup seluruh aspek proses produksi, mulai dari pengadaan dan pengendalian bahan baku, kelayakan bangunan dan fasilitas produksi, pemeliharaan peralatan, higiene dan sanitasi, kompetensi personel, pengendalian proses produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga penanganan produk yang tidak memenuhi persyaratan. Seluruh kegiatan tersebut didukung oleh sistem dokumentasi yang baik untuk menjamin konsistensi mutu serta memudahkan proses penelusuran (traceability) apabila diperlukan. Dalam pelaksanaannya, setiap produsen obat ikan diwajibkan menerapkan sistem pengendalian mutu yang mencakup pemeriksaan bahan baku, pengawasan selama proses produksi, serta pengujian produk jadi sebelum dipasarkan. Selain itu, perusahaan harus memiliki prosedur penanganan keluhan pelanggan, penarikan kembali (recall) produk apabila ditemukan ketidaksesuaian, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem manajemen mutu yang diterapkan.

Pada tanggal **28 April 2026**, Balai Besar PPMHKP Surabaya I melaksanakan **inspeksi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) di PT Hailiank Technology Indonesia** sebagai bagian dari upaya pengendalian mutu dan keamanan produk obat ikan yang diproduksi dan diedarkan. Kegiatan inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi telah memenuhi persyaratan teknis dan standar CPOIB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan inspeksi meliputi pemeriksaan terhadap aspek **sistem manajemen mutu, kondisi bangunan dan fasilitas produksi, peralatan, pengendalian bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, pelabelan, dokumentasi, sanitasi dan higiene, serta penerapan ketertelusuran (traceability)**. Selain itu, tim inspeksi juga melakukan verifikasi terhadap implementasi prosedur operasional standar (SOP) dan efektivitas pengendalian mutu pada setiap tahapan proses produksi. Selama kegiatan berlangsung, pihak **PT Hailiank Technology Indonesia** menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung pelaksanaan inspeksi dengan memberikan akses terhadap seluruh fasilitas dan dokumen yang diperlukan. Tim inspeksi turut memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan terhadap beberapa aspek yang

masih dapat ditingkatkan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penerapan CPOIB. Melalui kegiatan inspeksi ini diharapkan perusahaan dapat terus meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan CPOIB sehingga mampu menghasilkan obat ikan yang **bermutu, aman, berkhasiat, dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan**, sekaligus mendukung peningkatan daya saing sektor perikanan budidaya Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Berikut dokumentasi kegiatan :



Surat Capaian Indikator Kinerja “Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan” Triwulan II Tahun 2026 terlampir.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya yaitu dengan melakukan inspeksi kegiatan produksi primer sesuai dengan regulasi dan Prosedur dan selanjutnya selalu memantau antara target dan realisasi agar tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan oleh Kepala BBPPMHKP.

Tindakan perbaikan yang ditindaklanjuti :

1. Verifikasi dan Pendampingan Teknis penerbitan Sertifikat CBIB unit usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

a. Berikut dokumentasi pendampingan prasertifikasi di KDMP Luworo Madiun :



b. Berikut dokumentasi pendampingan prasertifikasi di KDMP Buduran Madiun :



2. Pendampingan Teknis unit usaha Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Berikut dokumentasi pendamping prasertifikasi di KNMP Lateng Banyuwangi :



3. Inspeksi Penerapan sertifikasi produksi primer (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan CPIB Kapal).

a. Berikut dokumentasi Inspeksi CBIB di KDMP Ngale dan Luworo Madiun :



b. Berikut dokumentasi Inspeksi CPIB Kapal :





c. Inpeksi CPIB di IBAT Kab. Ponorogo :



4. Surveilans kegiatan produksi primer dalam rangka Penerbitan SMKHP/HC

Pelaksanaan remote inspection dalam rangka inspeksi penerapan **Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)** telah dilakukan sebagai bagian dari proses sertifikasi untuk permohonan **PB UMKU** pada kegiatan budidaya. Selama periode **April hingga Juni**, telah dilaksanakan **2 (dua) kegiatan remote inspection**. Penerapan metode inspeksi secara daring tersebut memberikan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan **penghematan anggaran sebesar Rp3.200.000** dibandingkan pelaksanaan inspeksi secara tatap muka.

IKK 02. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

- Sektor produksi Pasca Panen adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap atau dipanen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga Pemasaran produk perikanan. Sebagai bentuk pengendalian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan pascapanen maka BPPMHKP selaku Otoritas Kompeten menerbitkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP) dan Surat Pengelolaan Distribusi Ikan (SPDI). Sertifikasi produksi pasca panen ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
- Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dijelaskan bahwa Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sedangkan Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.
- Capaian indikator diperoleh dengan menghitung rata-rata persentase efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari seluruh UPT Per Triwulan.
- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya

pengecekan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Cara Pengukuran:

Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah indikator yang mengukur pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha yang sudah menerapkan pengendalian mutu dan memperoleh sertifikat SKP, HACCP dan SPDI untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap:

Pengendalian Mutu:

- a) Verifikasi permohonan
- b) Inspeksi
- c) Evaluasi tim Teknis
- d) Penerbitan sertifikat

Pengawasan Mutu:

- a) Penyusunan program surveilans
- b) Pelaksanaan surveilans
- c) Penerbitan SKHS

Formulasi Penghitungan :

$$TE = \frac{\sum(50\% \times A) + \sum(50\% \times B)}{2}$$

TE = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu

A = Skor pengendalian

B = Skor pengawasan

Skor efektivitas permohonan unit pengolahan ikan yang dievaluasi dihitung dengan komponen penghitungan menggunakan formulir penilaian kinerja yang terdiri dari komponen penghitungan antara lain:

a. Pengendalian Mutu (bobot 50 %) (A):

- Verifikasi permohonan (Av)
- Inspeksi (Ai)
- Evaluasi tim Teknis (Ae)
- Penerbitan sertifikat (As)

$$A = A_v + A_i + A_e + A_s$$

b. Pengawasan Mutu (bobot 50 %) (B):

- Penyusunan program surveilans (Bp)
- Pelaksanaan surveilans (Bs)
- Penerbitan SKHS (Bh)

$$B = B_p + B_s + B_h$$

Kriteria dan Bobot Penilaian:

Komponen	Indikator	Kriteria	Bobot
Pengendalian			
Verifikasi permohonan	Verifikasi permohonan	1. Tidak ada permohonan 2. Permohonan tidak lengkap atau tidak sesuai 3. Permohonan lengkap dan sesuai	1-3
	Tersedianya verifikator yang kompeten	1. Personil belum tercantum pada SK 2. Personil sudah tercantum pada SK 3. Personil sudah tercantum pada SK dan mempunyai sertifikat pelatihan terkait keamanan pangan	1-3
	Evaluasi pemenuhan persyaratan permohonan	1. Tidak dilakukan evaluasi pemenuhan persyaratan sesuai dengan norma waktu layanan 2. Evaluasi dilakukan tetapi tidak sesuai 3. Evaluasi dilakukan dan sesuai	1-3
Inspeksi	Tingkat kualitas metode inspeksi	1. Inspeksi dokumen 2. Inspeksi dengan cara online 3. Inspeksi dengan cara onsite	1-3

	Tingkat kesesuaian waktu pelaporan hasil inspeksi	1. Pelaporan dokumen hasil inspeksi tidak dilakukan dalam norma waktu layanan 2. Pelaporan dokumen hasil inspeksi dilakukan namun tidak lengkap dan/atau tidak sesuai 3. Pelaporan dokumen hasil inspeksi dilakukan sesuai dengan norma waktu layanan, lengkap dan sesuai.	1-3
	Tindakan perbaikan yang ditindaklanjuti	1. Tindakan perbaikan tidak ditindaklanjuti dalam norma waktu layanan yang ditetapkan 2. Tindakan perbaikan ditindaklanjuti namun tidak sesuai dengan ketentuan 3. Tindakan perbaikan ditindaklanjuti dan sesuai dengan ketentuan	1-3
Evaluasi tim teknis	Tersedianya evaluator yang kompeten	1. Evaluator tidak tercantum pada SK Tim 2. Evaluator tercantum pada SK Tim, namun belum mempunyai sertifikat pelatihan terkait keamanan pangan 3. Evaluator tercantum pada SK Tim dan mempunyai sertifikat pelatihan	1-3
	Tersedia SOP pelaksanaan evaluasi	1. Tidak tersedia SOP pelaksanaan evaluasi 2. Tersedia SOP pelaksanaan evaluasi, namun tidak diterapkan 3. Tersedia SOP pelaksanaan evaluasi dan diterapkan sesuai ketentuan	1-3
	Tingkat kesesuaian hasil pelaksanaan evaluasi	1. Terdapat catatan hasil evaluasi dan perubahan grade 2. Terdapat catatan namun grade tidak berubah 3. Tidak ada catatan dan grade tidak berubah	1-3
Penerbitan sertifikat	Tersedia SOP penerbitan sertifikat	1. Tidak tersedia SOP penerbitan sertifikat 2. Tersedia SOP penerbitan sertifikat, namun tidak diterapkan 3. Tersedia SOP penerbitan sertifikat dan diterapkan sesuai ketentuan	1-3
	Pemenuhan SLA	1. Penerbitan sertifikat terbit lebih dari 20 hari 2. Penerbitan sertifikat dalam kurun waktu 11 - 20 hari 3. Penerbitan sertifikat sesuai dengan ketentuan (maksimal 10 hari)	1-3

	Tingkat kesesuaian sertifikat yang diterbitkan	1. Sertifikat terbit namun terdapat kesalahan mayor (kesalahan grade, tanggal terbit) 2. Sertifikat terbit namun terdapat kesalahan minor seperti kesalahan penulisan. 3. Sertifikat terbit namun tidak terdapat kesalahan	1-3
Pengawasan			
Penyusunan program	Tersedia SOP penyusunan program surveilans; Tersedianya inspektur mutu yang kompeten; Evaluasi program surveilans	1. Program surveilans tidak tersedia 2. Program surveilans tersedia namun belum sepenuhnya sesuai ketentuan 3. Program surveilans tersedia, terdokumentasi, dan disusun sesuai ketentuan	1-3
Pelaksanaan surveilans	Tingkat kualitas metode surveilans; Tingkat kesesuaian / kualitas hasil surveilans; Tindakan perbaikan yang ditindaklanjuti	1. Surveilans tidak dilaksanakan sesuai program atau tidak dilaksanakan 2. Surveilans dilaksanakan namun tidak sepenuhnya sesuai program 3. Surveilans dilaksanakan sesuai program dan seluruh hasil terdokumentasi	1-3
Penerbitan SKHS	Tersedia SOP penerbitan SKHS; Pemenuhan SLA; Tersedianya SDM yang kompeten (penandatanganan)	1. SKHS diterbitkan tidak berdasarkan hasil inspeksi atau tanpa tindakan perbaikan 2. SKHS diterbitkan berdasarkan sebagian hasil inspeksi atau tindakan perbaikan 3. SKHS diterbitkan sesuai hasil inspeksi dan tindakan perbaikan telah dipenuhi	1-3

Tabel 8. Kriteria dan bobot penilaian

Mengacu Surat Kepala Pusat Pascapanen Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ke UPT BPPMHKP No. **B.2537/BPPMHK.4/RC.610/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026** bahwa pada Pada periode **Triwulan II Tahun 2026** nilai pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan pangan sektor produksi pascapanen Balai Besar PPMHKP Surabaya I sebagai berikut:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen melalui Sertifikasi SKP sebesar **86,95%**
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen melalui Sertifikasi PMMT/HACCP sebesar **93,62%**
3. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen melalui Sertifikasi SPDI sebesar **87,50%**

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Capaian IKU UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I yang berasal dari rata-rata perhitungan persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen dari sertifikasi SKP, PMMT/HACCP dan SPDI adalah **90,56%**. Nilai IKU UPT tersebut sudah melebihi target nilai IKU UPT yang ditetapkan yaitu 72%.

Kegiatan sertifikasi sektor Pasca Panen dilaksanakan sesuai prosedur dan selalu memantau antara target dan realisasi keluaran (output) secara berkala agar tercapai sesuai Perjanjian Kinerja (PK) yang diperintahkan kepada Balai Besar PPMHKP Surabaya I. Yang menjadi akar masalah pada IKK ini adalah Ada kekuatiran sertifikasi sektor produksi pasca panen yang tidak sesuai dengan target yang diperintahkan kepada Balai Besar PPMHKP Surabaya I karena permohonan sertifikasi berasal dari pengajuan Pelaku Usaha Perikanan baik Unit Pengolahan Ikan atau Unit Supplier.

Sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan(SKP); Sertifikat HACCP dan Surat Keterangan HACCP di Supplier pada ruang lingkup produk pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Unit Supplier disesuaikan dengan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP. Pelaksanaan sertifikasi melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Inspeksi dan atau Verifikasi Permohonan Sertifikasi SKP yang diajukan oleh Unit Pengolahan Ikan setelah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Dinas Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di UPI. Kegiatan ini ditujukan untuk UPI baru yang belum memiliki Sertifikat penerapan HACCP, UPI yang sudah mempunyai HACCP tetapi akan menambah Ruang Lingkup produk, dan UPI yang ingin melakukan perpanjangan Sertifikat Penerapan HACCP.
3. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Supplier. Kegiatan ini ditujukan untuk Unit Supplier baru yang belum memiliki Surat Keterangan penerapan HACCP, Supplier yang sudah mempunyai Sertifikat Cara Penangan Ikan yang Baik (CPIB) tetapi akan menambah Ruang Lingkup produk, dan Suplier yang ingin melakukan perpanjangan Sertifikat Cara Penangan Ikan yang Baik (CPIB) di tingkat Supplier.

Keberhasilan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tidak lepas dari peran serta BPPMHKP Surabaya I dalam melakukan pengendalian dan pengawasan mutu yang ada di unit pengolahan ikan, unit pemasok atau supplier, sentra pangan sehat serta dalam penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan (SMKHP).

Terdapat kekhawatiran sertifikasi sektor produksi pasca panen yang tidak sesuai dengan target yang diperintahkan kepada Balai Besar PPMHKP Surabaya I karena permohonan sertifikasi berasal dari pengajuan Pelaku Usaha Perikanan baik Unit Pengolahan Ikan atau Unit Supplier.

Rekomendasi rencana aksi yaitu melaksanakan kegiatan sertifikasi sektor Pascapanen sesuai prosedur dan memenuhi Perjanjian Tingkat Layanan atau **Service Level Agreement** (SLA) dan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam pemenuhan target dan realisasi agar tercapai IKU UPT yang sudah ditetapkan kepada UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini yaitu :

1. Verifikasi dan Pendampingan Teknis penerbitan Sertifikat SKP unit usaha Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP)
2. Verifikasi permohonan Sertifikat SKP
3. Verifikasi Permohonan Penerbitan Sertifikat SPDI
4. Inspeksi Penerapan HACCP Unit Pengolahan Ikan
5. Surveilans dan Pengambilan Contoh dalam rangka Penerbitan SMKHP/HC
6. Pelaksanaan Scanning dan Pengambilan Sampel Dalam rangka pengendalian Cesium 137 dan penerbitan HC/SMKHP tujuan Amerika Serikat
7. Sosialisasi Penerbitan SMKHP Tujuan USA dan Persiapan Audit USFDA
8. Pendampingan Inspeksi Negara Mitra Amerika Serikat (USFDA)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan inspeksi penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Balai Besar PPMHKP Surabaya I melaksanakan **pemeriksaan jarak jauh** (*Remote inspection*) meliputi kegiatan verifikasi tindakan perbaikan (follow up audit). Selama periode **April hingga Juni** , telah dilaksanakan **12 kegiatan** terhadap usaha pelaku untuk memastikan seluruh ketidaksesuaian hasil inspeksi sebelumnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan persyaratan HACCP. Penerapan *Remote inspection* memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya dari sisi efektivitas waktu dan kemudahan koordinasi, tetapi juga dalam mendukung efisiensi penggunaan anggaran. Melalui metode ini, Balai Besar PPMHKP Surabaya I berhasil melakukan **penghematan anggaran sebesar Rp. 9.600.000,-** , tanpa mengurangi kualitas maupun proses verifikasi objektivitas. Penerapan pengawasan jarak jauh ini menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

IKK 03. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

- Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.
- Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di kab/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Cara pengukuran :

$$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I

A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI

B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI

Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI :

A.1 Monitoring Perairan Laut

Kegiatan yang telah dilakukan adalah :

- a. Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran marine biotoksin dan/atau bahan kimia berbahaya di perairan.
- b. Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran marine biotoksin dan/atau bahan kimia berbahaya lokasi perairan. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 83,33%.
- c. Nilai pengawasan mutu perairan secara keseluruhan

A.2 Monitoring Perairan Darat

Isu utama yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan ini adalah belum adanya pengawasan mutu wilayah perairan darat sebagai sumber produksi perikanan di Indonesia khususnya sektor budidaya, tekanan lingkungan akibat aktivitas manusia seperti pencemaran limbah, penggunaan bahan kimia yang tidak bijak di sekitar lokasi yang berpotensi menjadi residu, serta perubahan ekosistem perairan semakin meningkatkan potensi cemaran di perairan darat, sehingga menuntut pengawasan yang lebih komprehensif dan adaptif. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh skor jumlah pengujian (B1) = 3 dari skor maksimal (B2) = 3, sehingga diperoleh Nilai A = 100 dan Nilai B = 100. Dengan demikian, diperoleh nilai pengawasan (X) = 100%, yang menunjukkan bahwa mutu dan keamanan hasil perikanan serta kualitas lingkungan perairan di lokasi monitoring memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dapat Disimpulkan Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI sebesar $(83.3+100)/2 = 91.56\%$

B. Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI diperoleh dengan menghitung angka nilai jaminan mutu dengan di kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan dengan nilai baik sesuai juknis KEPBPPMHKP No. 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat bahwa Bobot Penilaian Jaminan Mutu Sarana prasarana 60%, pengujian produk 40%. Dengan klasifikasi: Sangat Baik ($\geq 85\%$), Baik ($>70-85\%$), Cukup ($>50-70\%$), Kurang ($\leq 50\%$).

Adapun selama Tri Wulan II Angka Nilai Jaminan Mutu di Kabupaten Sidoarjo didapatkan nilai sebesar 79.30%.



A. Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI : 91.56%

B. Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI : 79.30%

Cara Pengukuran :

$$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I
A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI
B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI

Nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya pada Tri Wulan II Tahun 2026 sebesar : **85.43%**

$$x = \frac{A+B}{2} \rightarrow x = \frac{91.56+79.30}{2} \times 100\% \\ = \frac{170.86}{2} = 85.43 \%$$

SASARAN KEGIATAN 02 :

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan bagian penting dalam mewujudkan produk perikanan yang aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan nasional maupun internasional. Pelaksanaan pengendalian dilakukan secara konsisten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Nasional Indonesia (SNI), standar internasional, serta persyaratan negara tujuan ekspor, sehingga mampu menjamin keandalan sistem penjaminan mutu pada setiap tahapan rantai produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.

Penyelenggaraan pengendalian dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi inspeksi, audit, verifikasi, surveilans, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, sertifikasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis risiko dengan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Konsistensi pelaksanaan pengendalian didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, laboratorium yang terakreditasi, metode pengujian yang tervalidasi, serta

penerapan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan. Selain itu, dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar mampu menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu dan keamanan pangan secara efektif, sehingga tercipta budaya mutu yang berkesinambungan di seluruh rantai usaha perikanan.

Melalui pengendalian yang dilaksanakan secara konsisten sesuai standar, diharapkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan terus meningkat, risiko penolakan produk di pasar domestik maupun internasional dapat diminimalkan, serta daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia semakin kuat. Dengan demikian, penyelenggaraan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga mendukung peningkatan kepercayaan pasar, keberlanjutan usaha, serta pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Berikut tabel capaian Sasaran Program 2 berdasarkan Indikator Kinerjanya :

Kode	No	Sasaran/Indikator Kinerja	REALISASI TW II					2026				RENSTRA 2025 - 2029	
			2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW II	Realisasi TW II	%	Target	%
SK.02		Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar											
	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I(%)						72,00	0,00	0,00	0,00	72	0,00

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Program 2 Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026

IKK 04. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

- Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional

- Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi
 - ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri
 - Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:
 1. Ruang Lingkup; 3. Persyaratan Umum; 5. Persyaratan Sumber Daya; 7. Persyaratan Sistem Manajemen
 2. Acuan Normatif; 4. Persyaratan Struktural; 6. Persyaratan Proses;
 - ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:
 1. Persyaratan Umum
 2. Persyaratan Struktural
 3. Persyaratan Sumberdaya
 4. Persyaratan Proses
 5. Persyaratan Sistem Manajemen
- Cara Pengukuran :

$$X = \frac{A+B+C}{3} \times 100\%$$

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan

lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Presentase Penerapan ISO 17025

C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS)



SASARAN KEGIATAN 03 :

Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu sasaran strategis Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih, melayani, serta berorientasi pada hasil. Sasaran ini diwujudkan melalui penyelenggaraan tata kelola organisasi yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan-undangan. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sasaran strategi ini diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain Indeks Profesionalitas ASN, Nilai Pembangunan Integritas, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, Indikator Kinerja Implementasi Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui SIRUP, serta Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam implementasinya, Balai Besar PPMHKP Surabaya I terus memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Seluruh program dan kegiatan disusun berdasarkan sasaran strategis organisasi, dilengkapi indikator kinerja yang diukur, serta dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian target dan efektivitas penggunaan sumber daya. Selain itu, penguatan pengendalian internal melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tindak lanjut hasil pengawasan, serta manajemen risiko dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Pada aspek pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa, Balai Besar PPMHKP Surabaya I senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi melalui optimalisasi pelaksanaan anggaran, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, serta pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Langkah tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi pencapaian kinerja organisasi.

Penguatan integritas aparatur juga menjadi fokus utama melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), penerapan budaya kerja BerAKHLAK, pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan profesionalitas ASN melalui pengembangan

kompetensi yang berkesinambungan. Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan aparatur yang berintegritas tinggi, kompeten, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di sisi pelayanan publik, Balai Besar PPMHKP Surabaya terus melakukan penyempurnaan standar pelayanan, digitalisasi layanan sertifikasi, optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen evaluasi kualitas layanan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan berkelanjutan (perbaikan berkelanjutan) sehingga pelayanan yang diberikan semakin cepat, mudah, transparan, dan memenuhi kebutuhan para pengguna jasa.

Melalui berbagai upaya tersebut, Balai Besar PPMHKP Surabaya saya berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang profesional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Berikut tabel capaian Sasaran Program 3 berdasarkan Indikator Kinerjanya :

Kode	No	Sasaran/Indikator Kinerja	REALISASI TW II					2026				RENSTRA 2025 - 2029	
			2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW II	Realisasi TW II	%	Target	%
SK.03		Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I											
	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)			77,34	86,83	84,46	82,50	75,00	82,34	109,79	82,5	109,79
	6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)						77,00	0,00	0,00	0,00	77	0,00
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)						86,20	0,00	0,00	0,00	86,2	0,00
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)			100,00	100,00	100,00	86,00	86,00	100,00	116,28	86	116,28
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)			87,93	97,35	99,85	92,10	83,00	98,32	118,46	92,1	118,46
	10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)						71,75	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00
	11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar					100,00	77,00	77,00	100,00	120,00	77	120,00

		PPMHKP Surabaya I (%)											
	12	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)			87,56	89,72	89,67	89,00	89,00	91,71	103,04	89	103,04

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Program 3 Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026

IKK 05. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN BKIPM merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN BKIPM yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan IP ASN.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN, IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IKU ini merupakan indikator baru di tahun 2019 penyempurnaan dari Indeks kompetensi dan integritas sehingga nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keahlian)	25	23	20	15	10	5

Tabel 11. Tabel Jenjang Jabatan

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/ Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi (**)	Nilai Kompetensi sesuai jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5

0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Tabel 12. Tabel Kompetensi

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja
1	Sangat Baik	30
2	Baik	25
3	Butuh Perbaikan	20
4	Kurang	15
5	Sangat Kurang	10

Tabel 13. Pemetaan Komponen Kinerja

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Tabel 14. Nama dan Nilai Hukuman Disiplin

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total

bobot yaitu 40.

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan IP ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Sekretariat BKIPM dalam rangka penyelenggaraan pendidikan/pelatihan (Bimtek) 20 JP dan/atau Webinar bagi ASN di Tahun 2025 serta menghimbau kepada seluruh ASN lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I untuk secara rutin mengupload data sertifikat Pelatihan/Bimtek yang telah diperoleh.

IKK 06. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Formula Perhitungan :

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen

sistem antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
- d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Nilai Pembangunan Integritas di Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai ini mencerminkan komitmen seluruh unsur pimpinan

dan pegawai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencapaian nilai pembangunan integritas didukung oleh pelaksanaan berbagai program secara berkelanjutan, antara lain penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai melalui penandatanganan Pakta Integritas, internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan pengawasan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), pengelolaan Whistleblowing System (WBS), penanganan benturan kepentingan, serta penerapan manajemen risiko pada setiap proses bisnis organisasi. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan budaya anti korupsi.

Selain aspek pengawasan internal, Balai Besar PPMHKP Surabaya I juga terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan melalui optimalisasi digitalisasi layanan, keterbukaan informasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif, serta penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Berbagai inovasi pelayanan yang dikembangkan menjadi wujud nyata komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penguatan integritas juga diwujudkan melalui pembinaan budaya organisasi yang menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, serta keteladanan pimpinan. Setiap pegawai didorong untuk menjadi agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Sinergi seluruh pegawai menjadi faktor utama dalam mempertahankan serta meningkatkan nilai pembangunan integritas organisasi.

Ke depan, Balai Besar PPMHKP Surabaya I berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan integritas melalui penguatan implementasi Zona Integritas, peningkatan efektivitas pengawasan internal, penguatan budaya anti korupsi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan komitmen tersebut diharapkan tercipta organisasi yang semakin profesional, terpercaya, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan akuntabel.

IKK 07. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Formula Perhitungan :

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP. Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP. Berikut kategori nilai PM SAKIP :

KATEGORI NILAI PM SAKIP			
KATEGORI	NILAI		PREDIKAT
AA	>90 – 100		Sangat Memuaskan
A	>80 – 90		Memuaskan
BB	>70 – 80		Sangat Baik
B	>60 – 70		Baik
CC	>50 – 60		Cukup
C	>30 – 50		Kurang
D	0 – 30		Sangat Kurang

Gambar 5. Kategori nilai PM SAKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I. Penilaian mandiri dilakukan sebagai instrumen evaluasi internal untuk memastikan bahwa seluruh komponen SAKIP telah diterapkan secara efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil (result oriented), sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan penilaian mandiri mencakup evaluasi terhadap lima komponen utama SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja organisasi. Hasil penilaian menjadi dasar dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di seluruh unit kerja.
2. Keterpaduan antara dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, rencana aksi, serta penganggaran berbasis kinerja.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui rapat evaluasi bulanan maupun triwulanan.
4. Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang lebih berorientasi pada analisis pencapaian outcome.
5. Terlaksananya reviu internal maupun pembinaan dari unit pembina di lingkungan Badan Mutu KKP.
6. Meningkatnya kompetensi pegawai dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Beberapa kendala yang masih ditemukan dalam implementasi SAKIP antara lain:

1. Belum optimalnya keterkaitan antara indikator kinerja pada level individu, unit kerja, dan organisasi.
2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja masih perlu diperdalam.
3. Kualitas penyusunan indikator outcome pada beberapa kegiatan masih memerlukan penyempurnaan agar lebih terukur dan berorientasi manfaat.
4. Dokumentasi atas tindak lanjut hasil evaluasi internal belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP, Balai Besar PPMHKP Surabaya I telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan secara berkelanjutan, antara lain:

- Menyempurnakan cascading kinerja mulai dari sasaran strategis organisasi hingga Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sehingga seluruh indikator saling selaras.
- Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui pemantauan capaian indikator, rencana aksi, dan tindak lanjut hasil evaluasi.
- Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP dengan memperkuat analisis pencapaian kinerja, efisiensi anggaran, faktor keberhasilan, serta rencana tindak lanjut.
- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, coaching, dan pendampingan terkait implementasi SAKIP.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengukuran, monitoring, dan pelaporan kinerja.
- Melaksanakan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan seluruh rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada tahun berikutnya, Balai Besar PPMHKP Surabaya I menetapkan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
2. Memperkuat integrasi antara perencanaan kinerja, penganggaran, manajemen risiko, serta evaluasi kinerja.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

- 
4. Memperkuat budaya kinerja melalui peningkatan akuntabilitas seluruh unit kerja dan individu.
 5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi internal maupun eksternal sebagai bagian dari perbaikan tata kelola organisasi.
 6. Meningkatkan sinergi dengan unit pembina dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan.

Melalui berbagai upaya tersebut, Balai Besar PPMHKP Surabaya I berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga tercipta organisasi yang profesional, akuntabel, adaptif, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan publik yang prima. Peningkatan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Mutu KKP secara efektif dan berkelanjutan.

IKK 08. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Defnisi :

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja merupakan indikator yang mengukur tingkat efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, baik yang berasal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun hasil pengawasan internal lainnya. Indikator ini mencerminkan komitmen Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan hasil pengawasan

sebagai dasar perbaikan sistem, proses bisnis, pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif untuk ditindaklanjuti, tetapi juga sebagai instrumen manajemen dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, efektivitas pelaksanaan program, serta mitigasi risiko organisasi. Oleh karena itu, setiap rekomendasi dianalisis, ditindaklanjuti, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Pada Tahun Anggaran 2026, Balai Besar PPMHKP Surabaya I menetapkan target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja sebesar **86%**. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, seluruh rekomendasi yang telah menjadi kewajiban satuan kerja berhasil dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan tata kelola organisasi, sehingga realisasi indikator mencapai **100%** atau **116,28% dari target**.

Sejak tahun 2021 hingga 2026, indikator kegiatan “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I” selalu tercapai 100% yang artinya BPPMHKP Surabaya I telah tuntas menindaklanjuti sehingga capaian selalu 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara tepat waktu, terdokumentasi dengan baik, dan diimplementasikan dalam bentuk perbaikan kebijakan, prosedur, sistem kerja, maupun peningkatan kualitas pengendalian internal.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

1. Sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi lintas unit kerja sehingga proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih panjang.
2. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan yang mengharuskan penyesuaian terhadap mekanisme tindak lanjut.
3. Beberapa rekomendasi memerlukan penyempurnaan dokumen pendukung dan bukti implementasi sebelum dapat dinyatakan selesai.
4. Perlunya peningkatan kualitas dokumentasi atas pelaksanaan tindak lanjut agar lebih sistematis dan mudah ditelusuri pada saat evaluasi berikutnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan tata kelola organisasi, Balai Besar PPMHKP Surabaya I terus melaksanakan berbagai upaya perbaikan secara berkelanjutan, antara lain:

- Menyusun rencana aksi tindak lanjut untuk setiap rekomendasi hasil pengawasan beserta target waktu penyelesaiannya.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres tindak lanjut melalui rapat pimpinan dan forum evaluasi internal.
- Memperkuat penerapan manajemen risiko dan SPIP sebagai langkah preventif untuk meminimalkan terulangnya temuan yang sama.
- Meningkatkan kualitas dokumentasi bukti tindak lanjut melalui pengelolaan arsip dan administrasi yang lebih tertib.
- Meningkatkan kapasitas pegawai melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan mengenai tata kelola, pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan.
- Mengintegrasikan hasil pengawasan ke dalam proses perencanaan, penyusunan SOP, manajemen risiko, dan evaluasi kinerja sehingga setiap rekomendasi memberikan nilai tambah bagi organisasi.

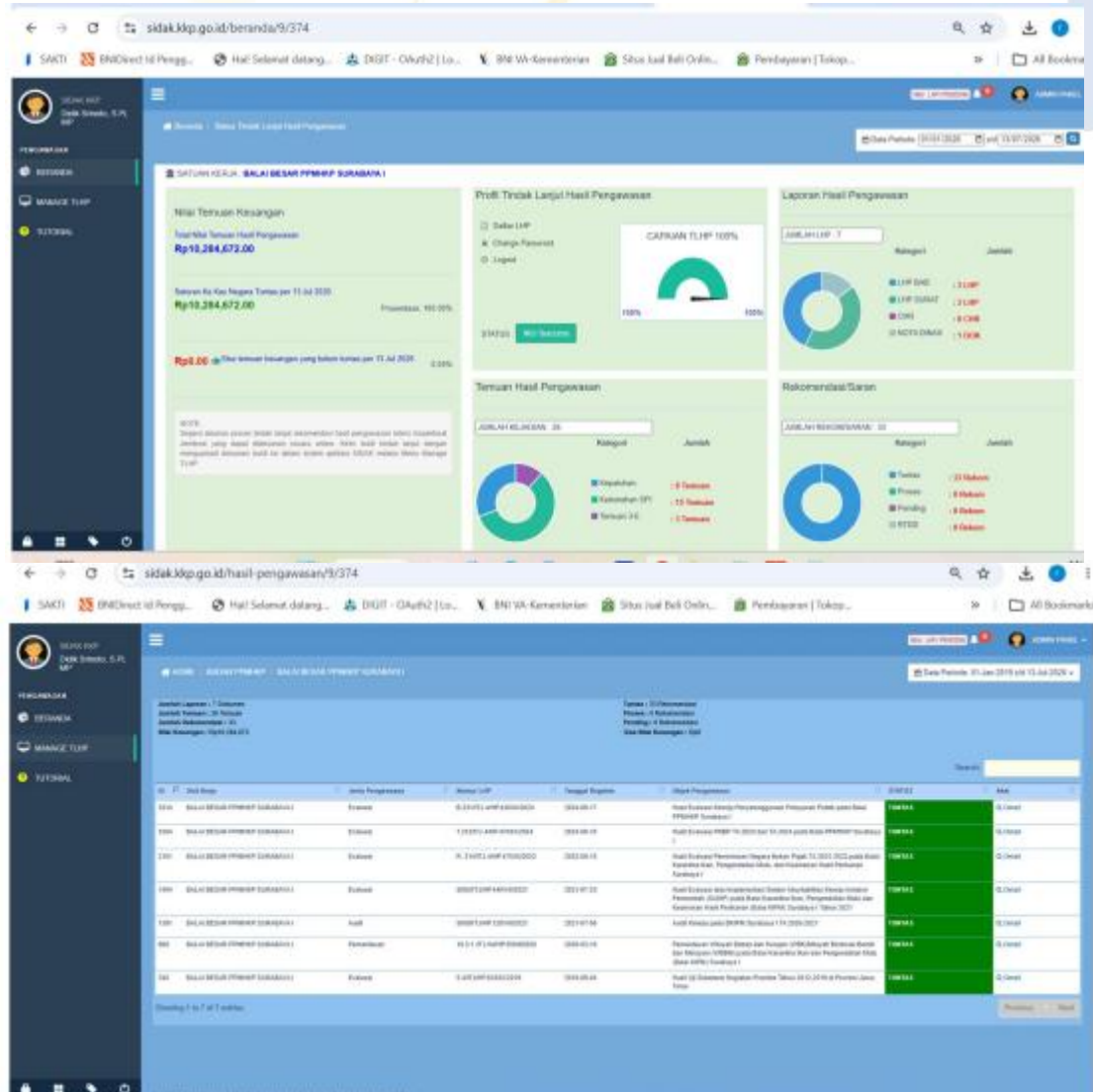
Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil pengawasan, Balai Besar PPMHKP Surabaya I akan melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti tepat waktu sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.
2. Memperkuat sistem monitoring berbasis indikator dan bukti dukung sehingga perkembangan tindak lanjut dapat dipantau secara real time.
3. Mengintegrasikan hasil pengawasan ke dalam penyusunan program kerja, perencanaan anggaran, dan manajemen risiko organisasi.
4. Meningkatkan efektivitas koordinasi dengan Inspektorat Jenderal, unit pembina, dan seluruh unit terkait dalam penyelesaian rekomendasi.
5. Melaksanakan evaluasi atas efektivitas tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi yang telah diselesaikan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi.
6. Mengembangkan budaya organisasi yang menjadikan hasil pengawasan sebagai sarana pembelajaran (*organizational learning*) dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), bukan semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban administratif.

Melalui optimalisasi pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan, Balai Besar PPMHKP Surabaya I berkomitmen untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efektivitas pengendalian intern, mendorong perbaikan tata kelola, serta mewujudkan

organisasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan SIDAK Triwulan II Tahun 2026 :



Gambar 6. Laporan SIDAK Triwulan II Tahun 2026



Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup KKP" Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Jenderal	43	43	100,00	0	0,00
2	Ditjen PK	115	105	91,30	10	8,70
3	Ditjen PRL	13	13	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	115	99	86,09	16	13,91
5	Ditjen PSDKP	89	89	100,00	0	0,00
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	170	165	97,06	5	2,94
7	BPPSDMKP	64	64	100,00	0	0,00
8	Ditjen PDSPKP	29	29	100,00	0	0,00
9	BPPMHKP	27	27	100,00	0	0,00
10	Inspektorat Jenderal	7	7	100,00	0	0,00
TOTAL		672	641	95,39	31	4,61

Tabel 15. Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP

Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai Besar PPMHKP Surabaya I berdasarkan LHP (baik bentuk LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPPMHKP menjadi objek pengawasan.

IKK 09. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung IKPA dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L. IKPA dapat dijadikan alat managerial untuk

mendukung ketercapaian output (*output delivery*) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengukuran capaian IKPA dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif);
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1 kali dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2 kali revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Revisi DIPA, antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Balai Besar PPMHKP Surabaya I berusaha sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap) serta mengupayakan frekuensi revisi sebanyak 1 kali dalam 1 Triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker;
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas;
- c. Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA;
- d. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Deviasi Halaman III DIPA, antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, Balai Besar PPMHKP Surabaya I melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan,
- Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya serta menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal di Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP



pada Bendahara Pengeluaran;

- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah);
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengelolaan UP, antara lain:

- Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D U/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

LPJ Bendahara :

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelolanya;
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN;

Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek LPJ Bendahara, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya serta memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada aplikasi SPRINT.

Penyampaian Data Kontrak :

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyampaian Data Kontrak, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (*approval*) oleh KPPN.

Penyelesaian Tagihan :

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta);

- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyelesaian Tagihan, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM nya ke KPPN,
- Lebih teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Penyerapan Anggaran :

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan IV (15%), Triwulan IVI (40%), (60%), dan (90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyerapan Anggaran, antara lain:

- Senantiasa memperhatikan progress penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif,
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

b. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Retur SP2D, antara lain:

- Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga/penerima pembayaran,
- Aktir berkoordinasi dengan KPPN tidak lebih dari 7 hari kerja untuk melakukan penyelesaian apabila terjadi retur SP2D.

Perencanaan Kas :

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (> Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Perencanaan Kas, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Milyar) yang memerlukan penyampaian Renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

Pengembalian/ Kesalahan SPM :

- a. Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b. Pengembalian SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier, sehingga SPM harus diperbaiki oleh Satker.
- c. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengembalian/Kesalahan SPM, antara lain:

- Melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja terhadap capaian nilai IKPA Balai Besar PPMHKP Surabaya I.
- b. Pagu Minus
 - a. Pagu Minus dihitung akhir tahun untuk sesuai jenis belanja sampai dengan level 6 digit/akun.
 - b. Pagu minus dapat terjadi akibat kekurangan anggaran maupun karena pergeseran akun (revisi POK) yang belum dilakukan penyamaan data/revisi ke Kanwil DJPb.

Dispensasi SPM :

- a. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaikan melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun anggaran.
- b. Dikenakan penalti nilai sesuai dengan rentang SPM yang mendapat dispensasi.

DEFINISI :

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;

- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

CARA PENGUKURAN :

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1x dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- ✓ Revisi kewenangna IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Devisiasi RDP
(Halaman III DIPA) –
Bobot Penilaian 10%

✓ Indikator Deviasi
Halaman III DIPA

dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan

- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara Tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik Target triwulan dihitung dengan :

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per jenis belanja dihitung dengan :



$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$

$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$

$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan :

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \times \frac{100}{n}$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)$$

Capaian Triwulan II :

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER																
NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek
1	06 Juni	165	032	427542	BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10,00	94,47 15 14,17	97,24	97,44 20 19,49	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	98,72	100,00 25 25,00	100,00
															79,66	80,00%
																98,32

Gambar 7. Capaian (IKPA) lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026

IKK 10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Perhitungan :

NKPA level 1 didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25



$$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan:

NKPA UEI	: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I
CIKP	: Capaian Indikator Kinerja Program
NEfSatker	: Nilai Efektivitas Satker
NE _{Satker}	: Nilai Efisiensi Satker
WCIKP	: Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfSatker	: Bobot Nilai Efektivitas Satker
WNE _{Satker}	: Bobot Nilai Efisiensi Satker

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan indikator yang menggambarkan kualitas proses perencanaan anggaran pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Pengukuran NKPA dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan anggaran telah memenuhi prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Penyusunan perencanaan anggaran dilaksanakan melalui pendekatan berbasis kinerja (performance-based budgeting), dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, dan alokasi sumber daya. Setiap usulan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil organisasi, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, analisis risiko, serta memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran sehingga mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dalam rangka meningkatkan nilai NKPA, Balai Besar PPMHKP Surabaya I secara konsisten melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kualitas revisi anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta tingkat penyerapan anggaran yang tetap berorientasi pada pencapaian kinerja. Penguatan koordinasi antarunit kerja, peningkatan kompetensi pengelola perencanaan dan keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang berkualitas.

Melalui peningkatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Balai Besar PPMHKP Surabaya I berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Capaian NKPA juga menjadi indikator penting dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, efektivitas pelaksanaan program, serta keberhasilan pencapaian target pembangunan di bidang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



Keberhasilan pencapaian NKPA didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan telah disusun secara selaras dengan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, serta arah kebijakan Badan Mutu KKP.
2. Terjalannya koordinasi yang efektif antara unit perencanaan, keuangan, dan seluruh penanggung jawab kegiatan dalam proses penyusunan dan penyesuaian anggaran.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran pemerintah sehingga meningkatkan kualitas dokumen dan ketepatan waktu penyusunan.
4. Pelaksanaan rewiu internal terhadap dokumen perencanaan dan anggaran sebelum pengajuan maupun revisi.
5. Meningkatnya kompetensi SDM pengelola perencanaan dan keuangan melalui berbagai kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

Dalam proses pencapaian target NKPA, terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian, antara lain:

1. Adanya perubahan kebijakan nasional yang mengakibatkan penyesuaian program dan revisi anggaran pada tahun berjalan.
2. Perubahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan akibat dinamika kondisi lapangan sehingga memerlukan penyesuaian jadwal maupun alokasi anggaran.
3. Belum optimalnya kualitas penyusunan beberapa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada tahap awal perencanaan.
4. Keterbatasan waktu dalam proses penyesuaian dokumen perencanaan terhadap perubahan kebijakan pemerintah.

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian NKPA pada tahun berikutnya, Balai Besar PPMHKP Surabaya I akan melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja dengan memastikan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, output, dan alokasi anggaran.
2. Memperkuat proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.
3. Mengurangi frekuensi revisi anggaran melalui peningkatan akurasi perencanaan sejak awal tahun.
4. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran.



5. Meningkatkan sinergi antara unit teknis, perencanaan, dan keuangan agar setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal.
6. Melaksanakan evaluasi pasca pelaksanaan program sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya.

Melalui berbagai upaya tersebut, Balai Besar PPMHKP Surabaya I berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada hasil (*result-oriented government*).

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah akan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi capaian nilai kinerja setiap bulannya, serta melakukan kerja sama dengan para penanggung jawab kegiatan agar memberikan laporan capaian kinerja anggaran secara tepat waktu.

IKK 11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai

pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan II Tahun Anggaran 2026, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan satuan kerja dalam mengumumkan rencana pengadaan secara terbuka, transparan, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumuman RUP pada SIRUP menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala yang memengaruhi pencapaian indikator tersebut. **Akar permasalahan** yang dihadapi adalah adanya **revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** yang berdampak pada **perubahan pagu anggaran pengadaan**, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan sebelumnya di aplikasi SIRUP. Perubahan pagu anggaran tersebut mengakibatkan perlunya pembaruan data paket pengadaan agar sesuai dengan alokasi anggaran terbaru.

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, **rekomendasi rencana aksi pada triwulan berikutnya** adalah **melakukan penyesuaian RUP yang telah diumumkan dengan Pagu Pengadaan Tahun Anggaran 2026** berdasarkan hasil revisi DIPA, sehingga

seluruh informasi pengadaan yang ditayangkan pada SIRUP tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi anggaran yang berlaku.

Adapun **hasil tindak lanjut atas rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya** telah dilaksanakan melalui **penyesuaian RUP yang telah diumumkan dengan Pagu Pengadaan sesuai hasil revisi DIPA**. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan pengadaan, dokumen anggaran, dan informasi yang dipublikasikan pada aplikasi SIRUP, sehingga proses pengadaan dapat berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut rekapitulasi data hasil perhitungan capaian indikator kinerja untuk persentase rencana umum pengadaan terumumkan triwulan II tahun 2026 berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal No. B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026 :

(13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan - 47 Satker									
No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL				
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	18,787,046,000		18,787,046,000	18,787,046,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	726,519,000		726,519,000	726,519,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000		1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000		1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000		1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000		2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000		526,628,000	526,628,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000		2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000		942,893,000	942,893,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000		1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000		922,433,000	922,433,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,263,624,000		1,263,624,000	1,263,624,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,433,853,000		1,433,853,000	1,433,853,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,131,730,000		2,131,730,000	2,131,730,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	909,530,000	2,380,979,000	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

Tabel 16. Rekapitulasi data hasil perhitungan capaian indikator kinerja untuk persentase rencana umum pengadaan terumumkan triwulan II tahun 2026

IKK 12. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan

Pengaduan; dan Sarana. Nilai diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan pada triwulan II tahun 2026, maka populasi penerima layanan pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam kurun waktu triwulan II tahun 2026 adalah sebanyak 125 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan dengan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan.

Untuk jumlah populasi sebanyak 125 orang, maka penentuan jumlah sampelnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P(1-P)}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot (1-P)}$$
$$S = \frac{3.841 + 125 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{(0.0025 \cdot 124) + (3.841 \cdot 0.5 \cdot 0.5)}$$

$$S = 95,83 \sim 96$$

, dimana: S = jumlah sampel

λ^2 = Nilai Chi Square tabel = 3,841, dimana df = taraf kesalahan bisa 1% dan α = 5% atau 0,05

P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka P = 0.5 atau populasi menyebar normal)

N = Jumlah populasi

d = Tingkat toleransi kesalahan = 0,05

Berdasarkan rumus Tabel Krejcie and Morgan , jumlah minimum sampel responden SKM yang harus dikumpulkan dalam periode triwulan II tahun 2026 adalah 96 orang.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/20> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

- 
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
 3. Waktu penyelesaian : Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
 4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
 6. Kecepatan respon dari aplikasi : Kecepatan respon dari aplikasi adalah kecepatan dari aplikasi layanan dalam membuka halaman, konten, pencarian informasi, mengunduh atau mengunggah file.
 7. Kemudahan dari aplikasi : Kemudahan dari aplikasi adalah kemudahan dalam penggunaan fitur dari aplikasi layanan.
 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
 9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Mengacu Surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kepala ke UPT BPPMHKP No. 1955/BPPMHK.1/HM.450/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026 mengenai Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan II dapat disimpulkan bahwa Nilai Capaian IKU UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I sebesar 92.70 % Nilai IKU UPT tersebut sudah melebihi target nilai IKU UPT yang ditetapkan yaitu 89%.

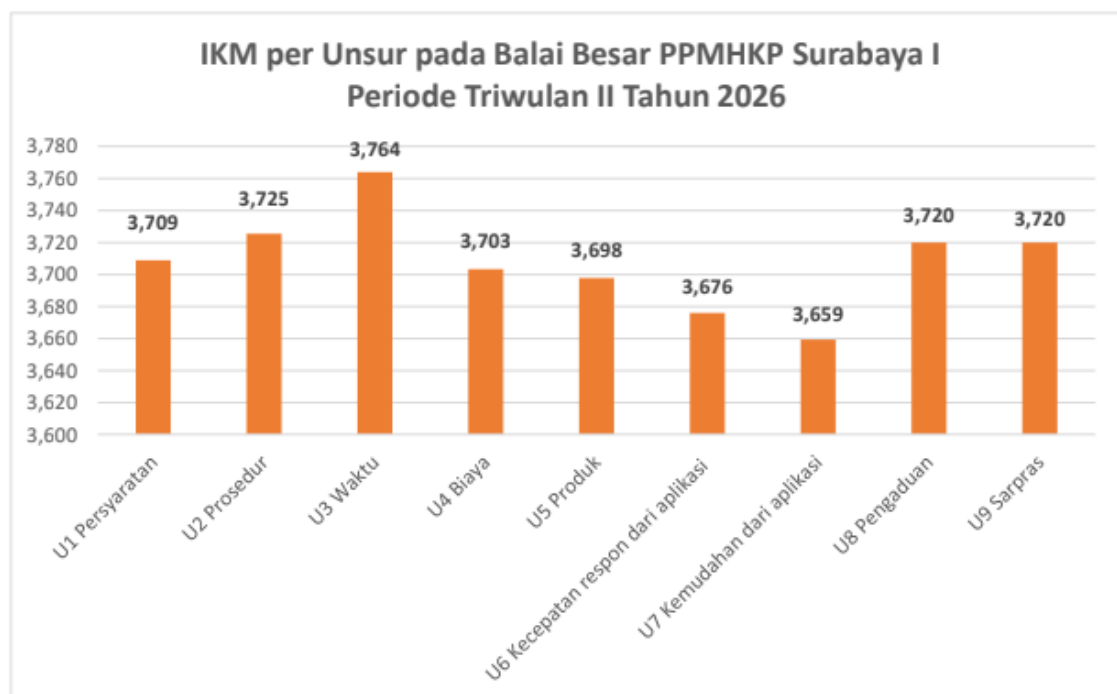
Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya Untuk dapat memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu.



Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.709	3.725	3.764	3.703	3.698	3.676	3.659	3.720	3.720
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3,708 (92,70 atau A atau Sangat Baik)								

Tabel 17. Detail Indeks SKM per Unsur



Gambar 8. Grafik Indeks SKM Periode Triwulan II - 2026 per Unsur

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Semoga semakin pagi saya datang ambil hasil jam 7an
- Pelayanan cepat dan mantap untuk P. Aris Jatmiko
- Pelayanan fast respon sangat baik

- Pelayanan p. Feri cepat dan mantap
- Mohon untuk memberikan info tidak dadakan, terima kasih
- Semoga kedepannya untuk pelayanannya semakin baik dan memudahkan pengguna jasa.
- Pelayanan the best. Bu Titin, Bu Rina, Pak budi, Pak Wahyu, Pak nuri, dkk. Terima kasih
- Pelayanan masyarakat aris cepat mantap
- Fasilitas sangat nyaman pegawai semua ramah dan sopan
- Petugas memberikan pelayanan yg sangat cepat dan professional
- Pak irwan good jobb
- Pelayanan sudah cukup baik, informasi terkait proses pelayanan juga cukup jelas. Mohon petugas untuk tetap mempertahankan pelayanan secara prima.
- Pelayanan konsultasi baik
- Untuk pelayanan sudah bagus, namun pada web ketika membuka halaman, konten dll kurang cepat
- Pelayanan baik dan cepat tanggap ketika kita membutuhkan.
- Sudah sesuai prosedur. Perlu ditingkatkan kembali

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kemudahan dari aplikasi perlu ditingkatkan lagi melalui pengembangan aplikasi SiapMutu secara berkala.
- Kecepatan respon dari aplikasi perlu ditingkatkan lagi melalui pemanfaatan teknologi baru dibidang IT yang dapat mendukung dan mempercepat kinerja aplikasi Siap Mutu.
- Produk Spesifikasi Jenis Layanan perlu dilakukan evaluasi berkala guna memastikan produk layanan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi.

Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (2026)			Penanggung Jawab
			JULI	AUG	SEP	
1	Kemudahan dari aplikasi	Menyediakan fasilitas pendampingan langsung kepada pengguna layanan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi layanan	√			Tim IT, Katimja. Pengendalian MHKP dan Petugas Front Office
2	Kecepatan respon dari aplikasi	- Menyediakan mekanisme pelaporan gangguan (helpdesk) agar kendala yang dialami pengguna dapat ditindaklanjuti dengan cepat	√			Tim IT, Katimja. Pengendalian MHKP dan Petugas Front Office
3	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	- Melaksanakan evaluasi berkala terhadap Produk Spesifikasi Jenis Layanan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan regulasi yang berlaku	√			Tim IT, Katimja. Pengendalian MHKP dan Petugas Front Office

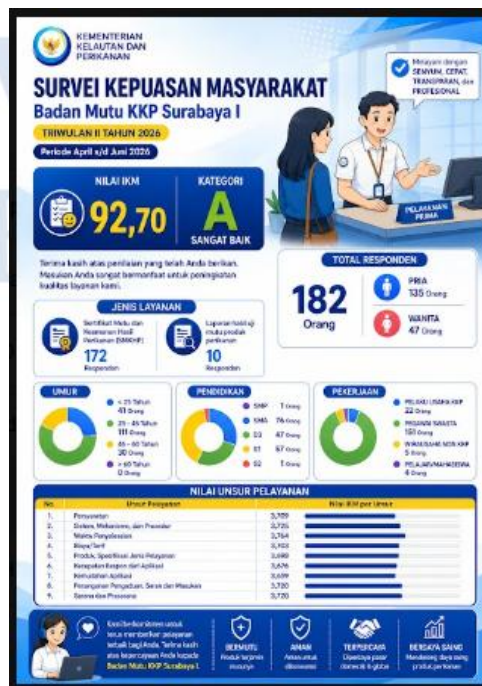
Tabel 18. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Besar PPMHKP Surabaya I dapat dilihat melalui grafik berikut :



Grafik 1 : Tren Indeks SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I TW. I 2026 – TW. II 2026

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan I - 2026 hingga triwulan II - 2026 pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I.



Gambar 9. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam hal mendukung pelayanan serta dalam rangka mendukung pelaksanaan program penghematan energi serta mendukung efisiensi penggunaan sumber daya serta penerapan budaya kerja yang ramah lingkungan, seluruh pegawai berkomitmen melaksanakan penghematan energi di lingkungan kantor. BBPPMHKP Surabaya I telah melaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Melakukan pengaturan penggunaan lampu dan peralatan listrik sesuai dengan jam operasional kantor sehingga pemakaian energi dapat lebih terkontrol dan efisien.
- Mematikan lampu, AC, komputer, serta perangkat elektronik lainnya apabila tidak sedang digunakan, terutama setelah jam kerja berakhir.
- Mengoptimalkan pemanfaatan pencahayaan alami pada siang hari dengan membuka tirai atau jendela sehingga kebutuhan penggunaan lampu dapat dikurangi.
- Mengatur suhu pendingin ruangan (AC) pada kisaran 24–25°C guna menjaga keseimbangan antara kenyamanan kerja dan efisiensi penggunaan energi listrik.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya penghematan energi serta mendorong partisipasi aktif pegawai dalam menjaga penggunaan energi secara efisien di lingkungan kantor.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan tercipta budaya kerja yang lebih peduli terhadap efisiensi energi di lingkungan kerja. Selain itu, penggunaan peralatan listrik dilakukan secara bijaksana sesuai kebutuhan, termasuk pengaturan suhu AC pada tingkat yang efisien dan memastikan seluruh perangkat elektronik dalam kondisi mati sebelum meninggalkan ruangan kerja. Melalui penerapan kebiasaan tersebut secara konsisten, diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi listrik, menekan biaya operasional, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam pelaksanaan program penghematan energi masih terdapat beberapa Kendala yang dihadapi, antara lain:

- Masih terdapat beberapa perangkat listrik yang belum menggunakan teknologi hemat energi sehingga konsumsi energi masih relatif tinggi.
- Kedisiplinan sebagian pegawai dalam mematikan perangkat listrik setelah digunakan masih perlu ditingkatkan.
- Belum tersedianya sistem monitoring penggunaan energi secara real-time sehingga pengawasan penggunaan energi belum dapat dilakukan secara optimal.

Kendala-kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program penghematan energi pada periode berikutnya.

Berdasarkan data tagihan utilitas kantor, perbandingan pengeluaran antara Tahun 2026 (Triwulan I) dan tahun 2026 (Triwulan II) adalah sebagai berikut:

No	Utilitas	2026 (Triwulan I)	2026 (Triwulan II)	% (+/-)
1	Listrik	78.332.446	83.417.438	- 6,49%
2	Telepon	12.937.716	12.937.716	- 0,00%
3	Air	6.644.260	5.847.066	+12%

Tabel 19. Data tagihan utilitas kantor, perbandingan pengeluaran antara Tahun 2026 (Triwulan I) dan tahun 2026 (Triwulan II)

Keterangan :

1. Listrik

- Tahun 2026 (Triwulan I): Rp.78.332.446
- Tahun 2026 (Triwulan I): Rp.83.417.438

Listrik mengalami **kenaikan pengeluaran sebesar 6,49%**, dari Rp.78.332.446 menjadi Rp.83.417.438. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi energi listrik pada Triwulan II meningkat dibandingkan Triwulan I. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh bertambahnya aktivitas operasional, penggunaan peralatan laboratorium, maupun peningkatan penggunaan pendingin ruangan akibat kondisi cuaca. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan langkah-langkah penghematan listrik, seperti mematikan peralatan yang tidak digunakan, mengoptimalkan penggunaan AC sesuai kebutuhan, serta melakukan pengawasan terhadap pemakaian listrik di setiap unit kerja.

2. Telepon

- Tahun 2026 (Triwulan I): Rp.12.937.716
- Tahun 2026 (Triwulan I): Rp.12.937.716

Telepon menunjukkan **tidak terdapat perubahan pengeluaran (0%)**, yaitu tetap sebesar Rp.12.937.716. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan layanan telekomunikasi masih terkendali dan sesuai dengan kebutuhan operasional.

3. Air

Air mengalami **penurunan pengeluaran sebesar 12%**, dari Rp.6.644.260 menjadi Rp.5.847.066. Penurunan ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan air yang kemungkinan didukung oleh meningkatnya kesadaran pegawai dalam menggunakan air secara bijak serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas sanitasi.

Secara keseluruhan, penghematan utilitas pada **Triwulan II Tahun 2026** telah berhasil dicapai pada penggunaan **air**, sedangkan penggunaan **telepon** tetap stabil. Namun demikian, **penggunaan listrik masih mengalami peningkatan**, sehingga diperlukan upaya pengendalian yang lebih optimal melalui penerapan budaya hemat energi, sosialisasi kepada seluruh pegawai, pemantauan konsumsi listrik secara berkala, serta optimalisasi

penggunaan peralatan listrik sesuai kebutuhan operasional. Diharapkan langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi pada triwulan berikutnya dan mendukung penerapan prinsip kantor yang hemat energi serta ramah lingkungan.

2.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran Balai Besar PPMHKP Surabaya I selama Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel 27.

URAIAN	ANGGARAN / PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN			
PNBP	7.788.400.000	739.532.373	9,50%
JUMLAH PNBP	7.788.400.000	739.532.373	9,50%
BELANJA			
BELANJA PEGAWAI	7.793.128.000	5.038.353.645	64,65%
BELANJA BARANG	3.070.072.000	1.112.319.357	36,23%
BELANJA MODAL	0	0	0
JUMLAH BELANJA	10.863.200.000	6.150.673.002	56,61%

Tabel 20. Realisasi Pendapatan dan Belanja

Realisasi Kinerja Keuangan Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp. 6.150.673.002,- atau 56,62% dari Pagu Anggaran senilai Rp. 10.863.200.000,-. Capaian realisasi keuangan tersebut di atas target yang ditetapkan, yaitu sebesar 50%. Keberhasilan capaian realisasi kinerja keuangan merupakan tindak lanjut atas kesesuaian perencanaan kinerja keuangan dengan pelaksanaan kinerja keuangan, sehingga berdampak positif terhadap capaian realisasinya.

2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan momentum strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang andal, berdaya saing, serta berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah mengenai pentingnya penerapan standar mutu pada setiap rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir.

Penyelenggaraan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya adalah Bulan Bakti Karantina dan Mutu (BMK) di Balai Besar PPMHKP Surabaya I telah berhasil memberikan dampak positif bagi tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas isu kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Selain itu, program tersebut juga berhasil meningkatkan jumlah usaha-usaha

berbasis perikanan yang mengacu pada standar dan ketentuan yang berlaku dengan memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh BPPMHKP melalui jaringan UPT BPPMHKP di seluruh Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya memulihkan kondisi perekonomian melalui peningkatan volume dan daya saing ekspor serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mutu dan keamanan produk perikanan. Selain itu, dengan bulan mutu Kelautan dan Perikanan, diharapkan kebutuhan protein masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi, serta dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha bidang perikanan karena produk mereka dapat dipasarkan. Juga diharapkan dengan adanya pembagian ikan sehat ini dapat menurunkan angka stunting pada anak-anak yang kurang mengkonsumsi protein hewani.

Melalui penyelenggaraan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, diharapkan tercipta sinergi dalam mendorong penerapan berbagai standar dan sistem jaminan mutu, seperti Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB/CPOIB), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Sistem Manajemen Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP), serta standar nasional maupun internasional lainnya. Penerapan standar tersebut menjadi fondasi penting dalam menghasilkan produk perikanan yang aman dikonsumsi, bermutu tinggi, dapat ditelusuri, dan mampu memenuhi persyaratan pasar domestik maupun global.

Bulan Mutu juga menjadi wadah edukasi dan diseminasi informasi melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, forum diskusi, layanan konsultasi, kampanye publik, serta pemberian apresiasi kepada pelaku usaha yang konsisten menerapkan sistem penjaminan mutu. Dengan demikian, budaya mutu tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi kebutuhan dan keunggulan kompetitif bagi sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya mendukung visi pembangunan kelautan dan perikanan nasional, Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu memperkuat kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional, memperluas akses pasar, serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan seluruh pelaku usaha perikanan. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan integritas, mari bersama mewujudkan hasil kelautan dan perikanan Indonesia yang **bermutu, aman, sehat, berkualitas, dan mendunia**.

Balai Besar PPMHKP Surabaya I telah melaksanakan kegiatan Bulan Mutu Tahun 2026 di 2 Kabupaten yaitu di Kabupaten Ponorogo tanggal 26 juni 2026, di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 juni 2026 dan 27 Juni 2026. Berikut informasi dan dokumentasi kegiatan untuk di masing-masing lokasi :

1. Kabupaten Ponorogo

Tanggal 26 Juni 2026, membagikan 400 paket ikan nila segar masing-masing sebanyak 5 Kg, 400 paket goodie bag serta 1 paket kegiatan uji organoleptik laboratorium.



2. Kabupaten Banyuwangi

- a. Tanggal 20 Juni 2026, di desa Tegal sari membagikan 400 paket ikan tuna segar masing-masing sebanyak 2,8 Kg, rambak kulit kakap (70 gr) sebanyak 400 paket, kerupuk cumi hitam (150 gr) sebanyak 400 paket, 400 paket goodie bag serta 1 paket kegiatan uji organoleptik laboratorium.



- b. Tanggal 27 Juni 2026, membagikan 400 paket ikan nila segar masing-masing sebanyak 2 Kg, dendeng lemuru (100 gr) sebanyak 400 paket, kerupuk cumi hitam (150 gr) sebanyak 400 paket, rengginang cumi (240 gr) sebanyak 400

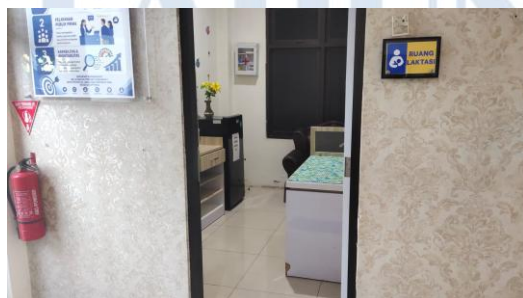
paket, rengginang trasi (240 gr) sebanyak 400 paket, rengginang ikan (240 gr) sebanyak 400 paket, kerupuk ikan (150 gr) sebanyak 400 paket, rengginang jumputan (240 gr) sebanyak 400 gram, 400 paket goodie bag serta 1 paket



kegiatan uji organoleptik laboratorium.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik :

- Penyediaan Sarana dan Prasarana: Menyiapkan fasilitas yang memenuhi kebutuhan semua gender, misalnya ruang laktasi, toilet terpisah antara pria dan



wanita, tempat wudhu terpisah, jalur dan lift ramah disabilitas, serta ruang ramah anak.

● Contoh Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik :

1. Ruang laktasi
2. Playground



3. Fasilitas lain :

- a. Ramp/Jalur Landai – Memudahkan pengguna kursi roda dan pejalan kaki dengan mobilitas terbatas.



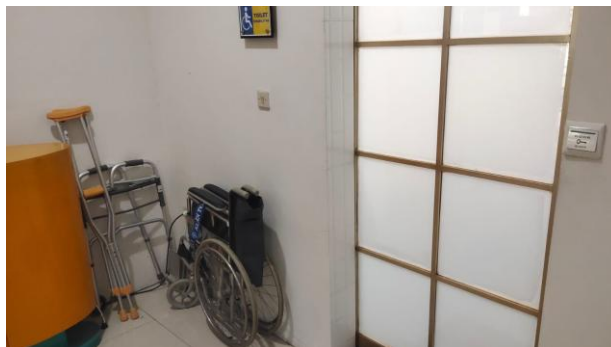
- b. Guiding Block – Menuntun penyandang tunanetra menuju area pelayanan.



- c. Area Parkir Khusus – Memberikan ruang akses yang strategis dan aman.



- d. Kursi Roda – Disediakan untuk mendukung mobilitas di dalam gedung.





- e. Toilet Khusus Disabilitas – Dirancang untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna.



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026



BAB IV PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar PPMHKP Surabaya I menyajikan perkembangan capaian sasaran strategis Balai Besar PPMHKP Surabaya I yang tercermin dalam capaian IKU/IKK. Dalam laporan ini dilakukan perbandingan antara capaian IKU/IKK tersebut terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian IKU Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026 dapat disimpulkan bahwa secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 116,12% (kategori Istimewa) sehingga terdapat peningkatan nilai dari Triwulan I ke Triwulan II Tahun 2026.

1.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II Tahun 2026, terdapat hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu direkomendasikan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan setiap bulan serta apel pagi setiap hari Senin dan Rabu agar target kinerja tercapai. Berikut dokumentasi rapat dan apel di Balai Besar PPMHKP Surabaya I selama Triwulan II Tahun 2026 :



Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I kepada Kepala BPPMHKP, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



LAMPIRAN

LAPORAN

KINERJA

TRIWULAN II

TAHUN 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026 13 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja “Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan” Triwulan II Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Triwulan II tahun 2026, dengan ini kami sampaikan nilai capaian Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan II Tahun 2026 untuk digunakan sebagai data pendukung IKU UPT yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan. (sebagaimana rincian terlampir).

Demikian kami menyampaikan, atas perkenan dan dukungan baik yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat
Nomor : B. 607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

A. Daftar Nama Penerima

1. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I;
2. Kepala Balai PPMHKP Medan I;
3. Kepala Balai PPMHKP Tanjung Pinang;
4. Kepala Balai PPMHKP Lampung;
5. Kepala Balai PPMHKP Jakarta;
6. Kepala Balai PPMHKP Semarang;
7. Kepala Balai PPMHKP Surabaya II;
8. Kepala Balai PPMHKP Entikong;
9. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan;
10. Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru;
11. Kepala Balai PPMHKP Tarakan;
12. Kepala Balai PPMHKP Denpasar;
13. Kepala Balai PPMHKP Mataram;
14. Kepala Balai PPMHKP Makassar;
15. Kepala Balai PPMHKP Manado;
16. Kepala Balai PPMHKP Ambon;
17. Kepala Balai PPMHKP Jayapura;
18. Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh;
19. Kepala Stasiun PPMHKP Medan II;
20. Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balia Asahan;
21. Kepala Stasiun PPMHKP Padang;
22. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru;
23. Kepala Stasiun PPMHKP Jambi;
24. Kepala Stasiun PPMHKP Palembang;
25. Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu;
26. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang;
27. Kepala Stasiun PPMHKP Batam;
28. Kepala Stasiun PPMHKP Merak;
29. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung;
30. Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon;
31. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
32. Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak;
33. Kepala Stasiun PPMHKP Palangkaraya;
34. Kepala Stasiun PPMHKP Kupang;
35. Kepala Stasiun PPMHKP Bima;
36. Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju;
37. Kepala Stasiun PPMHKP Palu;
38. Kepala Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai;
39. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari;

- 40. Kepala Stasiun PPMHKP Baubau;
- 41. Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo;
- 42. Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna;
- 43. Kepala Stasiun PPMHKP Ternate;
- 44. Kepala Stasiun PPMHKP Sorong;
- 45. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Muhammad Hatta Arisandi

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Nomor : B. 607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026
 Tanggal : 13 Juli 2026

A. Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer UPT lingkup BPPMHKP
 TW II 2026

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72,00	90,00	90,00	86,67	70,00	90,00	85,33	118,52%
2	Balai PPMHKP Medan I	72,00	75,00	70,00	80,00	93,33	70,00	77,67	107,87%
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	72,00	95,83	70,00	70,00	70,00	85,00	78,17	108,56%
4	Balai PPMHKP Lampung	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
5	Balai PPMHKP Jakarta	72,00	90,00	90,00	90,00	70,00	90,00	86,00	119,44%
6	Balai PPMHKP Semarang	72,00	90,00	88,33	70,00	70,00	70,00	77,67	107,87%
7	Balai PPMHKP Surabaya II	72,00	90,00	90,00	90,00	70,00	70,00	82,00	113,89%
8	Balai PPMHKP Entikong	72,00	85,00	65,00	65,00	65,00	65,00	69,00	95,83%
9	Balai PPMHHPK Balikpapan	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
11	Balai PPMHKP Tarakan	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	76,00	105,56%
12	Balai PPMHKP Denpasar	72,00	90,00	90,00	70,00	70,00	90,00	82,00	113,89%
13	Balai PPMHKP Mataram	72,00	89,44	71,00	70,00	70,00	70,00	74,09	102,90%
14	Balai PPMHKP Manado	72,00	70,00	71,00	70,00	73,33	88,33	74,53	103,52%
15	Balai PPMHKP Makassar	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	90,00	80,00	111,11%
16	Balai PPMHKP Ambon	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	88,33	73,87	102,59%
17	Balai PPMHKP Jayapura	72,00	85,00	85,00	65,00	65,00	83,00	76,60	106,39%
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
19	Stasiun PPMHKP Medan II	72,00	90,00	70,00	70,00	73,33	90,00	78,67	109,26%
20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
21	Stasiun PPMHKP Padang	72,00	70,00	70,00	65,00	65,00	65,00	67,00	93,06%
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72,00	75,83	66,00	65,00	65,00	65,00	67,37	93,56%

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPI B	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
23	Stasiun PPMHKP Jambi	72,00	88,33	80,00	70,00	80,00	70,00	77,67	107,87%
24	Stasiun PPMHKP Palembang	72,00	88,33	70,00	70,00	70,00	66,67	73,00	101,39%
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72,00	90,00	70,00	65,00	65,00	65,00	71,00	98,61%
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
27	Stasiun PPMHKP Batam	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
28	Stasiun PPMHKP Merak	72,00	89,17	90,00	70,00	90,00	70,00	81,83	113,66%
29	Stasiun PPMHKP Bandung	72,00	83,89	66,00	65,00	65,00	65,00	68,98	95,80%
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	65,00	73,00	101,39%
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	87,50	79,50	110,42%
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	72,00	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
34	Stasiun PPMHKP Kupang	72,00	90,00	71,00	70,00	70,00	70,00	74,20	103,06%
35	Stasiun PPMHKP Bima	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
39	Stasiun PPMHKP Kendari	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
40	Stasiun PPMHKP Baubau	72,00	77,00	70,00	70,00	70,00	90,00	75,40	104,72%
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72,00	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	66,40	92,22%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72,00	85,00	65,00	65,00	65,00	83,33	72,67	100,93%
43	Stasiun PPMHKP Ternate	72,00	83,33	65,00	65,00	65,00	85,00	72,67	100,93%
44	Stasiun PPMHKP Sorong	72,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	68,00	94,44%
45	Stasiun PPMHKP Merauke	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
	Jumlah		3622,17	3237,33	3141,67	3135,00	3332,17	3293,67	
	%Realisasi IKU Primer		80,49	71,94	69,81	69,67	74,05	73,19	
	% Capaian IKU Primer		113,37	102,77	93,09	92,89	102,84	101,66	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan sebesar 73,19%
2. Capaian Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 72% adalah 101,65%

Rumus (realisasi/target x 100%)= $(73,19/72) \times 100\% = 101,65\%$

B. Link Drive

Sertifikasi CDOIB–CPOIB dan CPPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mFm5vKwRPEJiVJM9yAYjitthzuRKi9N0/edit?gid=2020555697#gid=2020555697>

Sertifikasi CPIB Kapal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TNIUPD_Zudp61bfvNAdG0-wXvNfSoX-0/edit?usp=sharing&oid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true

Sertifikasi CBIB – CPIB

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Jr37pkKR62Y5NWFwiAbgrL1Xy-ieaqBEDhd42B_rhA/edit?usp=sharing

Manual IKU Pusat Mutu Produksi Primer 2026

<https://drive.google.com/file/d/1zHOyWrDwH1-E3VDI3il15DUm3Q8atCnV/view?usp=sharing>

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I TRIWULAN II TAHUN 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan	
Target (%)	72	72	72	72	72	72	72	72
Realisasi (%)	81.95	85.33	83.64					
Persen Capaian	113.83	118.52	116.175					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

DESKRIPSI
LATAR BELAKANG • Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. • Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. • Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

- Output kegiatan berupa sertifikasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual

CARA PENGUKURAN

$$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Realisasi IKU UPT Tw.I

B = Realisasi IKU UPT Tw.II

Capaian IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan II 2026 dan atau s/d Juni sebesar $(Tw.1+Tw.2)/2 = (81.95 + 85.33)/2 = 83.64$

Data dukung inspeksi produksi primer bersumber dari Database Aplikasi SIAP MUTU dan OSS.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan inspeksi kegiatan produksi primer sesuai dengan regulasi dan Prosedur dan selanjutnya selalu memantau antara target dan realisasi agar tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan oleh Kepala BBPPMHKP.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Surabaya, 14 Juli 2026
Kepala BBPPMHKP Surabaya I

Sri Anggoro



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026 13 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja “Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan” Triwulan II Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Triwulan II tahun 2026, dengan ini kami sampaikan nilai capaian Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan II Tahun 2026 untuk digunakan sebagai data pendukung IKU UPT yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan. (sebagaimana rincian terlampir).

Demikian kami menyampaikan, atas perkenan dan dukungan baik yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat
Nomor : B. 607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

A. Daftar Nama Penerima

1. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I;
2. Kepala Balai PPMHKP Medan I;
3. Kepala Balai PPMHKP Tanjung Pinang;
4. Kepala Balai PPMHKP Lampung;
5. Kepala Balai PPMHKP Jakarta;
6. Kepala Balai PPMHKP Semarang;
7. Kepala Balai PPMHKP Surabaya II;
8. Kepala Balai PPMHKP Entikong;
9. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan;
10. Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru;
11. Kepala Balai PPMHKP Tarakan;
12. Kepala Balai PPMHKP Denpasar;
13. Kepala Balai PPMHKP Mataram;
14. Kepala Balai PPMHKP Makassar;
15. Kepala Balai PPMHKP Manado;
16. Kepala Balai PPMHKP Ambon;
17. Kepala Balai PPMHKP Jayapura;
18. Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh;
19. Kepala Stasiun PPMHKP Medan II;
20. Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balia Asahan;
21. Kepala Stasiun PPMHKP Padang;
22. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru;
23. Kepala Stasiun PPMHKP Jambi;
24. Kepala Stasiun PPMHKP Palembang;
25. Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu;
26. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang;
27. Kepala Stasiun PPMHKP Batam;
28. Kepala Stasiun PPMHKP Merak;
29. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung;
30. Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon;
31. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
32. Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak;
33. Kepala Stasiun PPMHKP Palangkaraya;
34. Kepala Stasiun PPMHKP Kupang;
35. Kepala Stasiun PPMHKP Bima;
36. Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju;
37. Kepala Stasiun PPMHKP Palu;
38. Kepala Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai;
39. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari;

- 40. Kepala Stasiun PPMHKP Baubau;
- 41. Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo;
- 42. Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna;
- 43. Kepala Stasiun PPMHKP Ternate;
- 44. Kepala Stasiun PPMHKP Sorong;
- 45. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Muhammad Hatta Arisandi

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Nomor : B. 607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026
 Tanggal : 13 Juli 2026

A. Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer UPT lingkup BPPMHKP
 TW II 2026

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72,00	90,00	90,00	86,67	70,00	90,00	85,33	118,52%
2	Balai PPMHKP Medan I	72,00	75,00	70,00	80,00	93,33	70,00	77,67	107,87%
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	72,00	95,83	70,00	70,00	70,00	85,00	78,17	108,56%
4	Balai PPMHKP Lampung	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
5	Balai PPMHKP Jakarta	72,00	90,00	90,00	90,00	70,00	90,00	86,00	119,44%
6	Balai PPMHKP Semarang	72,00	90,00	88,33	70,00	70,00	70,00	77,67	107,87%
7	Balai PPMHKP Surabaya II	72,00	90,00	90,00	90,00	70,00	70,00	82,00	113,89%
8	Balai PPMHKP Entikong	72,00	85,00	65,00	65,00	65,00	65,00	69,00	95,83%
9	Balai PPMHHPK Balikpapan	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
11	Balai PPMHKP Tarakan	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	76,00	105,56%
12	Balai PPMHKP Denpasar	72,00	90,00	90,00	70,00	70,00	90,00	82,00	113,89%
13	Balai PPMHKP Mataram	72,00	89,44	71,00	70,00	70,00	70,00	74,09	102,90%
14	Balai PPMHKP Manado	72,00	70,00	71,00	70,00	73,33	88,33	74,53	103,52%
15	Balai PPMHKP Makassar	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	90,00	80,00	111,11%
16	Balai PPMHKP Ambon	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	88,33	73,87	102,59%
17	Balai PPMHKP Jayapura	72,00	85,00	85,00	65,00	65,00	83,00	76,60	106,39%
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
19	Stasiun PPMHKP Medan II	72,00	90,00	70,00	70,00	73,33	90,00	78,67	109,26%
20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
21	Stasiun PPMHKP Padang	72,00	70,00	70,00	65,00	65,00	65,00	67,00	93,06%
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72,00	75,83	66,00	65,00	65,00	65,00	67,37	93,56%

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPI B	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
23	Stasiun PPMHKP Jambi	72,00	88,33	80,00	70,00	80,00	70,00	77,67	107,87%
24	Stasiun PPMHKP Palembang	72,00	88,33	70,00	70,00	70,00	66,67	73,00	101,39%
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72,00	90,00	70,00	65,00	65,00	65,00	71,00	98,61%
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
27	Stasiun PPMHKP Batam	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
28	Stasiun PPMHKP Merak	72,00	89,17	90,00	70,00	90,00	70,00	81,83	113,66%
29	Stasiun PPMHKP Bandung	72,00	83,89	66,00	65,00	65,00	65,00	68,98	95,80%
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	65,00	73,00	101,39%
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	87,50	79,50	110,42%
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	72,00	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
34	Stasiun PPMHKP Kupang	72,00	90,00	71,00	70,00	70,00	70,00	74,20	103,06%
35	Stasiun PPMHKP Bima	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
39	Stasiun PPMHKP Kendari	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
40	Stasiun PPMHKP Baubau	72,00	77,00	70,00	70,00	70,00	90,00	75,40	104,72%
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72,00	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	66,40	92,22%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72,00	85,00	65,00	65,00	65,00	83,33	72,67	100,93%
43	Stasiun PPMHKP Ternate	72,00	83,33	65,00	65,00	65,00	85,00	72,67	100,93%
44	Stasiun PPMHKP Sorong	72,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	68,00	94,44%
45	Stasiun PPMHKP Merauke	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
	Jumlah		3622,17	3237,33	3141,67	3135,00	3332,17	3293,67	
	%Realisasi IKU Primer		80,49	71,94	69,81	69,67	74,05	73,19	
	% Capaian IKU Primer		113,37	102,77	93,09	92,89	102,84	101,66	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan sebesar 73,19%
2. Capaian Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 72% adalah 101,65%

Rumus (realisasi/target x 100%)= $(73,19/72) \times 100\% = 101,65\%$

B. Link Drive

Sertifikasi CDOIB–CPOIB dan CPPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mFm5vKwRPEJiVJM9yAYjitthzuRKi9N0/edit?gid=2020555697#gid=2020555697>

Sertifikasi CPIB Kapal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TNIUPD_Zudp61bfvNAdG0-wXvNfSoX-0/edit?usp=sharing&oid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true

Sertifikasi CBIB – CPIB

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Jr37pkKR62Y5NWFwiAbgrL1Xy-ieaqBEDhd42B_rhA/edit?usp=sharing

Manual IKU Pusat Mutu Produksi Primer 2026

<https://drive.google.com/file/d/1zHOyWrDwH1-E3VDI3il15DUm3Q8atCnV/view?usp=sharing>



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026 15 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja “Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan” Triwulan I Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Triwulan I tahun 2026, dengan ini kami sampaikan nilai capaian Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan 1 Tahun 2026 untuk digunakan sebagai data pendukung IKU UPT yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan. (sebagaimana rincian terlampir).

Demikian kami menyampaikan, atas perkenan dan dukungan baik yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat
Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

A. Daftar Nama Penerima

1. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I;
2. Kepala Balai PPMHKP Medan I;
3. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tanjung Pinang;
4. Kepala Balai PPMHKP Lampung;
5. Plt. Kepala Balai PPMHKP Jakarta;
6. Plt. Kepala Balai PPMHKP Semarang;
7. Plt. Kepala Balai PPMHKP Surabaya II;
8. Plt. Kepala Balai PPMHKP Entikong;
9. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan;
10. Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru;
11. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tarakan;
12. Plt. Kepala Balai PPMHKP Denpasar;
13. Plt. Kepala Balai PPMHKP Mataram;
14. Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar;
15. Plt. Kepala Balai PPMHKP Manado;
16. Plt. Kepala Balai PPMHKP Ambon;
17. Plt. Kepala Balai PPMHKP Jayapura;
18. Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh;
19. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Medan II;
20. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balia Asahan;
21. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Padang;
22. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru;
23. Kepala Stasiun PPMHKP Jambi;
24. Kepala Stasiun PPMHKP Palembang;
25. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu;
26. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang;
27. Kepala Stasiun PPMHKP Batam;
28. Kepala Stasiun PPMHKP Merak;
29. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung;
30. Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon;
31. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
32. Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak;
33. Kepala Stasiun PPMHKP Palangkaraya;
34. Kepala Stasiun PPMHKP Kupang;
35. Kepala Stasiun PPMHKP Bima;
36. Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju;
37. Kepala Stasiun PPMHKP Palu;
38. Kepala Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai;
39. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari;

- 40. Kepala Stasiun PPMHKP Baubau;
- 41. Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo;
- 42. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna;
- 43. Kepala Stasiun PPMHKP Ternate;
- 44. Kepala Stasiun PPMHKP Sorong;
- 45. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Muhammad Hatta Arisandi

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

A. Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer UPT lingkup BPPMHKP
TW 1 2026

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72,00	89,44	71,00	70,00	90,00	89,33	81,95	113,83%
2	Balai PPMHKP Medan I	72,00	80,17	70,00	70,00	70,00	70,00	72,03	100,05%
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	85,83	73,57	102,18%
4	Balai PPMHKP Lampung	72,00	88,33	71,00	70,00	90,00	70,00	77,87	108,15%
5	Balai PPMHKP Jakarta	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	90,00	78,00	108,33%
6	Balai PPMHKP Semarang	72,00	71,00	70,00	88,33	70,00	90,00	77,87	108,15%
7	Balai PPMHKP Surabaya II	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,20	97,50%
8	Balai PPMHKP Entikong	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
9	Balai PPMHHKP Balikpapan	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	72,00	89,17	90,00	70,00	70,00	89,67	81,77	113,57%
11	Balai PPMHKP Tarakan	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
12	Balai PPMHKP Denpasar	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,40	103,33%
13	Balai PPMHKP Mataram	72,00	89,44	70,00	70,00	70,00	70,00	73,89	102,62%
14	Balai PPMHKP Manado	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
15	Balai PPMHKP Makassar	72,00	81,00	70,00	70,00	70,00	90,00	76,20	105,83%
16	Balai PPMHKP Ambon	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	88,75	73,95	102,71%
17	Balai PPMHKP Jayapura	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
19	Stasiun PPMHKP Medan II	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%

20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
21	Stasiun PPMHKP Padang	72,00	71,00	71,00	65,00	65,00	85,00	71,40	99,17%
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72,00	94,17	77,67	65,00	65,00	85,00	77,37	107,46%
23	Stasiun PPMHKP Jambi	72,00	90,00	90,00	70,00	70,00	70,00	78,00	108,33%
24	Stasiun PPMHKP Palembang	72,00	70,00	88,33	70,00	70,00	66,67	73,00	101,39%
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72,00	90,00	70,00	65,00	65,00	83,33	74,67	103,70%
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72,00	88,33	70,00	70,00	70,00	70,00	73,67	102,31%
27	Stasiun PPMHKP Batam	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
28	Stasiun PPMHKP Merak	72,00	88,33	90,00	88,33	70,00	70,00	81,33	112,96%
29	Stasiun PPMHKP Bandung	72,00	84,44	85,00	83,33	65,00	65,00	76,55	106,33%
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	65,00	69,40	96,39%
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	88,33	73,87	102,59%
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	72,00	86,00	70,00	70,00	70,00	70,00	73,20	101,67%
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
34	Stasiun PPMHKP Kupang	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
35	Stasiun PPMHKP Bima	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	72,00	66,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,20	90,56%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72,00	85,00	85,00	65,00	65,00	65,00	73,00	101,39%
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
39	Stasiun PPMHKP Kendari	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,00	102,78%
40	Stasiun PPMHKP Baubau	72,00	83,67	70,00	70,00	70,00	88,33	76,40	106,11%
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72,00	84,17	66,00	65,00	65,00	65,00	69,03	95,88%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
43	Stasiun PPMHKP Ternate	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
44	Stasiun PPMHKP Sorong	72,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	68,00	94,44%

45	Stasiun PPMHKP Merauke	72,00	71,67	70,83	65,00	65,00	65,00	67,50	93,75%
	Jumlah		3430,33	3226,83	3130,00	3115,00	3415,25	3263,48	
	% Realisasi IKU Primer		76,23	71,71	69,56	69,22	75,89	72,52	
	% Capaian IKU Primer		107,37	102,44	92,74	92,30	105,41	100,72	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan sebesar 72,52%
2. Capaian Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 72% adalah 100,72%

Rumus (realisasi/target x 100%)= (72,52/72) x 100% = 100,72%

B. Link Drive

Sertifikasi CDOIB-CPOIB dan CPPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W29wYoHcLUaYxrWWx772Ost5cjiaxRzR/e/dit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true>

Sertifikasi CPIB Kapal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TNIUPD_Zudp61bfvNAdG0-wXvNfSoX-0/edit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true

Sertifikasi CBIB - CPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fzFfp7Wf6md8xgbTQh9TGQllyqaUt-DAp1h1Nw6pwio/edit?gid=1937912344#gid=1937912344>

C. Manual IKU Pusat Mutu Produksi Primer 2026

<https://drive.google.com/file/d/1zHOyWrDwH1-E3VDI3il15DUm3Q8atCnV/view?usp=sharing>

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM SURABAYA I
TRIWULAN II TAHUN 2026

Nama Kegiatan	Sasaran	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Kinerja Kegiatan (IKK)	Indikator	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm I	Q3	Q4	Sm II	Tahunan		
Target (%)	72	72	72	72	72	72	72		72
Realisasi (%)	85,05	89,36	87,21						

Catatan:

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan 4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Deskripsi
Latar Belakang - Sektor produksi Pasca Panen adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap atau dipanen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga Pemasaran produk perikanan. Sebagai bentuk pengendalian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan pascapanen maka BPPMHKP selaku Otoritas Kompeten menerbitkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP) dan Surat Pengelolaan Distribusi Ikan (SPDI). Sertifikasi produksi pasca panen ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. - Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dijelaskan bahwa Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan

pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sedangkan Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.

- Capaian indikator diperoleh dengan menghitung rata-rata persentase efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari seluruh UPT Per Triwulan.

Cara Pengukuran:

Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah indikator yang mengukur pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha yang sudah menerapkan pengendalian mutu dan memperoleh sertifikat SKP, HACCP dan SPDI untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap:

Pengendalian Mutu:

- a) Verifikasi permohonan
- b) Inspeksi
- c) Evaluasi tim Teknis
- d) Penerbitan sertifikat

Pengawasan Mutu:

- a) Penyusunan program surveilans
- b) Pelaksanaan surveilans
- c) Penerbitan SKHS

Formulasi Penghitungan :

$$TE = \frac{\sum(50\% \times A) + \sum(50\% \times B)}{2}$$

TE = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu

A = Skor pengendalian

B = Skor pengawasan

Skor efektivitas permohonan unit pengolahan ikan yang dievaluasi dihitung dengan komponen penghitungan menggunakan formulir penilaian kinerja yang terdiri dari komponen penghitungan antara lain:

a. Pengendalian Mutu (bobot 50 %) (A):

- Verifikasi permohonan (Av)
- Inspeksi (Ai)
- Evaluasi tim Teknis (Ae)
- Penerbitan sertifikat (As)

$$A = A_v + A_i + A_e + A_s$$

b. Pengawasan Mutu (bobot 50 %) (B):

- Penyusunan program surveilans (Bp)
- Pelaksanaan surveilans (Bs)
- Penerbitan SKHS (Bh)

$$B = B_p + B_s + B_h$$

Kriteria dan Bobot Penilaian:

Komponen	Indikator	Kriteria	Bobot
Pengendalian			
Verifikasi permohonan	Verifikasi permohonan	1. Tidak ada permohonan 2. Permohonan tidak lengkap atau tidak sesuai 3. Permohonan lengkap dan sesuai	1-3
	Tersedianya verifikator yang kompeten	1. Personil belum tercantum pada SK 2. Personil sudah tercantum pada SK 3. Personil sudah tercantum pada SK dan mempunyai sertifikat pelatihan terkait keamanan pangan	1-3
	Evaluasi pemenuhan persyaratan permohonan	1. Tidak dilakukan evaluasi pemenuhan persyaratan sesuai dengan norma waktu layanan 2. Evaluasi dilakukan tetapi tidak sesuai 3. Evaluasi dilakukan dan sesuai	1-3
Inspeksi	Tingkat kualitas metode inspeksi	1. Inspeksi dokumen 2. Inspeksi dengan cara online 3. Inspeksi dengan cara onsite	1-3
	Tingkat kesesuaian waktu pelaporan hasil inspeksi	1. Pelaporan dokumen hasil inspeksi tidak dilakukan dalam norma waktu layanan 2. Pelaporan dokumen hasil inspeksi dilakukan namun tidak lengkap dan/atau tidak sesuai 3. Pelaporan dokumen hasil inspeksi dilakukan sesuai dengan norma waktu layanan, lengkap dan sesuai.	1-3
	Tindakan perbaikan yang ditindaklanjuti	1. Tindakan perbaikan tidak ditindaklanjuti dalam norma waktu layanan yang ditetapkan 2. Tindakan perbaikan ditindaklanjuti namun tidak sesuai dengan ketentuan 3. Tindakan perbaikan ditindaklanjuti dan sesuai dengan ketentuan	1-3
Evaluasi tim teknis	Tersedianya evaluator yang kompeten	1. Evaluator tidak tercantum pada SK Tim 2. Evaluator tercantum pada SK Tim, namun belum mempunyai sertifikat pelatihan terkait keamanan pangan 3. Evaluator tercantum pada SK Tim dan	1-3

	Tersedia SOP pelaksanaan evaluasi	1. Tidak tersedia SOP pelaksanaan evaluasi 2. Tersedia SOP pelaksanaan evaluasi, namun tidak diterapkan 3. Tersedia SOP pelaksanaan evaluasi dan	1-3
	Tingkat kesesuaian hasil pelaksanaan evaluasi	1. Terdapat catatan hasil evaluasi dan perubahan grade 2. Terdapat catatan namun grade tidak berubah 3. Tidak ada catatan dan grade tidak berubah	1-3
Penerbitan sertifikat	Tersedia SOP penerbitan sertifikat	1. Tidak tersedia SOP penerbitan sertifikat 2. Tersedia SOP penerbitan sertifikat, namun tidak diterapkan 3. Tersedia SOP penerbitan sertifikat dan diterapkan sesuai ketentuan	1-3
	Pemenuhan SLA	1. Penerbitan sertifikat terbit lebih dari 20 hari 2. Penerbitan sertifikat dalam kurun waktu 11 – 20 hari 3. Penerbitan sertifikat sesuai dengan ketentuan (maksimal 10 hari)	1-3
	Tingkat kesesuaian sertifikat yang diterbitkan	1. Sertifikat terbit namun terdapat kesalahan mayor (kesalahan grade, tanggal terbit) 2. Sertifikat terbit namun terdapat kesalahan minor seperti kesalahan penulisan. 3. Sertifikat terbit namun tidak terdapat kesalahan	1-3
Pengawasan			
Penyusunan program	Tersedia SOP penyusunan program surveilans; Tersedianya inspektur mutu yang kompeten; Evaluasi program surveilans	1. Program surveilans tidak tersedia 2. Program surveilans tersedia namun belum sepenuhnya sesuai ketentuan 3. Program surveilans tersedia, terdokumentasi, dan disusun sesuai ketentuan	1-3
Pelaksanaan surveilans	Tingkat kualitas metode surveilans; Tingkat kesesuaian / kualitas hasil surveilans; Tindakan perbaikan yang ditindaklanjuti	1. Surveilans tidak dilaksanakan sesuai program atau tidak dilaksanakan 2. Surveilans dilaksanakan namun tidak sepenuhnya sesuai program 3. Surveilans dilaksanakan sesuai program dan seluruh hasil terdokumentasi	1-3
Penerbitan SKHS	Tersedia SOP penerbitan SKHS; Pemenuhan SLA; Tersedianya SDM yang kompeten (penandatanganan)	1. SKHS diterbitkan tidak berdasarkan hasil inspeksi atau tanpa tindakan perbaikan 2. SKHS diterbitkan berdasarkan sebagian hasil inspeksi atau tindakan perbaikan 3. SKHS diterbitkan sesuai hasil inspeksi dan tindakan perbaikan telah dipenuhi	1-3

Capaian IKK:

Mengacu Surat Kepala Pusat Pascapanen Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ke UPT BPPMHKP **No. B.2537/BPPMHK.4/RC.610/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026** bahwa pada Pada periode **Triwulan II** Tahun 2026 nilai pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan pangan sektor produksi pascapanen Balai Besar PPMHKP Surabaya I sebagai berikut:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen melalui Sertifikasi SKP sebesar **86,95%**
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen melalui Sertifikasi PMMT/HACCP sebesar **93,62%**
3. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen melalui Sertifikasi SPDI sebesar **87,50%**

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Capaian IKU UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I yang berasal dari rata-rata perhitungan persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen melalui sertifikasi SKP, PMMT/HACCP dan SPDI adalah **89,36%**. Nilai IKU UPT tersebut sudah melebihi target nilai IKU UPT yang ditetapkan yaitu 72%.

Rata-rata perhitungan sebagai berikut:

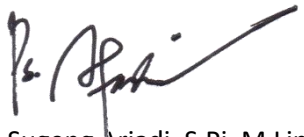
$$\text{IKU UPT} = \frac{\text{Persentase SKP} + \text{Persentase HACCP} + \text{Persentase SPDI}}{3}$$

$$\text{IKU UPT} = \frac{86,95 + 93,62 + 87,50}{3} = \frac{268,07}{3} = \mathbf{89,36 \%}$$

Dalam rangka kelengkapan Laporan ini kami sajikan Surat Kepala Pusat Pascapanen ke UPT BPPMHKP tentang nilai pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan pangan sektor produksi pascapanen pada Triwulan I dan Triwulan II.

Akar Masalah (Bila Ada)

- Ada kekuatiran sertifikasi sektor produksi pasca panen yang tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan kepada UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I karena permohonan sertifikasi berasal dari pengajuan unit usaha.
- Pelaku usaha mendapatkan kendala dalam mengajukan permohonan sertifikasi dan mengunduh Sertifikat SKP yang sudah terbit, karena adanya penyesuaian PP 28 Tahun 2025 dan KBLI versi 2025

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
• Melaksanakan kegiatan sertifikasi sektor Pascapanen sesuai prosedur dan memenuhi Perjanjian Tingkat Layanan atau <i>Service Level Agreement</i> (SLA) • Pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam pemenuhan target dan realisasi agar tercapai IKU UPT yang sudah ditetapkan kepada UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen  Puji Sugeng Ariadi, S.Pi, M.Ling NIP. 19830712 200502 1 001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR
16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP
10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026 16 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan BPPMHKP periode Triwulan 1 Tahun 2026, bersama ini terlampir disampaikan nilai pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen untuk digunakan sebagai data pengukuran IKU UPT, yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



Ditandatangani
Secara Elektronik

Widya Rusyanto

Tembusan:
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran

Nomor : B. 450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026

Tanggal : 16 April 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT BPPMHKP

1. Kepala Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya
2. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I
3. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang
4. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung
5. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta
6. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang
7. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II
8. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong
9. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan
10. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru
11. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan
12. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar
13. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram
14. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
15. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
16. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon
17. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura
18. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh
19. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II
20. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

- Perikanan Tanjung Balai Asahan
21. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
 22. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
 23. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
 24. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang
 25. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu
 26. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
 27. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam
 28. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
 29. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung
 30. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon
 31. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
 32. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak
 33. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya
 34. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
 35. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
 36. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju
 37. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
 38. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai
 39. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari
 40. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau
 41. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
 42. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
 43. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate

44. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong
45. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto

**NILAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PASCAPANEN
TRIWULAN I TAHUN 2026**

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72%	93,20%	86,95%	75,00%	85,05%
2	Balai PPMHKP Ambon	72%	98,34%	90,00%	62,50%	83,61%
3	Balai PPMHKP Balikpapan	72%	91,67%	83,34%	75,00%	83,34%
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	72%	97,00%	98,67%	75,00%	90,22%
5	Balai PPMHKP Denpasar	72%	98,89%	96,67%	75,00%	90,19%
6	Balai PPMHKP Entikong	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
7	Balai PPMHKP Jakarta	72%	90,23%	89,38%	91,06%	90,22%
8	Balai PPMHKP Jayapura	72%	70,00%	90,83%	62,50%	74,44%
9	Balai PPMHKP Lampung	72%	98,34%	90,00%	75,00%	87,78%
10	Balai PPMHKP Makassar	72%	93,75%	90,56%	80,00%	88,10%
11	Balai PPMHKP Manado	72%	88,55%	84,92%	75,00%	82,82%
12	Balai PPMHKP Mataram	72%	93,62%	90,65%	75,00%	86,42%
13	Balai PPMHKP Medan I	72%	93,70%	91,06%	75,00%	86,59%
14	Balai PPMHKP Semarang	72%	93,89%	91,53%	75,00%	86,81%
15	Balai PPMHKP Surabaya II	72%	95,42%	89,76%	62,50%	82,56%
16	Balai PPMHKP Tanjungpinang	72%	91,39%	90,27%	75,00%	85,55%
17	Balai PPMHKP Tarakan	72%	93,74%	89,29%	75,00%	86,01%
18	Stasiun PPMHKP Aceh	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
19	Stasiun PPMHKP Bandung	72%	87,24%	78,90%	75,00%	80,38%
20	Stasiun PPMHKP Batam	72%	85,74%	84,62%	62,50%	77,62%
21	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
22	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72%	90,89%	70,33%	87,50%	82,91%
23	Stasiun PPMHKP Bima	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
24	Stasiun PPMHKP Cirebon	72%	98,34%	90,00%	87,50%	91,95%
25	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72%	73,89%	76,11%	87,50%	79,17%
26	Stasiun PPMHKP Jambi	72%	68,33%	86,35%	75,00%	76,56%
27	Stasiun PPMHKP Kendari	72%	99,17%	100,00%	62,50%	87,22%
28	Stasiun PPMHKP Kupang	72%	90,88%	89,77%	75,00%	85,22%
29	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72%	77,78%	93,89%	75,00%	82,22%
30	Stasiun PPMHKP Mamuju	72%	66,68%	66,68%	75,00%	69,45%
31	Stasiun PPMHKP Medan II	72%	91,93%	90,14%	75,00%	85,69%
32	Stasiun PPMHKP Merak	72%	73,82%	73,82%	62,50%	70,05%
33	Stasiun PPMHKP Merauke	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
34	Stasiun PPMHKP Padang	72%	54,43%	76,65%	75,00%	68,69%
35	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72%	54,43%	73,87%	75,00%	67,77%

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
36	Stasiun PPMHKP Palembang	72%	77,78%	97,22%	78,97%	84,66%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72%	65,56%	81,53%	62,50%	69,86%
38	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72%	97,78%	97,22%	62,50%	85,83%
39	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72%	92,22%	92,78%	62,50%	82,50%
40	Stasiun PPMHKP Pontianak	72%	67,78%	80,00%	62,50%	70,09%
41	Stasiun PPMHKP Sorong	72%	77,78%	90,00%	62,50%	76,76%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72%	54,43%	54,43%	62,50%	57,12%
43	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	100,00%	94,72%	62,50%	85,74%
44	Stasiun PPMHKP Ternate	72%	74,45%	93,89%	75,00%	81,11%
45	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72%	100,00%	77,78%	75,00%	84,26%

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.2590/BPPMHKP.4/RC.610/VII/2026 14 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Revisi Data Capaian Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen Triwulan II
Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Merujuk Perubahan Surat terdahulu Nomor 2537/BPPMHKP.4/RC-610/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen Triwulan II Tahun 2026. Dengan ini kami sampaikan data perubahan nilai pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen untuk digunakan sebagai data pengukuran IKU UPT, yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



Ditandatangani
Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Tembusan:

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran

Nomor : B.2590/BPPMHKP.4/RC.610/VII/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT BPPMHKP

1. Kepala Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya
2. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I
3. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang
4. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung
5. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta
6. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang
7. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II
8. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong
9. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan
10. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru
11. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan
12. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar
13. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram
14. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
15. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
16. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon
17. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura
18. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh

19. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II
20. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan
21. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
22. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
23. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
24. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang
25. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu
26. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
27. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam
28. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
29. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung
30. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon
31. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
32. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak
33. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya
34. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
35. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
36. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju
37. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
38. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai
39. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari

40. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau
41. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
42. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
43. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate
44. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong
45. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Catur Sarwanto

**PERUBAHAN NILAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR
PASCAPANEN TRIWULAN II TAHUN 2026**

No	UPT	Target	TE SKP	TE HACCP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72%	86,95	93,62	87,50	89,36
2	Balai PPMHKP Ambon	72%	85,93	94,26	75,00	85,06
3	Balai PPMHKP Balikpapan	72%	88,22	90,83	75,00	84,68
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	72%	95,74	97,50	86,70	93,31
5	Balai PPMHKP Denpasar	72%	91,42	86,42	75,00	84,28
6	Balai PPMHKP Entikong	72%	94,44	75,00	75,00	81,48
7	Balai PPMHKP Jakarta	72%	92,39	94,36	87,80	91,52
8	Balai PPMHKP Jayapura	72%	96,39	77,78	62,50	78,89
9	Balai PPMHKP Lampung	72%	83,34	91,67	75,00	83,34
10	Balai PPMHKP Makassar	72%	96,44	95,78	87,50	93,24
11	Balai PPMHKP Manado	72%	89,29	91,24	62,50	81,01
12	Balai PPMHKP Mataram	72%	98,34	98,34	75,00	90,56
13	Balai PPMHKP Medan I	72%	92,28	93,24	62,50	82,67
14	Balai PPMHKP Semarang	72%	90,25	93,34	87,50	90,36
15	Balai PPMHKP Surabaya II	72%	86,61	88,22	87,50	87,44
16	Balai PPMHKP Tanjungpinang	72%	97,22	95,00	75,00	89,07
17	Balai PPMHKP Tarakan	72%	89,22	70,00	75,00	78,07
18	Stasiun PPMHKP Aceh	72%	97,00	77,78	87,50	87,43
19	Stasiun PPMHKP Bandung	72%	88,15	90,93	87,50	88,86
20	Stasiun PPMHKP Batam	72%	77,78	98,34	62,50	79,54
21	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	72%	75,54	54,43	75,00	68,32
22	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72%	88,89	93,89	87,50	90,09
23	Stasiun PPMHKP Bima	72%	68,33	68,33	75,00	70,55
24	Stasiun PPMHKP Cirebon	72%	92,22	98,34	87,50	92,69
25	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72%	89,77	70,33	75,00	78,37
26	Stasiun PPMHKP Jambi	72%	95,56	77,78	75,00	82,78
27	Stasiun PPMHKP Kendari	72%	74,08	65,18	75,00	71,42
28	Stasiun PPMHKP Kupang	72%	89,54	93,96	62,50	82,00
29	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72%	86,86	66,68	75,00	76,18
30	Stasiun PPMHKP Mamuju	72%	77,78	77,78	87,50	81,02
31	Stasiun PPMHKP Medan II	72%	97,00	94,31	75,00	88,77
32	Stasiun PPMHKP Merak	72%	82,22	90,00	75,00	82,41
33	Stasiun PPMHKP Merauke	72%	54,43	54,43	62,50	57,12
34	Stasiun PPMHKP Padang	72%	88,38	88,10	62,50	79,66
35	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72%	77,78	77,78	75,00	76,85
36	Stasiun PPMHKP Palembang	72%	86,12	87,24	82,50	85,29
37	Stasiun PPMHKP Palu	72%	76,67	65,56	62,50	68,24
38	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72%	97,22	96,67	62,50	85,46
39	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72%	96,11	77,78	62,50	78,80
40	Stasiun PPMHKP Pontianak	72%	95,93	77,78	75,00	82,90
41	Stasiun PPMHKP Sorong	72%	86,11	91,11	75,00	84,07
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72%	54,43	54,43	75,00	61,29
43	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	93,67	93,33	75,00	87,33
44	Stasiun PPMHKP Ternate	72%	96,11	98,34	87,50	93,98
45	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72%	98,33	97,50	95,00	96,94

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Catur Sarwanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.2590/BPPMHKP.4/RC.610/VII/2026 14 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Revisi Data Capaian Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen Triwulan II
Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Merujuk Perubahan Surat terdahulu Nomor 2537/BPPMHKP.4/RC-610/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen Triwulan II Tahun 2026. Dengan ini kami sampaikan data perubahan nilai pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen untuk digunakan sebagai data pengukuran IKU UPT, yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



Ditandatangani
Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Tembusan:

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran

Nomor : B.2590/BPPMHKP.4/RC.610/VII/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT BPPMHKP

1. Kepala Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya
2. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I
3. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang
4. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung
5. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta
6. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang
7. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II
8. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong
9. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan
10. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru
11. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan
12. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar
13. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram
14. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
15. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
16. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon
17. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura
18. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh

19. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II
20. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan
21. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
22. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
23. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
24. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang
25. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu
26. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
27. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam
28. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
29. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung
30. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon
31. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
32. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak
33. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya
34. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
35. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
36. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju
37. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
38. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai
39. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari

40. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau
41. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
42. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
43. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate
44. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong
45. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Catur Sarwanto

**PERUBAHAN NILAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR
PASCAPANEN TRIWULAN II TAHUN 2026**

No	UPT	Target	TE SKP	TE HACCP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72%	86,95	93,62	87,50	89,36
2	Balai PPMHKP Ambon	72%	85,93	94,26	75,00	85,06
3	Balai PPMHKP Balikpapan	72%	88,22	90,83	75,00	84,68
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	72%	95,74	97,50	86,70	93,31
5	Balai PPMHKP Denpasar	72%	91,42	86,42	75,00	84,28
6	Balai PPMHKP Entikong	72%	94,44	75,00	75,00	81,48
7	Balai PPMHKP Jakarta	72%	92,39	94,36	87,80	91,52
8	Balai PPMHKP Jayapura	72%	96,39	77,78	62,50	78,89
9	Balai PPMHKP Lampung	72%	83,34	91,67	75,00	83,34
10	Balai PPMHKP Makassar	72%	96,44	95,78	87,50	93,24
11	Balai PPMHKP Manado	72%	89,29	91,24	62,50	81,01
12	Balai PPMHKP Mataram	72%	98,34	98,34	75,00	90,56
13	Balai PPMHKP Medan I	72%	92,28	93,24	62,50	82,67
14	Balai PPMHKP Semarang	72%	90,25	93,34	87,50	90,36
15	Balai PPMHKP Surabaya II	72%	86,61	88,22	87,50	87,44
16	Balai PPMHKP Tanjungpinang	72%	97,22	95,00	75,00	89,07
17	Balai PPMHKP Tarakan	72%	89,22	70,00	75,00	78,07
18	Stasiun PPMHKP Aceh	72%	97,00	77,78	87,50	87,43
19	Stasiun PPMHKP Bandung	72%	88,15	90,93	87,50	88,86
20	Stasiun PPMHKP Batam	72%	77,78	98,34	62,50	79,54
21	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	72%	75,54	54,43	75,00	68,32
22	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72%	88,89	93,89	87,50	90,09
23	Stasiun PPMHKP Bima	72%	68,33	68,33	75,00	70,55
24	Stasiun PPMHKP Cirebon	72%	92,22	98,34	87,50	92,69
25	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72%	89,77	70,33	75,00	78,37
26	Stasiun PPMHKP Jambi	72%	95,56	77,78	75,00	82,78
27	Stasiun PPMHKP Kendari	72%	74,08	65,18	75,00	71,42
28	Stasiun PPMHKP Kupang	72%	89,54	93,96	62,50	82,00
29	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72%	86,86	66,68	75,00	76,18
30	Stasiun PPMHKP Mamuju	72%	77,78	77,78	87,50	81,02
31	Stasiun PPMHKP Medan II	72%	97,00	94,31	75,00	88,77
32	Stasiun PPMHKP Merak	72%	82,22	90,00	75,00	82,41
33	Stasiun PPMHKP Merauke	72%	54,43	54,43	62,50	57,12
34	Stasiun PPMHKP Padang	72%	88,38	88,10	62,50	79,66
35	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72%	77,78	77,78	75,00	76,85
36	Stasiun PPMHKP Palembang	72%	86,12	87,24	82,50	85,29
37	Stasiun PPMHKP Palu	72%	76,67	65,56	62,50	68,24
38	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72%	97,22	96,67	62,50	85,46
39	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72%	96,11	77,78	62,50	78,80
40	Stasiun PPMHKP Pontianak	72%	95,93	77,78	75,00	82,90
41	Stasiun PPMHKP Sorong	72%	86,11	91,11	75,00	84,07
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72%	54,43	54,43	75,00	61,29
43	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	93,67	93,33	75,00	87,33
44	Stasiun PPMHKP Ternate	72%	96,11	98,34	87,50	93,98
45	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72%	98,33	97,50	95,00	96,94

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Catur Sarwanto

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM SURABAYA I
 TRIWULAN II TAHUN 2026

Nama Kegiatan	Sasaran	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Kinerja Kegiatan (IKK)	Indikator	:	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm I	Q3	Q4	Sm II	Tahunan		
Target (%)			71			71	71		71
Realisasi			85.43						
% Capaian			120.32						

A. Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI

A.1 Monitoring Perairan Laut

Kegiatan yang telah dilakukan adalah :

- a. Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran marine biotoksin dan/atau bahan kimia berbahaya di perairan.
- b. Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran marine biotoksin dan/atau bahan kimia berbahaya lokasi perairan. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 83,33%.
- c. Nilai pengawasan mutu perairan secara keseluruhan

A.2 Monitoring Perairan Darat

Isu utama yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan ini adalah belum adanya pengawasan mutu wilayah perairan darat sebagai sumber produksi perikanan di Indonesia khususnya sektor budidaya, tekanan lingkungan akibat aktivitas manusia seperti pencemaran limbah, penggunaan bahan kimia yang tidak bijak di sekitar lokasi yang berpotensi menjadi residu, serta perubahan ekosistem perairan semakin meningkatkan potensi cemaran di perairan darat, sehingga menuntut pengawasan yang lebih komprehensif dan adaptif. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh skor jumlah pengujian (B1) = 3 dari skor maksimal (B2) = 3, sehingga diperoleh Nilai A = 100 dan Nilai B = 100. Dengan demikian, diperoleh nilai pengawasan (X) = 100%, yang menunjukkan bahwa mutu dan keamanan hasil perikanan serta kualitas lingkungan perairan di lokasi monitoring memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dapat Disimpulkan Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI sebesar $(83.3+100)/2 = 91.56\%$

B. Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen

Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah Rldiperoleh dengan menghitung angka nilai jaminan mutu dengan di kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan dengan nilai baik sesuai juknis KEPBPPMHKP No. 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat bahwa Bobot Penilaian Jaminan MutuSarana prasarana 60%, pengujian produk 40%. Dengan klasifikasi: Sangat Baik ($\geq 85\%$), Baik ($>70-85\%$), Cukup ($>50-70\%$), Kurang ($\leq 50\%$).

Adapun selama Tri Wulan II Angka Nilai Jaminan Mutu di Kabupaten Sidoarjo didapatkan nilai sebesar 79.30%

- A. Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI :
91.56%

B. Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI : **79.30%**

CARA PENGUKURAN

$$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

- X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I
- A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI
- B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI

Nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya pada Tri Wulan II Tahun 2026 sebesar : **85.43%**

$$x = \frac{A+B}{2}$$

➡

$$x = \frac{91.56+79.30}{2} \times 100\%$$
$$= \frac{170.86}{2} = \mathbf{85.43\%}$$

Penanggungjawab IKU



Eny Susilowati

IP ASN 2026												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ Tahun 2026												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	80	22.62	90.48 %	28.33	70.82 %	25.62	85.4 %	5	100 %	81.58	TINGGI
2	PUSAT MANAJEMEN MUTU	32	23.12	92.48 %	30.16	75.4 %	25.31	84.37 %	5	100 %	83.59	TINGGI
3	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	32	22.97	91.88 %	32.03	80.08 %	25.94	86.47 %	5	100 %	85.94	TINGGI
4	PUSAT MUTU PASCAPANEN	35	22.43	89.72 %	30.51	76.28 %	25.86	86.2 %	5	100 %	83.8	TINGGI
5	BPPMHKP MAKASSAR	52	22.79	91.16 %	33.08	82.7 %	25.19	83.97 %	5	100 %	86.06	TINGGI
6	BPPMHKP DENPASAR	33	23.16	92.72 %	29.89	74.72 %	25.3	84.33 %	5	100 %	83.37	TINGGI
7	BPPMHKP SURABAYA I	60	22.67	90.68 %	29.59	73.98 %	25.08	83.6 %	5	100 %	82.34	TINGGI
8	BPPMHKP MEDAN I	28	22.5	90 %	30.78	76.97 %	25	83.33 %	5	100 %	83.28	TINGGI
9	BPPMHKP BALIKPAPAN	28	22.14	88.56 %	31.81	79.53 %	25.18	83.93 %	5	100 %	84.13	TINGGI
10	BPPMHKP JAYAPURA	16	22.5	90 %	29.42	73.55 %	25.31	84.37 %	5	100 %	82.23	TINGGI
11	BALAI KIPM JAKARTA II	60	22.08	88.32 %	26.77	66.92 %	25.17	83.9 %	5	100 %	79.02	SEDANG
12	BPPMHKP SURABAYA II	49	23.37	93.48 %	32.07	80.17 %	25.2	84 %	5	100 %	85.64	TINGGI
13	BPPMHKP MATARAM	28	23.39	93.56 %	29.45	73.63 %	26.07	86.9 %	5	100 %	83.91	TINGGI
14	BPPMHKP MANADO	28	22.68	90.72 %	28.82	72.05 %	26.43	88.1 %	4.86	97.2 %	82.79	TINGGI

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA BALAI BESAR PPMHKPSURABAYA I
SEMESTER I TAHUN 2026
(PER TGL 10 JULI 2026)

No	Nama	Tipe Jabatan	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		Total IP	Keterangan
			Tingkat Pendidikan	IP	Bobot Dasar Kinerja	Struktural	Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukdis	IP		
1	RINA IMA SASMITA	JFU	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
2	HABIBIE NUR SYAM	JFU	D-III	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
3	RETNO PALUPI NINGTYAS	JFU	D-III	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
4	OKTARINA SURFIANTI	JFT	S-2	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
5	MAHFUDIN	JFT	S-2	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
6	FAJAR KURNIAWAN	JFT	D-III	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
7	SRI SUHARTINI	JFU	S-1	25	20	-	-	10	4.5	34.5	BAIK	25	0	5	89,5	TINGGI
8	IMAM SABEKTI	JFT	D-III	25	20	-	10	-	4.5	34.5	BAIK	25	0	5	89,5	TINGGI
9	WAHYU JATMIKO PURWONO	JFT	D-III	25	20	-	10	-	4	34	BAIK	25	0	5	89	TINGGI
10	GALIH BAYU WIDYA LAKSANA	JFT	D-III	25	20	-	10	-	2.25	32.25	BAIK	25	0	5	87,25	TINGGI
11	RATNA DEWI	JFT	D-III	25	20	-	10	-	2.25	32.25	BAIK	25	0	5	87,25	TINGGI
12	SRI ANGGORO	Struktural	S-2	25	25	-	-	-	1.5	26.5	SANGAT BAIK	30	0	5	86,5	TINGGI
13	SUSANTO ADI SAPUTRO	JFT	D-III	25	20	-	10	-	0.75	30.75	BAIK	25	0	5	85,75	TINGGI
14	DIDIK SRINOTO	Struktural	S-2	25	20	10	-	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
15	RIA RATNASARI	JFU	D-III	25	20	-	-	10	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
16	DEVY RAHMAWATI PUTRI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
17	LAODE ABDUL SYAFAR WAHDIN HUSAIN	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
18	KRISTINA NATALIA	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI

No	Nama	Tipe Jabatan	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		Total IP	Keterangan
			Tingkat Pendidikan	IP	Bobot Dasar Kinerja	Struktural	Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukdis	IP		
19	RACHMAT NOERSOELISTYOADI	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
20	YUSTINA NOVIANTI	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
21	HENDRA PRASETYA	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
22	PUJI SUGENG ARIADI	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
23	HARDIYANA BAHARUDDIN	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
24	AYUDA DYAH NUREKAWATI	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
25	RUNTUT RAHAJENG DWI SUSANTI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
26	SUSWANTO	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
27	EKA ANIS RHOFITA	JFT	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
28	ENY SUSILOWATI	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
29	KURNIA CATUR PRATIWI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
30	ROSMAWATI RAHAYU	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
31	INDRA YUSTINA AYU PUTRI	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
32	FENI HARTIPAH	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
33	ARIS JATMIKO	JFT	S-1	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
34	ADI ARTI	JFT	D-II/D-I/SMA	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
35	ARIF DWI KURNIAWAN	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
36	HILALIATUL AINI	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
37	YENNY TRISNASARI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	4	34	BAIK	25	0	5	84	TINGGI
38	BUDHI PRIHANTA	JFT	S-1	20	20	-	10	-	4	34	BAIK	25	0	5	84	TINGGI
39	ISRINTANI TRIPANGESTUTI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	3.75	33.75	BAIK	25	0	5	83,75	TINGGI

No	Nama	Tipe Jabatan	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		Total IP	Keterangan
			Tingkat Pendidikan	IP	Bobot Dasar Kinerja	Struktural	Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukdis	IP		
40	AHMAD ARUM	JFT	S-1	20	20	-	10	-	3.25	33.25	BAIK	25	0	5	83,25	TINGGI
41	MEDYA PUTRA	JFT	S-1	20	20	-	10	-	0.75	30.75	BAIK	25	0	5	80,75	SEDANG
42	FARID MANGKU ALAM	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
43	AINUL DJAROD	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
44	DRAJAT HEXANTO WIRUTOMO	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
45	REDDY DWI PRADIPTA WARDHANA	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
46	RIRIN RIZQIYAH	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
47	EKO BHAKTI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
48	IIN WIDYA ASTUTI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
49	RACHMAD HIDAYAT	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
50	SUPRIYATIN	JFU	S-1	25	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	75	SEDANG
51	IRWAN JULIARTA	JFU	S-1	25	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	75	SEDANG
52	NURI HERDIAN PRATAMA	JFT	D-III	25	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	75	SEDANG
53	FARIS FIRMAN SAPUTRA	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
54	AMRUL HADIYONO	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
55	MUHAMMAD FERRY MAULUDI	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
56	KURNIYANTO	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
57	MOKH. ALI FAUZI	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
58	SUGIARTO	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
59	FAUZI	JFT	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
60	MOHAMMAD YUSUP	JFU	SMP/SD	10	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	60	SANGAT RENDAH

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I
TAHUN 2026**

Nama Indikator	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)
Nama Tim Kerja	Didik Srinoto
Periode Laporan	Semester 1 Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I
Nama Indikator Kinerja	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	-	-	82,5	-	-	82,5	82,5	-	82,50
Realisasi	-	-	82,34	-	-	-	-	-	-
% Capaian	-	-	99,8	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw 2, Tw 3 dan Tw 4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4 Q

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar PPMHKP Surabaya I belum optimal karena masih terdapat pegawai yang belum memenuhi aspek penilaian, seperti pengembangan kompetensi, dan pemutakhiran data kepegawaian.

Kondisi tersebut berpotensi belum maksimal pencapaian nilai Indeks Profesionalitas ASN, mempengaruhi penilaian kinerja organisasi, dan menghambat terwujudnya pengelolaan ASN yang profesional serta penerapan sistem merit secara optimal.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai, kurang disiplin dalam pemutakhiran data pelatihan, serta monitoring terhadap pemenuhan indikator Indeks Profesionalitas ASN yang belum berjalan secara konsisten.

Rekomendasi rencana aksi Semester berikutnya	Penanggung Jawab
1. Pemenuhan pengembangan kompetensi ASN	Kepala Bagian Tata Usaha
2. Monitoring dan evaluasi pencapaian Indeks Profesionalitas ASN	Kepala Bagian Tata Usaha

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi Semester sebelumnya	Penanggung Jawab
-	Kepala Bagian Tata Usaha

Sidoarjo, Juli 2026



Didik Srinoto, S.Pi, M.P
NIP.196906161989031004

IP ASN 2026												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ Tahun 2026												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	80	22.62	90.48 %	28.33	70.82 %	25.62	85.4 %	5	100 %	81.58	TINGGI
2	PUSAT MANAJEMEN MUTU	32	23.12	92.48 %	30.16	75.4 %	25.31	84.37 %	5	100 %	83.59	TINGGI
3	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	32	22.97	91.88 %	32.03	80.08 %	25.94	86.47 %	5	100 %	85.94	TINGGI
4	PUSAT MUTU PASCAPANEN	35	22.43	89.72 %	30.51	76.28 %	25.86	86.2 %	5	100 %	83.8	TINGGI
5	BPPMHKP MAKASSAR	52	22.79	91.16 %	33.08	82.7 %	25.19	83.97 %	5	100 %	86.06	TINGGI
6	BPPMHKP DENPASAR	33	23.16	92.72 %	29.89	74.72 %	25.3	84.33 %	5	100 %	83.37	TINGGI
7	BPPMHKP SURABAYA I	60	22.67	90.68 %	29.59	73.98 %	25.08	83.6 %	5	100 %	82.34	TINGGI
8	BPPMHKP MEDAN I	28	22.5	90 %	30.78	76.97 %	25	83.33 %	5	100 %	83.28	TINGGI
9	BPPMHKP BALIKPAPAN	28	22.14	88.56 %	31.81	79.53 %	25.18	83.93 %	5	100 %	84.13	TINGGI
10	BPPMHKP JAYAPURA	16	22.5	90 %	29.42	73.55 %	25.31	84.37 %	5	100 %	82.23	TINGGI
11	BALAI KIPM JAKARTA II	60	22.08	88.32 %	26.77	66.92 %	25.17	83.9 %	5	100 %	79.02	SEDANG
12	BPPMHKP SURABAYA II	49	23.37	93.48 %	32.07	80.17 %	25.2	84 %	5	100 %	85.64	TINGGI
13	BPPMHKP MATARAM	28	23.39	93.56 %	29.45	73.63 %	26.07	86.9 %	5	100 %	83.91	TINGGI
14	BPPMHKP MANADO	28	22.68	90.72 %	28.82	72.05 %	26.43	88.1 %	4.86	97.2 %	82.79	TINGGI

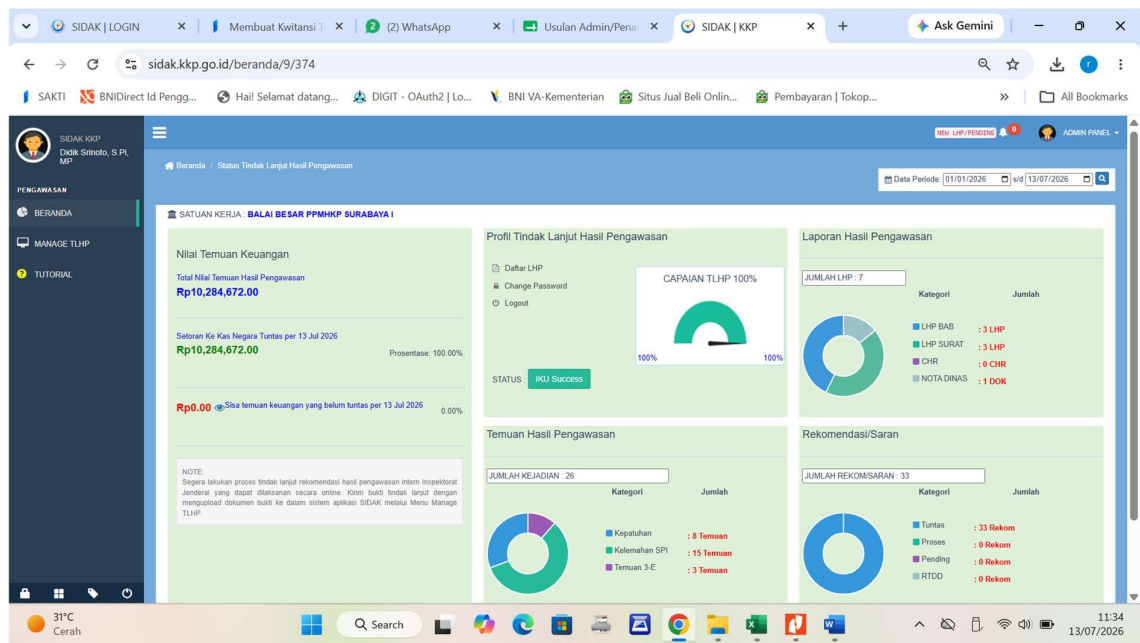
NILAI INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA BALAI BESAR PPMHKPSURABAYA I
SEMESTER I TAHUN 2026
(PER TGL 10 JULI 2026)

No	Nama	Tipe Jabatan	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		Total IP	Keterangan
			Tingkat Pendidikan	IP	Bobot Dasar Kinerja	Struktural	Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukdis	IP		
1	RINA IMA SASMITA	JFU	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
2	HABIBIE NUR SYAM	JFU	D-III	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
3	RETNO PALUPI NINGTYAS	JFU	D-III	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
4	OKTARINA SURFIANTI	JFT	S-2	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
5	MAHFUDIN	JFT	S-2	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
6	FAJAR KURNIAWAN	JFT	D-III	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
7	SRI SUHARTINI	JFU	S-1	25	20	-	-	10	4.5	34.5	BAIK	25	0	5	89,5	TINGGI
8	IMAM SABEKTI	JFT	D-III	25	20	-	10	-	4.5	34.5	BAIK	25	0	5	89,5	TINGGI
9	WAHYU JATMIKO PURWONO	JFT	D-III	25	20	-	10	-	4	34	BAIK	25	0	5	89	TINGGI
10	GALIH BAYU WIDYA LAKSANA	JFT	D-III	25	20	-	10	-	2.25	32.25	BAIK	25	0	5	87,25	TINGGI
11	RATNA DEWI	JFT	D-III	25	20	-	10	-	2.25	32.25	BAIK	25	0	5	87,25	TINGGI
12	SRI ANGGORO	Struktural	S-2	25	25	-	-	-	1.5	26.5	SANGAT BAIK	30	0	5	86,5	TINGGI
13	SUSANTO ADI SAPUTRO	JFT	D-III	25	20	-	10	-	0.75	30.75	BAIK	25	0	5	85,75	TINGGI
14	DIDIK SRINOTO	Struktural	S-2	25	20	10	-	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
15	RIA RATNASARI	JFU	D-III	25	20	-	-	10	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
16	DEVY RAHMAWATI PUTRI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
17	LAODE ABDUL SYAFAR WAHDIN HUSAIN	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
18	KRISTINA NATALIA	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI

No	Nama	Tipe Jabatan	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		Total IP	Keterangan
			Tingkat Pendidikan	IP	Bobot Dasar Kinerja	Struktural	Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukdis	IP		
19	RACHMAT NOERSOELISTYOADI	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
20	YUSTINA NOVIANTI	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
21	HENDRA PRASETYA	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
22	PUJI SUGENG ARIADI	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
23	HARDIYANA BAHARUDDIN	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
24	AYUDA DYAH NUREKAWATI	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
25	RUNTUT RAHAJENG DWI SUSANTI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
26	SUSWANTO	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
27	EKA ANIS RHOFITA	JFT	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
28	ENY SUSILOWATI	JFT	S-2	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
29	KURNIA CATUR PRATIWI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
30	ROSMAWATI RAHAYU	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
31	INDRA YUSTINA AYU PUTRI	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
32	FENI HARTIPAH	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
33	ARIS JATMIKO	JFT	S-1	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
34	ADI ARTI	JFT	D-II/D-I/SMA	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
35	ARIF DWI KURNIAWAN	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
36	HILALIATUL AINI	JFT	D-III	25	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
37	YENNY TRISNASARI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	4	34	BAIK	25	0	5	84	TINGGI
38	BUDHI PRIHANTA	JFT	S-1	20	20	-	10	-	4	34	BAIK	25	0	5	84	TINGGI
39	ISRINTANI TRIPANGESTUTI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	3.75	33.75	BAIK	25	0	5	83,75	TINGGI

No	Nama	Tipe Jabatan	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		Total IP	Keterangan
			Tingkat Pendidikan	IP	Bobot Dasar Kinerja	Struktural	Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukdis	IP		
40	AHMAD ARUM	JFT	S-1	20	20	-	10	-	3.25	33.25	BAIK	25	0	5	83,25	TINGGI
41	MEDYA PUTRA	JFT	S-1	20	20	-	10	-	0.75	30.75	BAIK	25	0	5	80,75	SEDANG
42	FARID MANGKU ALAM	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
43	AINUL DJAROD	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
44	DRAJAT HEXANTO WIRUTOMO	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
45	REDDY DWI PRADIPTA WARDHANA	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
46	RIRIN RIZQIYAH	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
47	EKO BHAKTI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
48	IIN WIDYA ASTUTI	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
49	RACHMAD HIDAYAT	JFT	S-1	20	20	-	10	-	-	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
50	SUPRIYATIN	JFU	S-1	25	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	75	SEDANG
51	IRWAN JULIARTA	JFU	S-1	25	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	75	SEDANG
52	NURI HERDIAN PRATAMA	JFT	D-III	25	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	75	SEDANG
53	FARIS FIRMAN SAPUTRA	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
54	AMRUL HADIYONO	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
55	MUHAMMAD FERRY MAULUDI	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
56	KURNIYANTO	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
57	MOKH. ALI FAUZI	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
58	SUGIARTO	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
59	FAUZI	JFT	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
60	MOHAMMAD YUSUP	JFU	SMP/SD	10	20	-	-	-	-	20	BAIK	25	0	5	60	SANGAT RENDAH

Laporan SIDAK Triwulan II Tahun 2026



The screenshot displays the 'Hasil Pengawasan' (Findings) page of the SIDAK KKP system. The left sidebar contains navigation links: PENGAWASAN, BERANDA, MANAGE TLHP, and TUTORIAL. The main content area is titled 'HOME / BADAN PPMHKP : BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I'. It features a summary of findings and a table of results:

Summary:

- Jumlah Laporan : 7 Dokumen
- Jumlah Temuan : 26 Temuan
- Jumlah Rekomendasi : 33
- Nilai Keuangan : Rp10,284,672
- Tuntas : 33 Rekomendasi
- Proses : 0 Rekomendasi
- Pending : 0 Rekomendasi
- Sisa Nilai Keuangan : Rp0

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
3314	BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I	Evaluasi	B.2310TJ.4HP.4305/2024	2024-08-17	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Balai PPMHKP Surabaya I	TUNTAS	Q Detail
3304	BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I	Evaluasi	T.210TJ.4HP.4705/2024	2024-09-10	Hasil Evaluasi PMPB TA 2023 dan TA 2024 pada Balai PPMHKP Surabaya I	TUNTAS	Q Detail
2101	BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I	Evaluasi	R. 2140TJ.4HP.4705/2022	2022-09-15	Hasil Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021-2022 pada Balai Karantina Rian, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I	TUNTAS	Q Detail
1404	BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I	Evaluasi	5093ITJHP.440VI/2021	2021-07-23	Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Balai Karantina Rian, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KPRM) Surabaya I Tahun 2021	TUNTAS	Q Detail
1391	BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I	Audit	5050ITJHP.120VI/2021	2021-07-06	Audit Kinerja pada BKPRM Surabaya I TA 2020-2021	TUNTAS	Q Detail
865	BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I	Pemantauan	16.3.1.ITJ.04HP.550R/2020	2020-03-16	Pemantauan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)Masyarakat Berkearifan Berbasis dan Meliputi (WBKM) pada Balai Karantina Rian dan Pengendalian Mutu (Balai KPRM) Surabaya I	TUNTAS	Q Detail
340	BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I	Evaluasi	5.40TJHP.6105/2019	2019-09-04	Hasil Uji Substansi Kegiatan Prioritas Tahun 2012-2019 di Provinsi Jawa Timur	TUNTAS	Q Detail

Showing 1 to 7 of 7 entries

The bottom of the page shows a Windows taskbar with the date 13/07/2026 and time 11:34.

**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I
TAHUN 2026**

Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I
Nama Timja	:	Didik Srinoto
Periode Laporan	:	Triwulan 2 Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	86	86	86	86	86	86	86	-	<u>86</u>
Realisasi	100	100	-	-	-	-	-	-	-
%Capaian	100	100	-	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw 2, Tw 3 dan Tw 4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4 Q

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

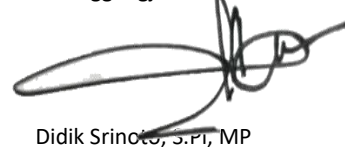
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai Besar PPMHKP Surabaya I berdasarkan LHP (baik bentuk LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPPMHKP menjadi objek pengawasan.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
-

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
1. Perlu perhitungan untuk menentukan target tahun berikutnya	Kabag Tata Usaha
2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran	Kabag Tata Usaha

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
-	Kabag Tata Usaha

Sidoarjo, Juli 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Didik Srinoto, S.Pi, MP
NIP. 19690616 198903 1 004

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal
2. Para Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
3. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
4. Para Sekretaris Badan lingkup KKP

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Lampiran : Satu Lembar

Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2026

Tanggal : 10 Juli 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan II Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Maret 2026 (Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan I Tahun 2026) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 Juni Tahun 2026 (Triwulan II Tahun 2026).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan II Tahun 2026 lingkup KKP sebesar 95,39% (tuntas 641 dari 672 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Febry Budianto

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
4. Para Kepala Badan lingkup KKP
5. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal KKP

Lampiran
 Nomor : 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026
 Tanggal : 10 Juli 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup KKP” Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Jenderal	43	43	100,00	0	0,00
2	Ditjen PK	115	105	91,30	10	8,70
3	Ditjen PRL	13	13	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	115	99	86,09	16	13,91
5	Ditjen PSDKP	89	89	100,00	0	0,00
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	170	165	97,06	5	2,94
7	BPPSDMKP	64	64	100,00	0	0,00
8	Ditjen PDSPKP	29	29	100,00	0	0,00
9	BPPMHKP	27	27	100,00	0	0,00
10	Inspektorat Jenderal	7	7	100,00	0	0,00
TOTAL		672	641	95,39	31	4,61



Ditandatangani
Secara Elektronik

Febry Budianto

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal
2. Para Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
3. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
4. Para Sekretaris Badan lingkup KKP

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Lampiran : Satu Lembar

Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2026

Tanggal : 10 Juli 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan II Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Maret 2026 (Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan I Tahun 2026) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 Juni Tahun 2026 (Triwulan II Tahun 2026).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan II Tahun 2026 lingkup KKP sebesar 95,39% (tuntas 641 dari 672 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Febry Budianto

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
4. Para Kepala Badan lingkup KKP
5. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal KKP

Lampiran
 Nomor : 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026
 Tanggal : 10 Juli 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup KKP” Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Jenderal	43	43	100,00	0	0,00
2	Ditjen PK	115	105	91,30	10	8,70
3	Ditjen PRL	13	13	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	115	99	86,09	16	13,91
5	Ditjen PSDKP	89	89	100,00	0	0,00
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	170	165	97,06	5	2,94
7	BPPSDMKP	64	64	100,00	0	0,00
8	Ditjen PDSPKP	29	29	100,00	0	0,00
9	BPPMHKP	27	27	100,00	0	0,00
10	Inspektorat Jenderal	7	7	100,00	0	0,00
TOTAL		672	641	95,39	31	4,61



Ditandatangani
Secara Elektronik

Febry Budianto



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	165	032	427542	BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00	94,47	97,24	97,44	0,00	0,00	100,00	98,72	100,00	100,00	78,66	80,00%	0,00	98,32
							10	15		20	0	0	10		25					
							10,00	14,17		19,49	0,00	0,00	10,00		25,00					

**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI
BESAR PPMHKP SURABAYA I
TAHUN 2026**

Nama Indikator	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I
Nama Timja	:	Didik Srinoto
Periode Laporan	:	Triwulan 2 Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I
Nama Indikator Kinerja	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	-	92,1
Realisasi	99,89	98,32	98,32	-	-	-	-	-	-
%Capaian	100	100	100	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Tw 1, Tw 2, Tw 3 dan Tw 4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memenuhi target yang telah ditetapkan

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Capaian nilai IKPA tidak tercapai jika terdapat nilai aspek utama yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Meningkatkan nilai Penyerapan Anggaran (Bobot 20%) dalam aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran guna meningkatkan nilai capaian IKPA di Triwulan III	Kabag Tata Usaha

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Capaian nilai Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output) sudah terlaksana sesuai rencana aksi	Kabag Tata Usaha

Sidoarjo, Juli 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Didik Srinoto
NIP. 196906161989031004



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	165	032	427542	BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00	94,47	97,24	97,44	0,00	0,00	100,00	98,72	100,00	100,00	78,66	80,00%	0,00	98,32
							10	15		20	0	0	10		25					
							10,00	14,17		19,49	0,00	0,00	10,00		25,00					

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1873/SJ.2/TU.210/VII/2026

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Umum
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026

Tanggal : 13 Juli 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 1820/SJ.1/RC.610/VII/2026 hal Penyampaian Peningkat Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Triwulan II Tahun 2026, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan II tahun 2026 berdasarkan aplikasi Myintress Kementerian Keuangan yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026 pukul 11.35 WIB.
2. Capaian IKU IKPA KKP Triwulan II tahun 2026 sebesar 87,85 dari target nilai 83.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Triwulan II tahun 2026 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart**, **Akuntabel**, **Integritas**, **Loyalitas**, dan **Sinergi** (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN KL

NO	Periode	Kode	Nama	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	99,03 10 9,90	68,76 15 10,31	83,90	67,08 20 13,42	100,00 10 10,00	99,91 10 9,99	96,80 10 9,68	90,95	98,19 25 24,55	98,19	87,85	100,00%	0,00	87,85



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN ESELON 1

NO	Periode	Kode	Nama	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	75,00 10 7,50	71,50 15 10,72	73,25	98,73 20 19,75	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,68	99,72 25 24,93	99,73	92,90	100,00%	0,00	92,90
2	06 Juni	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,56 20 19,91	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,07 10 9,81	99,41	100,00 25 25,00	100,00	99,72	100,00%	0,00	99,72
3	06 Juni	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	61,11 15 9,17	80,56	30,07 20 6,01	100,00 10 10,00	99,83 10 9,98	97,74 10 9,77	81,91	92,56 25 23,14	92,56	78,08	100,00%	0,00	78,08
4	06 Juni	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	61,30 15 9,20	80,65	66,02 20 13,20	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,49 10 9,95	91,38	99,16 25 24,79	99,16	87,14	100,00%	0,00	87,14
5	06 Juni	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,75 15 13,01	93,38	93,40 20 18,68	100,00 10 10,00	99,58 10 9,96	94,42 10 9,44	96,85	99,06 25 24,76	99,06	95,86	100,00%	0,00	95,86
6	06 Juni	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	78,17 20 15,63	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,54	100,00 25 25,00	100,00	95,63	100,00%	0,00	95,63
7	06 Juni	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	26,13 15 3,92	63,07	35,88 20 7,18	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,39 10 9,44	82,57	100,00 25 25,00	100,00	75,53	100,00%	0,00	75,53
8	06 Juni	03208	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	63,94 15 9,59	56,97	88,55 20 17,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,14	100,00 25 25,00	100,00	87,30	100,00%	0,00	87,30
9	06 Juni	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	98,75 10 9,88	89,39 15 13,41	94,07	96,23 20 19,25	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,74 10 9,57	97,99	99,25 25 24,81	99,25	96,92	100,00%	0,00	96,92
10	06 Juni	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,67 15 10,30	84,34	73,19 20 14,64	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,96 10 9,70	92,54	97,43 25 24,36	97,43	88,99	100,00%	0,00	88,99



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
2	06 Juni	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
3	06 Juni	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
4	06 Juni	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	78,02 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	70,00	70,00%	0,00	100,00
5	06 Juni	024	032	649732	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN CIREBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	80,00	80,00%	0,00	100,00
6	06 Juni	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
7	06 Juni	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN) KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
8	06 Juni	014	032	567481	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
9	06 Juni	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
10	06 Juni	038	032	567758	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MATARAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,92 10 9,99	99,96	100,00 25 25,00	100,00	79,99	80,00%	0,00	99,99
11	06 Juni	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,86 20 19,97	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,97	100,00 25 25,00	100,00	99,97	100,00%	0,00	99,97
12	06 Juni	012	032	649636	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,79 10 9,98	99,90	100,00 25 25,00	100,00	79,98	80,00%	0,00	99,97
13	06 Juni	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,67 10 9,97	99,83	100,00 25 25,00	100,00	79,97	80,00%	0,00	99,96
14	06 Juni	017	032	649615	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,69 10 9,97	99,85	100,00 25 25,00	100,00	79,97	80,00%	0,00	99,96
15	06 Juni	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,96 10 10,00	99,98	99,86 25 24,96	99,86	79,96	80,00%	0,00	99,95
16	06 Juni	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,68 20 19,94	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,92	100,00 25 25,00	100,00	99,94	100,00%	0,00	99,94



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
17	06 Juni	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,65 20 19,93	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,91	100,00 25 25,00	100,00	99,93	100,00%	0,00	99,93
18	06 Juni	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,65 20 19,93	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,83	100,00 25 25,00	100,00	79,93	80,00%	0,00	99,91
19	06 Juni	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,51 20 19,90	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,88	100,00 25 25,00	100,00	99,90	100,00%	0,00	99,90
20	06 Juni	030	032	649725	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,11 10 9,91	99,55	100,00 25 25,00	100,00	79,91	80,00%	0,00	99,89
21	06 Juni	053	032	649771	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00	99,65 25 24,91	99,65	79,91	80,00%	0,00	99,89
22	06 Juni	037	032	427624	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,42 20 19,88	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,86	100,00 25 25,00	100,00	99,88	100,00%	0,00	99,88
23	06 Juni	123	032	649684	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN II	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,43 20 19,89	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,72	100,00 25 25,00	100,00	79,89	80,00%	0,00	99,86



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
24	06 Juni	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,59 20 19,92	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,23 10 9,82	99,45	100,00 25 25,00	100,00	99,74	100,00%	0,00	99,74
25	06 Juni	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,56 20 19,91	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,07 10 9,81	99,41	100,00 25 25,00	100,00	99,72	100,00%	0,00	99,72
26	06 Juni	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,25 10 9,72	99,31	100,00 25 25,00	100,00	99,72	100,00%	0,00	99,72
27	06 Juni	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,57 20 19,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,64	100,00 25 25,00	100,00	99,71	100,00%	0,00	99,71
28	06 Juni	062	032	649767	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERNATE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,60 20 19,92	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,75 10 9,78	99,34	100,00 25 25,00	100,00	99,70	100,00%	0,00	99,70
29	06 Juni	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,36 20 19,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,59	100,00 25 25,00	100,00	99,67	100,00%	0,00	99,67
30	06 Juni	045	032	649593	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,34 20 19,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,59	99,97 25 24,99	99,97	99,66	100,00%	0,00	99,66
31	06 Juni	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,72 20 19,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,13 10 9,91	99,46	100,00 25 25,00	100,00	99,66	100,00%	0,00	99,66
32	06 Juni	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,11 20 19,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,53	100,00 25 25,00	100,00	99,62	100,00%	0,00	99,62



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
33	06 Juni	103	032	649792	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,85 20 19,77	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,24 10 9,92	99,05	100,00 25 25,00	100,00	79,69	80,00%	0,00	99,62
34	06 Juni	015	032	649699	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,70 20 19,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,72 10 9,87	99,36	100,00 25 25,00	100,00	99,61	100,00%	0,00	99,61
35	06 Juni	047	032	567610	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,71 20 19,94	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	97,31 10 9,73	98,51	100,00 25 25,00	100,00	79,67	80,00%	0,00	99,59
36	06 Juni	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,64 20 19,93	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,57 10 9,56	98,80	100,00 25 25,00	100,00	99,49	100,00%	0,00	99,49
37	06 Juni	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,97 20 19,79	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,74	98,57 25 24,64	98,57	99,44	100,00%	0,00	99,44
38	06 Juni	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,77 20 19,75	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	97,97 10 9,80	98,37	100,00 25 25,00	100,00	79,55	80,00%	0,00	99,44
39	06 Juni	001	032	649589	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,79 20 19,96	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	95,80 10 9,58	97,80	100,00 25 25,00	100,00	79,54	80,00%	0,00	99,42



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
40	06 Juni	050	032	649678	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN GORONTALO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,69 20 19,74	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	97,83 10 9,78	98,26	100,00 25 25,00	100,00	79,52	80,00%	0,00	99,40
41	06 Juni	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	96,82 20 19,36	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,21	100,00 25 25,00	100,00	99,36	100,00%	0,00	99,36
42	06 Juni	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,92 20 19,18	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,98	100,00 25 25,00	100,00	99,18	100,00%	0,00	99,18
43	06 Juni	134	032	649661	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,24 20 19,65	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,30 10 9,53	98,39	100,00 25 25,00	100,00	99,18	100,00%	0,00	99,18
44	06 Juni	039	032	649551	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	92,93 10 9,29	96,46	100,00 25 25,00	100,00	79,29	80,00%	0,00	99,12
45	06 Juni	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,89 20 19,98	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,15 10 9,61	99,01	98,10 25 24,52	98,10	99,12	100,00%	0,00	99,12
46	06 Juni	123	032	427567	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN I	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,22 20 19,44	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,21 10 9,82	97,72	100,00 25 25,00	100,00	79,27	80,00%	0,00	99,08
47	06 Juni	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	96,44 20 19,29	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,78 10 9,98	98,11	100,00 25 25,00	100,00	79,27	80,00%	0,00	99,08



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
48	06 Juni	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,33 20 19,07	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,83	100,00 25 25,00	100,00	99,07	100,00%	0,00	99,07
49	06 Juni	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,07 20 19,01	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,94 10 9,99	98,75	100,00 25 25,00	100,00	99,01	100,00%	0,00	99,01
50	06 Juni	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	96,22 20 19,24	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,60 10 9,76	98,45	100,00 25 25,00	100,00	99,00	100,00%	0,00	99,00
51	06 Juni	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,90 20 19,58	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,17 10 9,32	97,77	100,00 25 25,00	100,00	98,90	100,00%	0,00	98,90
52	06 Juni	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,90 20 19,78	100,00 10 10,00	95,24 10 9,52	95,81 10 9,58	97,49	100,00 25 25,00	100,00	98,88	100,00%	0,00	98,88
53	06 Juni	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,34 20 19,07	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,14 10 9,81	98,37	100,00 25 25,00	100,00	98,88	100,00%	0,00	98,88
54	06 Juni	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,98 20 19,60	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	92,40 10 9,24	97,60	100,00 25 25,00	100,00	98,84	100,00%	0,00	98,84
55	06 Juni	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,63 20 19,93	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	88,25 10 8,82	96,97	100,00 25 25,00	100,00	98,75	100,00%	0,00	98,75
56	06 Juni	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,06 15 14,11	97,03	92,76 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	69,11	70,00%	0,00	98,73
57	06 Juni	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	93,46 20 18,69	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,37	100,00 25 25,00	100,00	98,69	100,00%	0,00	98,69



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
58	06 Juni	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,39 15 14,16	97,20	97,63 20 19,53	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,41	100,00 25 25,00	100,00	98,68	100,00%	0,00	98,68
59	06 Juni	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,88 15 13,93	96,44	98,68 20 19,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,67	100,00 25 25,00	100,00	98,67	100,00%	0,00	98,67
60	06 Juni	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,09 15 14,11	97,05	98,26 20 19,65	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,42	100,00 25 25,00	100,00	88,77	90,00%	0,00	98,63
61	06 Juni	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,85 15 14,23	97,43	96,95 20 19,39	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,24	100,00 25 25,00	100,00	98,62	100,00%	0,00	98,62
62	06 Juni	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,50 15 14,18	97,25	97,09 20 19,42	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,43 10 9,84	98,88	99,99 25 25,00	99,99	98,43	100,00%	0,00	98,43
63	06 Juni	066	032	649711	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,65 15 13,90	96,33	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,21 10 9,82	99,11	100,00 25 25,00	100,00	78,72	80,00%	0,00	98,40
64	06 Juni	165	032	427542	BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,47 15 14,17	97,24	97,44 20 19,49	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	98,72	100,00 25 25,00	100,00	78,66	80,00%	0,00	98,32
65	06 Juni	009	032	649640	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG PINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,66 15 13,90	96,33	98,00 20 19,60	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,73 10 9,97	99,24	100,00 25 25,00	100,00	88,47	90,00%	0,00	98,30



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
66	06 Juni	061	032	649750	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,65 15 14,20	97,33	97,19 20 19,44	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	98,60	100,00 25 25,00	100,00	78,64	80,00%	0,00	98,29
67	06 Juni	042	032	567538	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,36 15 14,15	97,18	98,10 20 19,62	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,49 10 9,85	98,30	100,00 25 25,00	100,00	78,62	80,00%	0,00	98,28
68	06 Juni	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,97 15 13,20	93,99	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,64 10 9,96	99,91	100,00 25 25,00	100,00	98,16	100,00%	0,00	98,16
69	06 Juni	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	91,78 20 18,36	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,83 10 9,78	97,40	100,00 25 25,00	100,00	98,14	100,00%	0,00	98,14
70	06 Juni	137	032	427649	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,51 15 13,88	96,26	99,07 20 19,81	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,04 10 9,80	98,55	100,00 25 25,00	100,00	78,49	80,00%	0,00	98,12
71	06 Juni	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,83 15 14,07	96,92	95,30 20 19,06	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,64 10 9,96	98,74	100,00 25 25,00	100,00	98,10	100,00%	0,00	98,10
72	06 Juni	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,27 20 19,85	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,67 10 9,97	99,74	93,00 25 23,25	93,00	98,07	100,00%	0,00	98,07
73	06 Juni	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,33 15 13,70	95,67	96,73 20 19,35	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,18	100,00 25 25,00	100,00	98,05	100,00%	0,00	98,05



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
74	06 Juni	076	032	649746	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI ASAHAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	92,08 20 18,42	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,91 10 9,99	96,00	100,00 25 25,00	100,00	78,41	80,00%	0,00	98,01
75	06 Juni	049	032	567631	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,03 20 19,41	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,66 10 9,67	96,85	96,89 25 24,22	96,89	78,30	80,00%	0,00	97,87
76	06 Juni	048	032	649572	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	98,63 10 9,86	99,54	92,85 25 23,21	92,85	88,07	90,00%	0,00	97,86
77	06 Juni	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	89,31 20 17,86	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,00 10 9,90	97,08	100,00 25 25,00	100,00	97,76	100,00%	0,00	97,76
78	06 Juni	043	032	649657	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALANGKARAYA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,46 15 14,02	96,73	98,40 20 19,68	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	94,92 10 9,49	96,66	100,00 25 25,00	100,00	78,19	80,00%	0,00	97,74
79	06 Juni	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	91,81 20 18,36	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,67 10 9,37	96,37	100,00 25 25,00	100,00	97,73	100,00%	0,00	97,73
80	06 Juni	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,58 15 13,89	96,29	96,92 20 19,38	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,72 10 9,87	97,82	100,00 25 25,00	100,00	78,14	80,00%	0,00	97,68
81	06 Juni	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	88,94 15 13,34	94,47	99,29 20 19,86	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,35 10 9,84	98,82	100,00 25 25,00	100,00	78,03	80,00%	0,00	97,54



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
82	06 Juni	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,62 15 14,04	96,81	92,71 20 18,54	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,59 10 9,96	98,08	100,00 25 25,00	100,00	97,54	100,00%	0,00	97,54
83	06 Juni	071	032	649814	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BIMA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	93,60 20 18,72	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	93,06 10 9,31	93,33	100,00 25 25,00	100,00	78,03	80,00%	0,00	97,53
84	06 Juni	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,32 15 13,70	95,66	97,54 20 19,51	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,39	96,96 25 24,24	96,96	97,45	100,00%	0,00	97,45
85	06 Juni	010	032	567432	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,98 15 13,80	95,99	96,66 20 19,33	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,13 10 9,81	97,40	99,61 25 24,90	99,61	77,84	80,00%	0,00	97,31
86	06 Juni	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,69 15 13,00	93,35	96,47 20 19,29	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,12	100,00 25 25,00	100,00	97,30	100,00%	0,00	97,30
87	06 Juni	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	93,67 20 18,73	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,40 10 9,94	98,27	93,87 25 23,47	93,87	97,14	100,00%	0,00	97,14
88	06 Juni	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,07 20 19,41	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	82,74 10 8,27	89,91	100,00 25 25,00	100,00	77,69	80,00%	0,00	97,11
89	06 Juni	060	032	567694	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,17 20 19,43	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,99 10 9,70	97,08	94,08 25 23,52	94,08	77,65	80,00%	0,00	97,07
90	06 Juni	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,66 15 14,05	96,83	89,75 20 17,95	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,44	100,00 25 25,00	100,00	97,00	100,00%	0,00	97,00



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
91	06 Juni	135	032	649788	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA II	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,30 15 12,95	93,15	98,28 20 19,66	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,14	100,00 25 25,00	100,00	77,60	80,00%	0,00	97,00
92	06 Juni	008	032	567453	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,45 15 12,97	93,23	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	89,42 10 8,94	97,36	100,00 25 25,00	100,00	96,91	100,00%	0,00	96,91
93	06 Juni	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	79,29 15 11,89	89,65	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	96,89	100,00%	0,00	96,89
94	06 Juni	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,29 15 14,14	97,15	91,58 20 18,32	98,67 10 9,87	100,00 10 10,00	94,07 10 9,41	96,08	100,00 25 25,00	100,00	96,73	100,00%	0,00	96,73
95	06 Juni	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	82,09 15 12,31	91,05	99,52 20 19,90	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,64 10 9,46	98,54	100,00 25 25,00	100,00	96,68	100,00%	0,00	96,68
96	06 Juni	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,82 15 13,17	93,91	99,18 20 19,84	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	86,17 10 8,62	96,34	100,00 25 25,00	100,00	96,63	100,00%	0,00	96,63
97	06 Juni	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,82 15 13,77	95,91	89,10 20 17,82	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,28	100,00 25 25,00	100,00	96,59	100,00%	0,00	96,59
98	06 Juni	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	90,84 15 13,63	95,42	98,22 20 19,64	100,00 10 10,00	92,31 10 9,23	97,53 10 9,75	97,01	96,81 25 24,20	96,82	96,46	100,00%	0,00	96,46
99	06 Juni	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	77,37 15 11,61	88,69	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,45 10 9,75	99,36	100,00 25 25,00	100,00	96,35	100,00%	0,00	96,35



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
100	06 Juni	051	032	649601	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00	88,85	94,43	99,37	0,00	0,00	88,26	93,82	99,84	99,84	76,99	80,00%	0,00	96,23
							10	15		20	0	0	10		25					
							10,00	13,33		19,87	0,00	0,00	8,83		24,96					



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
101	06 Juni	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,91 15 14,24	97,46	94,28 20 18,86	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	80,57 10 8,06	93,71	100,00 25 25,00	100,00	96,15	100,00%	0,00	96,15
102	06 Juni	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	85,90 20 17,18	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	92,79 10 9,28	92,90	100,00 25 25,00	100,00	86,46	90,00%	0,00	96,07
103	06 Juni	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,81 15 14,07	96,91	97,99 20 19,60	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	81,74 10 8,17	89,87	100,00 25 25,00	100,00	76,84	80,00%	0,00	96,05
104	06 Juni	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	75,00 15 11,25	87,50	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,92 10 9,79	99,48	100,00 25 25,00	100,00	96,04	100,00%	0,00	96,04
105	06 Juni	167	032	649568	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	84,23 15 12,63	92,12	96,18 20 19,24	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,62 10 9,86	97,40	100,00 25 25,00	100,00	76,73	80,00%	0,00	95,92
106	06 Juni	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	83,35 15 12,50	91,68	90,60 20 18,12	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,94 10 9,99	97,64	100,00 25 25,00	100,00	95,62	100,00%	0,00	95,62
107	06 Juni	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,38 15 13,41	94,69	85,55 20 17,11	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,39	100,00 25 25,00	100,00	95,52	100,00%	0,00	95,52
108	06 Juni	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	78,78 20 15,76	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,01 10 9,60	93,70	100,00 25 25,00	100,00	95,36	100,00%	0,00	95,36
109	06 Juni	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,81 15 13,77	95,91	85,67 20 17,13	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,42	97,52 25 24,38	97,52	95,28	100,00%	0,00	95,28



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
110	06 Juni	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	76,41 20 15,28	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,10	100,00 25 25,00	100,00	95,28	100,00%	0,00	95,28
111	06 Juni	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,84 15 13,48	94,92	88,33 20 17,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	88,91 10 8,89	94,31	100,00 25 25,00	100,00	95,03	100,00%	0,00	95,03
112	06 Juni	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,67 15 13,45	94,84	89,15 20 17,83	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	85,70 10 8,57	93,71	100,00 25 25,00	100,00	94,85	100,00%	0,00	94,85
113	06 Juni	016	032	649622	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	71,90 15 10,79	85,95	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	94,86 10 9,49	98,29	100,00 25 25,00	100,00	85,27	90,00%	0,00	94,75
114	06 Juni	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	75,36 15 11,30	87,68	99,59 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	66,30	70,00%	0,00	94,72
115	06 Juni	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	81,12 15 12,17	90,56	87,96 20 17,59	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,37 10 9,94	96,83	100,00 25 25,00	100,00	94,70	100,00%	0,00	94,70
116	06 Juni	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	80,95 15 12,14	90,48	88,08 20 17,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,76 10 9,78	96,46	100,00 25 25,00	100,00	94,53	100,00%	0,00	94,53
117	06 Juni	063	032	567812	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAYAPURA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,47 15 10,27	84,24	95,31 20 19,06	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,83	100,00 25 25,00	100,00	94,33	100,00%	0,00	94,33



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
118	06 Juni	178	032	645691	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAMUJU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	76,61 15 11,49	88,31	95,87 20 19,17	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,54 10 9,65	96,20	100,00 25 25,00	100,00	75,32	80,00%	0,00	94,15
119	06 Juni	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,52 15 14,18	97,26	77,49 20 15,50	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	99,73 10 9,97	92,41	100,00 25 25,00	100,00	84,65	90,00%	0,00	94,05
120	06 Juni	068	032	649704	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	88,37 15 13,26	94,19	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	79,60 10 7,96	89,80	93,36 25 23,34	93,36	74,55	80,00%	0,00	93,19
121	06 Juni	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,07 15 10,21	84,04	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	77,66 10 7,77	94,42	100,00 25 25,00	100,00	92,98	100,00%	0,00	92,98
122	06 Juni	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	65,54 20 13,11	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,45 10 9,95	91,25	98,87 25 24,72	98,87	92,77	100,00%	0,00	92,77
123	06 Juni	022	032	645693	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,43 15 13,86	96,22	94,52 20 18,90	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,28 10 9,93	96,90	83,98 25 20,99	83,98	73,69	80,00%	0,00	92,11
124	06 Juni	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	67,55 15 10,13	83,78	84,59 20 16,92	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,55 10 9,96	96,04	100,00 25 25,00	100,00	92,01	100,00%	0,00	92,01
125	06 Juni	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	82,62 15 12,39	91,31	72,35 20 14,47	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,09	100,00 25 25,00	100,00	91,86	100,00%	0,00	91,86
126	06 Juni	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	90,47 15 13,57	95,24	75,71 20 15,14	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,93	92,36 25 23,09	92,36	91,80	100,00%	0,00	91,80



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
127	06 Juni	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,92 15 13,79	95,96	68,95 20 13,79	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	92,24	95,74 25 23,93	95,74	91,51	100,00%	0,00	91,51
128	06 Juni	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	83,53 15 12,53	91,77	76,74 20 15,35	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	88,29 10 8,83	91,26	98,04 25 24,51	98,04	91,22	100,00%	0,00	91,22
129	06 Juni	083	032	649800	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	92,50 20 18,50	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	62,22 10 6,22	77,36	92,47 25 23,12	92,48	72,84	80,00%	0,00	91,05
130	06 Juni	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	69,81 15 10,47	84,91	80,72 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	80,72	100,00 25 25,00	100,00	45,47	50,00%	0,00	90,94
131	06 Juni	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	90,50 15 13,57	95,25	98,78 20 19,76	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	54,96 10 5,50	84,58	91,67 25 22,92	91,67	81,74	90,00%	0,00	90,83
132	06 Juni	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	83,42 15 12,51	66,71	93,09 20 18,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,78 10 9,68	97,47	100,00 25 25,00	100,00	90,81	100,00%	0,00	90,81
133	06 Juni	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,44 15 13,42	94,72	68,54 20 13,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	84,52 10 8,45	88,27	100,00 25 25,00	100,00	90,58	100,00%	0,00	90,58
134	06 Juni	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	70,65 15 10,60	60,33	99,38 20 19,88	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,85	100,00 25 25,00	100,00	90,47	100,00%	0,00	90,47
135	06 Juni	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,71 15 13,46	94,86	89,94 20 17,99	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	82,59 10 8,26	86,27	89,49 25 22,37	89,49	72,08	80,00%	0,00	90,10
136	06 Juni	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	66,72 15 10,01	83,36	57,92 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	57,92	98,70 25 24,68	98,71	44,68	50,00%	0,00	89,37



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
137	06 Juni	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	76,85 15 11,53	63,43	96,21 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	61,53	70,00%	0,00	87,90
138	06 Juni	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	73,06 15 10,96	86,53	62,65 20 12,53	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	91,38 10 9,14	88,51	100,00 25 25,00	100,00	87,63	100,00%	0,00	87,63
139	06 Juni	175	032	691706	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	63,94 15 9,59	56,97	88,55 20 17,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,14	100,00 25 25,00	100,00	87,30	100,00%	0,00	87,30
140	06 Juni	020	032	649688	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,04 15 10,21	84,02	83,95 20 16,79	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,56 10 9,66	90,26	88,72 25 22,18	88,72	68,83	80,00%	0,00	86,04
141	06 Juni	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	76,45 15 11,47	88,23	48,97 20 9,79	93,33 10 9,33	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	85,58	100,00 25 25,00	100,00	85,59	100,00%	0,00	85,59
142	06 Juni	175	032	691629	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	63,78 15 9,57	81,89	58,69 20 11,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	89,51 10 8,95	87,05	100,00 25 25,00	100,00	85,26	100,00%	0,00	85,26
143	06 Juni	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	74,25 15 11,14	87,13	45,61 20 9,12	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,14 10 9,81	85,94	100,00 25 25,00	100,00	85,07	100,00%	0,00	85,07
144	06 Juni	175	032	649682	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	72,87 15 10,93	86,44	96,89 20 19,38	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	86,53 10 8,65	91,71	76,19 25 19,05	76,19	68,01	80,00%	0,00	85,01



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
145	06 Juni	136	032	427598	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	66,41 15 9,96	83,21	47,43 20 9,49	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	92,69 10 9,27	85,03	95,59 25 23,90	95,59	82,61	100,00%	0,00	82,61
146	06 Juni	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,50 15 13,13	93,75	23,33 20 4,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,59 10 9,76	80,23	100,00 25 25,00	100,00	82,55	100,00%	0,00	82,55
147	06 Juni	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,28 15 12,94	93,14	22,74 20 4,55	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,32 10 9,53	79,52	100,00 25 25,00	100,00	82,02	100,00%	0,00	82,02
148	06 Juni	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	46,56 15 6,98	73,28	50,93 20 10,19	96,21 10 9,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	86,79	97,44 25 24,36	97,44	81,15	100,00%	0,00	81,15
149	06 Juni	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	59,51 15 8,93	79,76	38,47 20 7,69	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,95 10 9,39	83,10	100,00 25 25,00	100,00	81,02	100,00%	0,00	81,02
150	06 Juni	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	58,21 15 8,73	79,11	41,68 20 8,34	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,66 10 9,77	84,84	91,53 25 22,88	91,53	79,72	100,00%	0,00	79,72
151	06 Juni	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	72,07 15 10,81	86,04	18,11 20 3,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,73 10 9,87	79,21	100,00 25 25,00	100,00	79,31	100,00%	0,00	79,31
152	06 Juni	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	71,45 15 10,72	85,73	15,02 20 3,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,14 10 9,91	78,54	100,00 25 25,00	100,00	78,64	100,00%	0,00	78,64
153	06 Juni	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	81,30 15 12,20	90,65	5,40 20 1,08	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	76,35	100,00 25 25,00	100,00	78,28	100,00%	0,00	78,28



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
154	06 Juni	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	62,10 15 9,31	81,05	35,74 20 7,15	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	83,94	83,85 25 20,96	83,85	77,43	100,00%	0,00	77,43
155	06 Juni	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,46 15 10,27	84,23	34,86 20 6,97	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,24 10 9,62	82,77	64,03 25 16,01	64,03	72,87	100,00%	0,00	72,87
156	06 Juni	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	50,00	70,00%	0,00	71,43
157	06 Juni	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	21,75 15 3,26	60,88	23,05 20 4,61	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	82,28 10 8,23	76,33	100,00 25 25,00	100,00	71,10	100,00%	0,00	71,10
158	06 Juni	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	50,00 15 7,50	75,00	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	42,50	70,00%	0,00	60,71
159	06 Juni	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	33,33 15 5,00	66,67	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	40,00	70,00%	0,00	57,14
160	06 Juni	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	33,33 15 5,00	66,67	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	40,00	70,00%	0,00	57,14

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1873/SJ.2/TU.210/VII/2026

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Umum
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026

Tanggal : 13 Juli 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 1820/SJ.1/RC.610/VII/2026 hal Penyampaian Peningkat Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Triwulan II Tahun 2026, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan II tahun 2026 berdasarkan aplikasi Myintress Kementerian Keuangan yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026 pukul 11.35 WIB.
2. Capaian IKU IKPA KKP Triwulan II tahun 2026 sebesar 87,85 dari target nilai 83.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Triwulan II tahun 2026 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart**, **Akuntabel**, **Integritas**, **Loyalitas**, dan **Sinergi** (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN KL

NO	Periode	Kode	Nama	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	99,03 10 9,90	68,76 15 10,31	83,90	67,08 20 13,42	100,00 10 10,00	99,91 10 9,99	96,80 10 9,68	90,95	98,19 25 24,55	98,19	87,85	100,00%	0,00	87,85



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN ESELON 1

NO	Periode	Kode	Nama	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	75,00 10 7,50	71,50 15 10,72	73,25	98,73 20 19,75	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,68	99,72 25 24,93	99,73	92,90	100,00%	0,00	92,90
2	06 Juni	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,56 20 19,91	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,07 10 9,81	99,41	100,00 25 25,00	100,00	99,72	100,00%	0,00	99,72
3	06 Juni	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	61,11 15 9,17	80,56	30,07 20 6,01	100,00 10 10,00	99,83 10 9,98	97,74 10 9,77	81,91	92,56 25 23,14	92,56	78,08	100,00%	0,00	78,08
4	06 Juni	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	61,30 15 9,20	80,65	66,02 20 13,20	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,49 10 9,95	91,38	99,16 25 24,79	99,16	87,14	100,00%	0,00	87,14
5	06 Juni	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,75 15 13,01	93,38	93,40 20 18,68	100,00 10 10,00	99,58 10 9,96	94,42 10 9,44	96,85	99,06 25 24,76	99,06	95,86	100,00%	0,00	95,86
6	06 Juni	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	78,17 20 15,63	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,54	100,00 25 25,00	100,00	95,63	100,00%	0,00	95,63
7	06 Juni	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	26,13 15 3,92	63,07	35,88 20 7,18	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,39 10 9,44	82,57	100,00 25 25,00	100,00	75,53	100,00%	0,00	75,53
8	06 Juni	03208	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	63,94 15 9,59	56,97	88,55 20 17,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,14	100,00 25 25,00	100,00	87,30	100,00%	0,00	87,30
9	06 Juni	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	98,75 10 9,88	89,39 15 13,41	94,07	96,23 20 19,25	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,74 10 9,57	97,99	99,25 25 24,81	99,25	96,92	100,00%	0,00	96,92
10	06 Juni	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,67 15 10,30	84,34	73,19 20 14,64	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,96 10 9,70	92,54	97,43 25 24,36	97,43	88,99	100,00%	0,00	88,99



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
2	06 Juni	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
3	06 Juni	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
4	06 Juni	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	78,02 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	70,00	70,00%	0,00	100,00
5	06 Juni	024	032	649732	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN CIREBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	80,00	80,00%	0,00	100,00
6	06 Juni	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
7	06 Juni	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
8	06 Juni	014	032	567481	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
9	06 Juni	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
10	06 Juni	038	032	567758	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MATARAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,92 10 9,99	99,96	100,00 25 25,00	100,00	79,99	80,00%	0,00	99,99
11	06 Juni	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,86 20 19,97	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,97	100,00 25 25,00	100,00	99,97	100,00%	0,00	99,97
12	06 Juni	012	032	649636	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,79 10 9,98	99,90	100,00 25 25,00	100,00	79,98	80,00%	0,00	99,97
13	06 Juni	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,67 10 9,97	99,83	100,00 25 25,00	100,00	79,97	80,00%	0,00	99,96
14	06 Juni	017	032	649615	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,69 10 9,97	99,85	100,00 25 25,00	100,00	79,97	80,00%	0,00	99,96
15	06 Juni	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,96 10 10,00	99,98	99,86 25 24,96	99,86	79,96	80,00%	0,00	99,95
16	06 Juni	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,68 20 19,94	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,92	100,00 25 25,00	100,00	99,94	100,00%	0,00	99,94



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
17	06 Juni	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,65 20 19,93	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,91	100,00 25 25,00	100,00	99,93	100,00%	0,00	99,93
18	06 Juni	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,65 20 19,93	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,83	100,00 25 25,00	100,00	79,93	80,00%	0,00	99,91
19	06 Juni	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,51 20 19,90	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,88	100,00 25 25,00	100,00	99,90	100,00%	0,00	99,90
20	06 Juni	030	032	649725	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,11 10 9,91	99,55	100,00 25 25,00	100,00	79,91	80,00%	0,00	99,89
21	06 Juni	053	032	649771	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00	99,65 25 24,91	99,65	79,91	80,00%	0,00	99,89
22	06 Juni	037	032	427624	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,42 20 19,88	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,86	100,00 25 25,00	100,00	99,88	100,00%	0,00	99,88
23	06 Juni	123	032	649684	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN II	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,43 20 19,89	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,72	100,00 25 25,00	100,00	79,89	80,00%	0,00	99,86



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
24	06 Juni	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,59 20 19,92	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,23 10 9,82	99,45	100,00 25 25,00	100,00	99,74	100,00%	0,00	99,74
25	06 Juni	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,56 20 19,91	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,07 10 9,81	99,41	100,00 25 25,00	100,00	99,72	100,00%	0,00	99,72
26	06 Juni	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,25 10 9,72	99,31	100,00 25 25,00	100,00	99,72	100,00%	0,00	99,72
27	06 Juni	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,57 20 19,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,64	100,00 25 25,00	100,00	99,71	100,00%	0,00	99,71
28	06 Juni	062	032	649767	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERNATE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,60 20 19,92	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,75 10 9,78	99,34	100,00 25 25,00	100,00	99,70	100,00%	0,00	99,70
29	06 Juni	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,36 20 19,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,59	100,00 25 25,00	100,00	99,67	100,00%	0,00	99,67
30	06 Juni	045	032	649593	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,34 20 19,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,59	99,97 25 24,99	99,97	99,66	100,00%	0,00	99,66
31	06 Juni	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,72 20 19,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,13 10 9,91	99,46	100,00 25 25,00	100,00	99,66	100,00%	0,00	99,66
32	06 Juni	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,11 20 19,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,53	100,00 25 25,00	100,00	99,62	100,00%	0,00	99,62



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
33	06 Juni	103	032	649792	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,85 20 19,77	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,24 10 9,92	99,05	100,00 25 25,00	100,00	79,69	80,00%	0,00	99,62
34	06 Juni	015	032	649699	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,70 20 19,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,72 10 9,87	99,36	100,00 25 25,00	100,00	99,61	100,00%	0,00	99,61
35	06 Juni	047	032	567610	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,71 20 19,94	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	97,31 10 9,73	98,51	100,00 25 25,00	100,00	79,67	80,00%	0,00	99,59
36	06 Juni	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,64 20 19,93	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,57 10 9,56	98,80	100,00 25 25,00	100,00	99,49	100,00%	0,00	99,49
37	06 Juni	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,97 20 19,79	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,74	98,57 25 24,64	98,57	99,44	100,00%	0,00	99,44
38	06 Juni	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,77 20 19,75	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	97,97 10 9,80	98,37	100,00 25 25,00	100,00	79,55	80,00%	0,00	99,44
39	06 Juni	001	032	649589	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,79 20 19,96	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	95,80 10 9,58	97,80	100,00 25 25,00	100,00	79,54	80,00%	0,00	99,42



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
40	06 Juni	050	032	649678	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN GORONTALO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,69 20 19,74	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	97,83 10 9,78	98,26	100,00 25 25,00	100,00	79,52	80,00%	0,00	99,40
41	06 Juni	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	96,82 20 19,36	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,21	100,00 25 25,00	100,00	99,36	100,00%	0,00	99,36
42	06 Juni	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,92 20 19,18	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,98	100,00 25 25,00	100,00	99,18	100,00%	0,00	99,18
43	06 Juni	134	032	649661	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,24 20 19,65	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,30 10 9,53	98,39	100,00 25 25,00	100,00	99,18	100,00%	0,00	99,18
44	06 Juni	039	032	649551	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	92,93 10 9,29	96,46	100,00 25 25,00	100,00	79,29	80,00%	0,00	99,12
45	06 Juni	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,89 20 19,98	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,15 10 9,61	99,01	98,10 25 24,52	98,10	99,12	100,00%	0,00	99,12
46	06 Juni	123	032	427567	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN I	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,22 20 19,44	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,21 10 9,82	97,72	100,00 25 25,00	100,00	79,27	80,00%	0,00	99,08
47	06 Juni	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	96,44 20 19,29	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,78 10 9,98	98,11	100,00 25 25,00	100,00	79,27	80,00%	0,00	99,08



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
48	06 Juni	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,33 20 19,07	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,83	100,00 25 25,00	100,00	99,07	100,00%	0,00	99,07
49	06 Juni	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,07 20 19,01	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,94 10 9,99	98,75	100,00 25 25,00	100,00	99,01	100,00%	0,00	99,01
50	06 Juni	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	96,22 20 19,24	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,60 10 9,76	98,45	100,00 25 25,00	100,00	99,00	100,00%	0,00	99,00
51	06 Juni	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,90 20 19,58	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,17 10 9,32	97,77	100,00 25 25,00	100,00	98,90	100,00%	0,00	98,90
52	06 Juni	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,90 20 19,78	100,00 10 10,00	95,24 10 9,52	95,81 10 9,58	97,49	100,00 25 25,00	100,00	98,88	100,00%	0,00	98,88
53	06 Juni	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,34 20 19,07	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,14 10 9,81	98,37	100,00 25 25,00	100,00	98,88	100,00%	0,00	98,88
54	06 Juni	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,98 20 19,60	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	92,40 10 9,24	97,60	100,00 25 25,00	100,00	98,84	100,00%	0,00	98,84
55	06 Juni	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,63 20 19,93	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	88,25 10 8,82	96,97	100,00 25 25,00	100,00	98,75	100,00%	0,00	98,75
56	06 Juni	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,06 15 14,11	97,03	92,76 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	69,11	70,00%	0,00	98,73
57	06 Juni	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	93,46 20 18,69	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,37	100,00 25 25,00	100,00	98,69	100,00%	0,00	98,69



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
58	06 Juni	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,39 15 14,16	97,20	97,63 20 19,53	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,41	100,00 25 25,00	100,00	98,68	100,00%	0,00	98,68
59	06 Juni	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,88 15 13,93	96,44	98,68 20 19,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,67	100,00 25 25,00	100,00	98,67	100,00%	0,00	98,67
60	06 Juni	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,09 15 14,11	97,05	98,26 20 19,65	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,42	100,00 25 25,00	100,00	88,77	90,00%	0,00	98,63
61	06 Juni	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,85 15 14,23	97,43	96,95 20 19,39	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,24	100,00 25 25,00	100,00	98,62	100,00%	0,00	98,62
62	06 Juni	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,50 15 14,18	97,25	97,09 20 19,42	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,43 10 9,84	98,88	99,99 25 25,00	99,99	98,43	100,00%	0,00	98,43
63	06 Juni	066	032	649711	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,65 15 13,90	96,33	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,21 10 9,82	99,11	100,00 25 25,00	100,00	78,72	80,00%	0,00	98,40
64	06 Juni	165	032	427542	BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,47 15 14,17	97,24	97,44 20 19,49	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	98,72	100,00 25 25,00	100,00	78,66	80,00%	0,00	98,32
65	06 Juni	009	032	649640	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG PINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,66 15 13,90	96,33	98,00 20 19,60	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,73 10 9,97	99,24	100,00 25 25,00	100,00	88,47	90,00%	0,00	98,30



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
66	06 Juni	061	032	649750	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,65 15 14,20	97,33	97,19 20 19,44	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	98,60	100,00 25 25,00	100,00	78,64	80,00%	0,00	98,29
67	06 Juni	042	032	567538	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,36 15 14,15	97,18	98,10 20 19,62	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,49 10 9,85	98,30	100,00 25 25,00	100,00	78,62	80,00%	0,00	98,28
68	06 Juni	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,97 15 13,20	93,99	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,64 10 9,96	99,91	100,00 25 25,00	100,00	98,16	100,00%	0,00	98,16
69	06 Juni	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	91,78 20 18,36	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,83 10 9,78	97,40	100,00 25 25,00	100,00	98,14	100,00%	0,00	98,14
70	06 Juni	137	032	427649	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,51 15 13,88	96,26	99,07 20 19,81	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,04 10 9,80	98,55	100,00 25 25,00	100,00	78,49	80,00%	0,00	98,12
71	06 Juni	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,83 15 14,07	96,92	95,30 20 19,06	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,64 10 9,96	98,74	100,00 25 25,00	100,00	98,10	100,00%	0,00	98,10
72	06 Juni	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,27 20 19,85	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,67 10 9,97	99,74	93,00 25 23,25	93,00	98,07	100,00%	0,00	98,07
73	06 Juni	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,33 15 13,70	95,67	96,73 20 19,35	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,18	100,00 25 25,00	100,00	98,05	100,00%	0,00	98,05



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
74	06 Juni	076	032	649746	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI ASAHAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	92,08 20 18,42	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,91 10 9,99	96,00	100,00 25 25,00	100,00	78,41	80,00%	0,00	98,01
75	06 Juni	049	032	567631	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,03 20 19,41	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,66 10 9,67	96,85	96,89 25 24,22	96,89	78,30	80,00%	0,00	97,87
76	06 Juni	048	032	649572	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	98,63 10 9,86	99,54	92,85 25 23,21	92,85	88,07	90,00%	0,00	97,86
77	06 Juni	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	89,31 20 17,86	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,00 10 9,90	97,08	100,00 25 25,00	100,00	97,76	100,00%	0,00	97,76
78	06 Juni	043	032	649657	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALANGKARAYA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,46 15 14,02	96,73	98,40 20 19,68	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	94,92 10 9,49	96,66	100,00 25 25,00	100,00	78,19	80,00%	0,00	97,74
79	06 Juni	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	91,81 20 18,36	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,67 10 9,37	96,37	100,00 25 25,00	100,00	97,73	100,00%	0,00	97,73
80	06 Juni	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,58 15 13,89	96,29	96,92 20 19,38	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,72 10 9,87	97,82	100,00 25 25,00	100,00	78,14	80,00%	0,00	97,68
81	06 Juni	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	88,94 15 13,34	94,47	99,29 20 19,86	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,35 10 9,84	98,82	100,00 25 25,00	100,00	78,03	80,00%	0,00	97,54



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
82	06 Juni	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,62 15 14,04	96,81	92,71 20 18,54	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,59 10 9,96	98,08	100,00 25 25,00	100,00	97,54	100,00%	0,00	97,54
83	06 Juni	071	032	649814	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BIMA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	93,60 20 18,72	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	93,06 10 9,31	93,33	100,00 25 25,00	100,00	78,03	80,00%	0,00	97,53
84	06 Juni	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,32 15 13,70	95,66	97,54 20 19,51	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,39	96,96 25 24,24	96,96	97,45	100,00%	0,00	97,45
85	06 Juni	010	032	567432	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,98 15 13,80	95,99	96,66 20 19,33	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,13 10 9,81	97,40	99,61 25 24,90	99,61	77,84	80,00%	0,00	97,31
86	06 Juni	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,69 15 13,00	93,35	96,47 20 19,29	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,12	100,00 25 25,00	100,00	97,30	100,00%	0,00	97,30
87	06 Juni	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	93,67 20 18,73	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,40 10 9,94	98,27	93,87 25 23,47	93,87	97,14	100,00%	0,00	97,14
88	06 Juni	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,07 20 19,41	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	82,74 10 8,27	89,91	100,00 25 25,00	100,00	77,69	80,00%	0,00	97,11
89	06 Juni	060	032	567694	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,17 20 19,43	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,99 10 9,70	97,08	94,08 25 23,52	94,08	77,65	80,00%	0,00	97,07
90	06 Juni	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,66 15 14,05	96,83	89,75 20 17,95	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,44	100,00 25 25,00	100,00	97,00	100,00%	0,00	97,00



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
91	06 Juni	135	032	649788	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA II	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,30 15 12,95	93,15	98,28 20 19,66	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,14	100,00 25 25,00	100,00	77,60	80,00%	0,00	97,00
92	06 Juni	008	032	567453	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,45 15 12,97	93,23	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	89,42 10 8,94	97,36	100,00 25 25,00	100,00	96,91	100,00%	0,00	96,91
93	06 Juni	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	79,29 15 11,89	89,65	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	96,89	100,00%	0,00	96,89
94	06 Juni	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,29 15 14,14	97,15	91,58 20 18,32	98,67 10 9,87	100,00 10 10,00	94,07 10 9,41	96,08	100,00 25 25,00	100,00	96,73	100,00%	0,00	96,73
95	06 Juni	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	82,09 15 12,31	91,05	99,52 20 19,90	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,64 10 9,46	98,54	100,00 25 25,00	100,00	96,68	100,00%	0,00	96,68
96	06 Juni	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,82 15 13,17	93,91	99,18 20 19,84	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	86,17 10 8,62	96,34	100,00 25 25,00	100,00	96,63	100,00%	0,00	96,63
97	06 Juni	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,82 15 13,77	95,91	89,10 20 17,82	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,28	100,00 25 25,00	100,00	96,59	100,00%	0,00	96,59
98	06 Juni	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	90,84 15 13,63	95,42	98,22 20 19,64	100,00 10 10,00	92,31 10 9,23	97,53 10 9,75	97,01	96,81 25 24,20	96,82	96,46	100,00%	0,00	96,46
99	06 Juni	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	77,37 15 11,61	88,69	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,45 10 9,75	99,36	100,00 25 25,00	100,00	96,35	100,00%	0,00	96,35



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
100	06 Juni	051	032	649601	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00	88,85	94,43	99,37	0,00	0,00	88,26	93,82	99,84	99,84	76,99	80,00%	0,00	96,23
							10	15		20	0	0	10		25					
							10,00	13,33		19,87	0,00	0,00	8,83		24,96					



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
101	06 Juni	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,91 15 14,24	97,46	94,28 20 18,86	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	80,57 10 8,06	93,71	100,00 25 25,00	100,00	96,15	100,00%	0,00	96,15
102	06 Juni	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	85,90 20 17,18	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	92,79 10 9,28	92,90	100,00 25 25,00	100,00	86,46	90,00%	0,00	96,07
103	06 Juni	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,81 15 14,07	96,91	97,99 20 19,60	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	81,74 10 8,17	89,87	100,00 25 25,00	100,00	76,84	80,00%	0,00	96,05
104	06 Juni	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	75,00 15 11,25	87,50	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,92 10 9,79	99,48	100,00 25 25,00	100,00	96,04	100,00%	0,00	96,04
105	06 Juni	167	032	649568	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	84,23 15 12,63	92,12	96,18 20 19,24	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,62 10 9,86	97,40	100,00 25 25,00	100,00	76,73	80,00%	0,00	95,92
106	06 Juni	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	83,35 15 12,50	91,68	90,60 20 18,12	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,94 10 9,99	97,64	100,00 25 25,00	100,00	95,62	100,00%	0,00	95,62
107	06 Juni	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,38 15 13,41	94,69	85,55 20 17,11	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,39	100,00 25 25,00	100,00	95,52	100,00%	0,00	95,52
108	06 Juni	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	78,78 20 15,76	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,01 10 9,60	93,70	100,00 25 25,00	100,00	95,36	100,00%	0,00	95,36
109	06 Juni	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,81 15 13,77	95,91	85,67 20 17,13	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,42	97,52 25 24,38	97,52	95,28	100,00%	0,00	95,28



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
110	06 Juni	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	76,41 20 15,28	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,10	100,00 25 25,00	100,00	95,28	100,00%	0,00	95,28
111	06 Juni	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,84 15 13,48	94,92	88,33 20 17,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	88,91 10 8,89	94,31	100,00 25 25,00	100,00	95,03	100,00%	0,00	95,03
112	06 Juni	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,67 15 13,45	94,84	89,15 20 17,83	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	85,70 10 8,57	93,71	100,00 25 25,00	100,00	94,85	100,00%	0,00	94,85
113	06 Juni	016	032	649622	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	71,90 15 10,79	85,95	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	94,86 10 9,49	98,29	100,00 25 25,00	100,00	85,27	90,00%	0,00	94,75
114	06 Juni	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	75,36 15 11,30	87,68	99,59 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	66,30	70,00%	0,00	94,72
115	06 Juni	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	81,12 15 12,17	90,56	87,96 20 17,59	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,37 10 9,94	96,83	100,00 25 25,00	100,00	94,70	100,00%	0,00	94,70
116	06 Juni	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	80,95 15 12,14	90,48	88,08 20 17,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,76 10 9,78	96,46	100,00 25 25,00	100,00	94,53	100,00%	0,00	94,53
117	06 Juni	063	032	567812	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAYAPURA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,47 15 10,27	84,24	95,31 20 19,06	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,83	100,00 25 25,00	100,00	94,33	100,00%	0,00	94,33



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
118	06 Juni	178	032	645691	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAMUJU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	76,61 15 11,49	88,31	95,87 20 19,17	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,54 10 9,65	96,20	100,00 25 25,00	100,00	75,32	80,00%	0,00	94,15
119	06 Juni	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,52 15 14,18	97,26	77,49 20 15,50	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	99,73 10 9,97	92,41	100,00 25 25,00	100,00	84,65	90,00%	0,00	94,05
120	06 Juni	068	032	649704	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	88,37 15 13,26	94,19	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	79,60 10 7,96	89,80	93,36 25 23,34	93,36	74,55	80,00%	0,00	93,19
121	06 Juni	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,07 15 10,21	84,04	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	77,66 10 7,77	94,42	100,00 25 25,00	100,00	92,98	100,00%	0,00	92,98
122	06 Juni	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	65,54 20 13,11	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,45 10 9,95	91,25	98,87 25 24,72	98,87	92,77	100,00%	0,00	92,77
123	06 Juni	022	032	645693	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,43 15 13,86	96,22	94,52 20 18,90	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,28 10 9,93	96,90	83,98 25 20,99	83,98	73,69	80,00%	0,00	92,11
124	06 Juni	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	67,55 15 10,13	83,78	84,59 20 16,92	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,55 10 9,96	96,04	100,00 25 25,00	100,00	92,01	100,00%	0,00	92,01
125	06 Juni	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	82,62 15 12,39	91,31	72,35 20 14,47	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,09	100,00 25 25,00	100,00	91,86	100,00%	0,00	91,86
126	06 Juni	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	90,47 15 13,57	95,24	75,71 20 15,14	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,93	92,36 25 23,09	92,36	91,80	100,00%	0,00	91,80



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
127	06 Juni	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,92 15 13,79	95,96	68,95 20 13,79	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	92,24	95,74 25 23,93	95,74	91,51	100,00%	0,00	91,51
128	06 Juni	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	83,53 15 12,53	91,77	76,74 20 15,35	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	88,29 10 8,83	91,26	98,04 25 24,51	98,04	91,22	100,00%	0,00	91,22
129	06 Juni	083	032	649800	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	92,50 20 18,50	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	62,22 10 6,22	77,36	92,47 25 23,12	92,48	72,84	80,00%	0,00	91,05
130	06 Juni	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	69,81 15 10,47	84,91	80,72 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	80,72	100,00 25 25,00	100,00	45,47	50,00%	0,00	90,94
131	06 Juni	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	90,50 15 13,57	95,25	98,78 20 19,76	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	54,96 10 5,50	84,58	91,67 25 22,92	91,67	81,74	90,00%	0,00	90,83
132	06 Juni	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	83,42 15 12,51	66,71	93,09 20 18,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,78 10 9,68	97,47	100,00 25 25,00	100,00	90,81	100,00%	0,00	90,81
133	06 Juni	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,44 15 13,42	94,72	68,54 20 13,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	84,52 10 8,45	88,27	100,00 25 25,00	100,00	90,58	100,00%	0,00	90,58
134	06 Juni	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	70,65 15 10,60	60,33	99,38 20 19,88	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,85	100,00 25 25,00	100,00	90,47	100,00%	0,00	90,47
135	06 Juni	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,71 15 13,46	94,86	89,94 20 17,99	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	82,59 10 8,26	86,27	89,49 25 22,37	89,49	72,08	80,00%	0,00	90,10
136	06 Juni	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	66,72 15 10,01	83,36	57,92 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	57,92	98,70 25 24,68	98,71	44,68	50,00%	0,00	89,37



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
137	06 Juni	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	76,85 15 11,53	63,43	96,21 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	61,53	70,00%	0,00	87,90
138	06 Juni	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	73,06 15 10,96	86,53	62,65 20 12,53	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	91,38 10 9,14	88,51	100,00 25 25,00	100,00	87,63	100,00%	0,00	87,63
139	06 Juni	175	032	691706	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	63,94 15 9,59	56,97	88,55 20 17,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,14	100,00 25 25,00	100,00	87,30	100,00%	0,00	87,30
140	06 Juni	020	032	649688	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,04 15 10,21	84,02	83,95 20 16,79	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,56 10 9,66	90,26	88,72 25 22,18	88,72	68,83	80,00%	0,00	86,04
141	06 Juni	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	76,45 15 11,47	88,23	48,97 20 9,79	93,33 10 9,33	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	85,58	100,00 25 25,00	100,00	85,59	100,00%	0,00	85,59
142	06 Juni	175	032	691629	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	63,78 15 9,57	81,89	58,69 20 11,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	89,51 10 8,95	87,05	100,00 25 25,00	100,00	85,26	100,00%	0,00	85,26
143	06 Juni	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	74,25 15 11,14	87,13	45,61 20 9,12	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,14 10 9,81	85,94	100,00 25 25,00	100,00	85,07	100,00%	0,00	85,07
144	06 Juni	175	032	649682	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	72,87 15 10,93	86,44	96,89 20 19,38	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	86,53 10 8,65	91,71	76,19 25 19,05	76,19	68,01	80,00%	0,00	85,01



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
145	06 Juni	136	032	427598	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	66,41 15 9,96	83,21	47,43 20 9,49	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	92,69 10 9,27	85,03	95,59 25 23,90	95,59	82,61	100,00%	0,00	82,61
146	06 Juni	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,50 15 13,13	93,75	23,33 20 4,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,59 10 9,76	80,23	100,00 25 25,00	100,00	82,55	100,00%	0,00	82,55
147	06 Juni	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,28 15 12,94	93,14	22,74 20 4,55	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,32 10 9,53	79,52	100,00 25 25,00	100,00	82,02	100,00%	0,00	82,02
148	06 Juni	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	46,56 15 6,98	73,28	50,93 20 10,19	96,21 10 9,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	86,79	97,44 25 24,36	97,44	81,15	100,00%	0,00	81,15
149	06 Juni	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	59,51 15 8,93	79,76	38,47 20 7,69	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,95 10 9,39	83,10	100,00 25 25,00	100,00	81,02	100,00%	0,00	81,02
150	06 Juni	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	58,21 15 8,73	79,11	41,68 20 8,34	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,66 10 9,77	84,84	91,53 25 22,88	91,53	79,72	100,00%	0,00	79,72
151	06 Juni	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	72,07 15 10,81	86,04	18,11 20 3,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,73 10 9,87	79,21	100,00 25 25,00	100,00	79,31	100,00%	0,00	79,31
152	06 Juni	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	71,45 15 10,72	85,73	15,02 20 3,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,14 10 9,91	78,54	100,00 25 25,00	100,00	78,64	100,00%	0,00	78,64
153	06 Juni	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	81,30 15 12,20	90,65	5,40 20 1,08	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	76,35	100,00 25 25,00	100,00	78,28	100,00%	0,00	78,28



NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
154	06 Juni	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	62,10 15 9,31	81,05	35,74 20 7,15	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	83,94	83,85 25 20,96	83,85	77,43	100,00%	0,00	77,43
155	06 Juni	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,46 15 10,27	84,23	34,86 20 6,97	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,24 10 9,62	82,77	64,03 25 16,01	64,03	72,87	100,00%	0,00	72,87
156	06 Juni	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	50,00	70,00%	0,00	71,43
157	06 Juni	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	21,75 15 3,26	60,88	23,05 20 4,61	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	82,28 10 8,23	76,33	100,00 25 25,00	100,00	71,10	100,00%	0,00	71,10
158	06 Juni	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	50,00 15 7,50	75,00	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	42,50	70,00%	0,00	60,71
159	06 Juni	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	33,33 15 5,00	66,67	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	40,00	70,00%	0,00	57,14
160	06 Juni	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	33,33 15 5,00	66,67	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	40,00	70,00%	0,00	57,14

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I
TAHUN 2026

Nama Indikator	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I
Nama Timja	:	Didik Srinoto
Periode Laporan	:	Triwulan 2 Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	77	77	77	77	77	77	77	-	77
Realisasi	100	100	100	-	-	-	-	-	-
%Capaian	100	100	100	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Tw 1, Tw 2, Tw 3 dan Tw 4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Penghitungan persentase RUP Terumumkan tidak sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Revisi DIPA yang berdampak pada perubahan pagu anggaran

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan penyesuaian RUP terumumkan dengan Pagu Pengadaan Tahun Anggaran 2026	Kabag Tata Usaha

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
RUP Terumumkan dilakukan penyesuaian dengan Pagu Pengadaan sesuai hasil revisi DIPA	Kabag Tata Usaha

Sidoarjo, Juli 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Didik Srinoto
 NIP. 19690616 198903 1 004

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 9 Juli 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 2 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 9 Juli 2026 pukul 12:00 WIB sebesar **99,94%**. (daftar rekapitulasi terampir);

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026

Tanggal : 9 Juli 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK
PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2026
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan					Capaian IKU TW II - TA. 2026		
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan	Target Score IKU TW II	Capaian Score IKU TW II	Keterangan
1	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	90,098,492,000	90,098,492,000	0	100.00	SESUAI	77.00	100.00	Capaian Sesuai Target Maksimal
2	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	40,528,993,000	40,528,993,000	0	100.00	SESUAI	75.00	100.00	Capaian Sesuai Target Maksimal
3	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,179,150,929,000	1,179,089,911,000	61,018,000	99.99	KURANG Terumumkan	76.00	99.99	Capaian melebihi Target
4	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,538,648,319,000	6,539,057,155,000	(408,836,000)	100.01	LEBIH Terumumkan	77.00	99.99	Capaian melebihi Target
5	01	Sekretariat Jenderal	3	274,871,947,000	274,960,715,000	(88,768,000)	100.03	LEBIH Terumumkan	85.00	99.97	Capaian melebihi Target
6	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	1,044,582,048,000	1,044,261,636,000	320,412,000	99.97	KURANG Terumumkan	77.00	99.97	Capaian melebihi Target
7	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,971,753,400,000	1,966,947,970,304	4,805,429,696	99.76	KURANG Terumumkan	77.00	99.76	Capaian melebihi Target
8	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,616,878,809,000	1,612,951,093,400	3,927,715,600	99.76	KURANG Terumumkan	77.00	99.76	Capaian melebihi Target
9	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	180,543,219,000	181,335,346,000	(792,127,000)	100.44	LEBIH Terumumkan	77.00	99.56	Capaian melebihi Target
10	02	Inspektorat Jenderal	1	13,030,248,000	13,093,680,000	(63,432,000)	100.49	LEBIH Terumumkan	77.00	99.51	Capaian melebihi Target
TOTAL			156	12,950,086,404,000	12,942,324,991,704	7,761,412,296	99.94	LEBIH Terumumkan	SKOR ITKP	5.00	Persentase RUP : ≥90% - <110%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026

Tanggal : 9 Juli 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK
PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA**

(06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			STATISTIK MONER			
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,259,474,000		7,259,474,000	7,259,474,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	82,839,018,000		82,839,018,000	82,839,018,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			90,098,492,000	-	90,098,492,000	90,098,492,000	-	100.00%	Capaian IKU : 100.00

(08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			STATISTIK MONER			
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
1	691706	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	40,493,593,000	35,400,000	40,528,993,000	40,528,993,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			40,493,593,000	35,400,000	40,528,993,000	40,528,993,000	-	100.00%	Capaian IKU : 100.00

(07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			STATISTIK MONER			
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,000,697,000		6,000,697,000	6,000,697,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,035,086,000		3,035,086,000	3,035,086,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000		2,736,010,000	2,736,010,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	2,970,613,000		2,970,613,000	2,970,613,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,164,347,505,000		1,164,347,505,000	1,164,408,523,000	(61,018,000)	99.99%	KURANG TERUMUMKAN
TOTAL			1,179,089,911,000	-	1,179,089,911,000	1,179,150,929,000	(61,018,000)	99.99%	Capaian IKU : 99.99

(03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP							
1	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,274,143,000		4,274,143,000	4,274,143,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2,888,215,000		2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	5,680,809,000		5,680,809,000	5,680,809,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	4,975,769,000		4,975,769,000	4,975,769,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	76,503,097,000		76,503,097,000	76,503,097,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	3,847,978,000		3,847,978,000	3,847,978,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	2,624,978,000		2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4,966,852,000		4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,173,989,000		2,173,989,000	2,173,989,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	277,757,594,000		277,757,594,000	277,757,594,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,946,640,000		2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	3,330,894,000		3,330,894,000	3,536,779,000	(205,885,000)	94.18%	TERUMUMKAN 100%
13	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	3,192,527,000		3,192,527,000	2,793,060,000	399,467,000	114.30%	TERUMUMKAN 100%
14	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,805,286,000		1,805,286,000	1,805,286,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4,335,453,000		4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
16	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	2,124,978,000		2,124,978,000	2,124,978,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,040,222,000		2,040,222,000	2,040,222,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
18	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	8,432,114,000		8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
19	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	367,160,664,000		367,160,664,000	367,160,664,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
20	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	1,676,910,000		1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
21	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	106,649,870,000		106,649,870,000	106,421,616,000	228,254,000	100.21%	TERUMUMKAN 100%
22	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	43,621,978,000		43,621,978,000	43,634,978,000	(13,000,000)	99.97%	TERUMUMKAN 100%
23	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	29,534,148,000		29,534,148,000	29,534,148,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,576,512,047,000		5,576,512,047,000	5,576,512,047,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			6,539,057,155,000	-	6,539,057,155,000	6,538,648,319,000	408,836,000	100.01%	Capaian IKU : 99.99

 (01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	01	SEKRETARIAT JENDERAL							
1	632004	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	13,716,776,000		13,716,776,000	13,716,776,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	622081	BIRO UMUM SETJEN KKP	251,689,866,000	1,085,000,000	252,774,866,000	252,774,866,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,469,073,000		8,469,073,000	8,380,305,000	88,768,000	101.06%	LEBIH TERUMUMKAN
TOTAL			273,875,715,000	1,085,000,000	274,960,715,000	274,871,947,000	88,768,000	100.03%	Capaian IKU : 99.97

 (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan – 42 Satker

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	791,179,000		791,179,000	791,179,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	6,529,483,000		6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRP2BKP	3,136,163,000		3,136,163,000	3,136,163,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	1,109,213,000		1,109,213,000	1,109,213,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	13,754,039,000		13,754,039,000	13,754,039,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3,541,150,000		3,541,150,000	3,541,150,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	12,257,656,000		12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	4,417,477,000		4,417,477,000	4,417,477,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	34,574,253,000		34,574,253,000	34,574,253,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	3,109,166,000		3,109,166,000	3,109,166,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	2,603,171,000		2,603,171,000	2,603,171,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	2,868,683,000		2,868,683,000	2,868,683,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	1,736,888,000		1,736,888,000	1,736,888,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBAP3	4,919,286,000		4,919,286,000	4,919,286,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBATPP	5,139,080,000		5,139,080,000	6,146,393,000	(1,007,313,000)	83.61%	KURANG TERUMUMKAN
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	904,237,000		904,237,000	904,237,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPPUPP	6,112,923,000		6,112,923,000	6,112,923,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	1,287,784,000		1,287,784,000	1,287,784,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBRL	1,105,425,000		1,105,425,000	1,105,425,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	835,677,000		835,677,000	835,677,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,682,185,000		1,682,185,000	1,682,185,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
22	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,739,060,000		1,739,060,000	1,739,060,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
23	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	57,281,778,000		57,281,778,000	57,281,778,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
24	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,633,984,000		2,633,984,000	2,633,984,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	2,723,973,000		2,723,973,000	2,723,973,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	12,461,790,000		12,461,790,000	12,461,790,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
27	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	2,064,018,000		2,064,018,000	2,064,018,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
28	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	25,349,816,000		25,349,816,000	25,349,816,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
29	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,640,748,000		1,640,748,000	1,640,748,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
30	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,467,483,000		2,467,483,000	2,467,483,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	16,713,583,000		16,713,583,000	16,713,583,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
32	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,709,753,000		2,709,753,000	2,747,126,000	(37,373,000)	98.64%	KURANG TERUMUMKAN
33	403821	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5,838,732,000		5,838,732,000	5,838,732,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
34	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	5,240,629,000		5,240,629,000	4,764,876,000	475,753,000	109.98%	LEBIH TERUMUMKAN
35	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	2,241,459,000		2,241,459,000	2,216,403,000	25,056,000	101.13%	LEBIH TERUMUMKAN
36	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	4,035,922,000	25,900,000	4,061,822,000	4,061,822,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
37	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	1,375,951,000		1,375,951,000	1,375,951,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
38	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,326,290,000		1,326,290,000	1,102,825,000	223,465,000	120.26%	LEBIH TERUMUMKAN
39	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	2,366,032,000		2,366,032,000	2,366,032,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
40	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	1,852,257,000		1,852,257,000	1,852,257,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
41	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	777,685,374,000		777,685,374,000	777,685,374,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
42	389090	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELUTAN DAN PERIKANAN	2,071,986,000		2,071,986,000	2,071,986,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			1,044,235,736,000	25,900,000	1,044,261,636,000	1,044,582,048,000	(320,412,000)	99.97%	Capaian IKU : 99.97

 (04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	04	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA							
1	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	34,210,072,000		34,210,072,000	33,793,812,000	416,260,000	101.23%	LEBIH TERUMUMKAN
2	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	26,278,799,000		26,278,799,000	26,278,799,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	17,815,644,000		17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	140,988,207,000		140,988,207,000	140,988,207,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,287,862,000		3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	48,342,980,000	712,340,000	49,055,320,000	49,055,320,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	15,769,606,000		15,769,606,000	15,769,606,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000		10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000		16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000		19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000		11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	14,325,630,000		14,325,630,000	14,325,630,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	9,238,563,000		9,238,563,000	9,238,563,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	13,441,592,000		13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,052,853,000	69,361,000	6,122,214,000	6,122,214,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
16	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	1,570,143,034,304	8,138,554,000	1,578,281,588,304	1,583,503,278,000	(5,221,689,696)	99.67%	KURANG TERUMUMKAN
TOTAL			1,958,027,715,304	8,920,255,000	1,966,947,970,304	1,971,753,400,000	(4,805,429,696)	99.76%	Capaian IKU : 99.76

 (03) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,336,525,000		20,336,525,000	20,336,525,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	14,138,759,000		14,138,759,000	13,244,623,000	894,136,000	106.75%	LEBIH TERUMUMKAN
3	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	21,094,321,000		21,094,321,000	21,094,321,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	325156	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	18,809,471,000		18,809,471,000	18,809,471,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	225135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	15,234,749,000		15,234,749,000	15,234,749,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	065135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	21,461,321,000		21,461,321,000	21,461,321,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	449520	SETDITJEN PENGAWASAN SDKP	1,408,211,201,400	296,000,000	1,408,507,201,400	1,413,260,698,000	(4,753,496,600)	99.66%	KURANG TERUMUMKAN

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
8	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,703,883,000	148,800,000	16,852,683,000	16,852,683,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,599,397,000		18,599,397,000	18,599,397,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	215141	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,715,404,000		9,715,404,000	9,715,404,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	250263	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	7,494,664,000		7,494,664,000	7,617,665,000	(123,001,000)	98.39%	KURANG TERUMUMKAN
12	031665	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	15,532,133,000		15,532,133,000	15,477,487,000	54,646,000	100.35%	LEBIH TERUMUMKAN
13	245160	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	8,923,976,000		8,923,976,000	8,923,976,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	170445	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	9,681,302,000		9,681,302,000	9,681,302,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	355105	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,569,187,000		6,569,187,000	6,569,187,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			1,612,506,293,400	444,800,000	1,612,951,093,400	1,616,878,809,000	(3,927,715,600)	99.76%	Capaian IKU : 99.76

 (13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	18,787,046,000		18,787,046,000	18,787,046,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	726,519,000		726,519,000	726,519,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000		1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000		1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000		1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000		2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000		526,628,000	526,628,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000		2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000		942,893,000	942,893,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000		1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000		922,433,000	922,433,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,263,624,000		1,263,624,000	1,263,624,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,433,853,000		1,433,853,000	1,433,853,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,131,730,000		2,131,730,000	2,131,730,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	909,530,000	2,380,979,000	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TANJUNG PINANG	388,074,000		388,074,000	388,074,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000		872,480,000	872,480,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,377,763,000		23,377,763,000	23,377,763,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
19	440807	SEKRETARIAT BADAN KIPM DAN KHP	100,174,507,000		100,174,507,000	99,351,660,000	822,847,000	100.83%	LEBIH TERUMUMKAN
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000		228,306,000	228,306,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000		132,060,000	132,060,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000		264,756,000	264,756,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000		1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000		753,105,000	753,105,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	737,668,000		737,668,000	768,388,000	(30,720,000)	96.00%	KURANG TERUMUMKAN
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000		160,800,000	160,800,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000		574,268,000	574,268,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000		784,570,000	784,570,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	758,484,000		758,484,000	758,484,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000		493,789,000	493,789,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000		195,176,000	195,176,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000		380,500,000	380,500,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000		171,170,000	171,170,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000		978,651,000	978,651,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000		996,270,000	996,270,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000		903,509,000	903,509,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000		748,892,000	748,892,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	853,490,000		853,490,000	853,490,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000		390,073,000	390,073,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000		397,648,000	397,648,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000		1,284,545,000	1,284,545,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000		754,512,000	754,512,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000		833,020,000	833,020,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	444,470,000		444,470,000	444,470,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TANJUNG BALAI ASAHAN	656,615,000	69,720,000	726,335,000	726,335,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000		705,319,000	705,319,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000		1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			178,884,647,000	2,450,699,000	181,335,346,000	180,543,219,000	792,127,000	100.44%	Capaian IKU : 99.56

 (02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	02	INSPEKTORAT JENDERAL							
1	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	13,093,680,000		13,093,680,000	13,030,248,000	63,432,000	100.49%	LEBIH TERUMUMKAN
TOTAL			13,093,680,000	-	13,093,680,000	13,030,248,000	63,432,000	100.49%	Capaian IKU : 99.51



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 9 Juli 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 2 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 9 Juli 2026 pukul 12:00 WIB sebesar **99,94%**. (daftar rekapitulasi terampir);

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026

Tanggal : 9 Juli 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK
PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2026
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan					Capaian IKU TW II - TA. 2026		
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan	Target Score IKU TW II	Capaian Score IKU TW II	Keterangan
1	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	90,098,492,000	90,098,492,000	0	100.00	SESUAI	77.00	100.00	Capaian Sesuai Target Maksimal
2	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	40,528,993,000	40,528,993,000	0	100.00	SESUAI	75.00	100.00	Capaian Sesuai Target Maksimal
3	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,179,150,929,000	1,179,089,911,000	61,018,000	99.99	KURANG Terumumkan	76.00	99.99	Capaian melebihi Target
4	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,538,648,319,000	6,539,057,155,000	(408,836,000)	100.01	LEBIH Terumumkan	77.00	99.99	Capaian melebihi Target
5	01	Sekretariat Jenderal	3	274,871,947,000	274,960,715,000	(88,768,000)	100.03	LEBIH Terumumkan	85.00	99.97	Capaian melebihi Target
6	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	1,044,582,048,000	1,044,261,636,000	320,412,000	99.97	KURANG Terumumkan	77.00	99.97	Capaian melebihi Target
7	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,971,753,400,000	1,966,947,970,304	4,805,429,696	99.76	KURANG Terumumkan	77.00	99.76	Capaian melebihi Target
8	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,616,878,809,000	1,612,951,093,400	3,927,715,600	99.76	KURANG Terumumkan	77.00	99.76	Capaian melebihi Target
9	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	180,543,219,000	181,335,346,000	(792,127,000)	100.44	LEBIH Terumumkan	77.00	99.56	Capaian melebihi Target
10	02	Inspektorat Jenderal	1	13,030,248,000	13,093,680,000	(63,432,000)	100.49	LEBIH Terumumkan	77.00	99.51	Capaian melebihi Target
TOTAL			156	12,950,086,404,000	12,942,324,991,704	7,761,412,296	99.94	LEBIH Terumumkan	SKOR ITKP	5.00	Persentase RUP : ≥90% - <110%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026

Tanggal : 9 Juli 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK
PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA**

✚ (06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			STATISTIK MONER			
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,259,474,000		7,259,474,000	7,259,474,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	82,839,018,000		82,839,018,000	82,839,018,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			90,098,492,000	-	90,098,492,000	90,098,492,000	-	100.00%	Capaian IKU : 100.00

✚ (08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			STATISTIK MONER			
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
1	691706	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	40,493,593,000	35,400,000	40,528,993,000	40,528,993,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			40,493,593,000	35,400,000	40,528,993,000	40,528,993,000	-	100.00%	Capaian IKU : 100.00

✚ (07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			STATISTIK MONER			
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,000,697,000		6,000,697,000	6,000,697,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,035,086,000		3,035,086,000	3,035,086,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000		2,736,010,000	2,736,010,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	2,970,613,000		2,970,613,000	2,970,613,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,164,347,505,000		1,164,347,505,000	1,164,408,523,000	(61,018,000)	99.99%	KURANG TERUMUMKAN
TOTAL			1,179,089,911,000	-	1,179,089,911,000	1,179,150,929,000	(61,018,000)	99.99%	Capaian IKU : 99.99

(03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP							
1	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,274,143,000		4,274,143,000	4,274,143,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2,888,215,000		2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	5,680,809,000		5,680,809,000	5,680,809,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	4,975,769,000		4,975,769,000	4,975,769,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	76,503,097,000		76,503,097,000	76,503,097,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	3,847,978,000		3,847,978,000	3,847,978,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	2,624,978,000		2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4,966,852,000		4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,173,989,000		2,173,989,000	2,173,989,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	277,757,594,000		277,757,594,000	277,757,594,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,946,640,000		2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	3,330,894,000		3,330,894,000	3,536,779,000	(205,885,000)	94.18%	TERUMUMKAN 100%
13	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	3,192,527,000		3,192,527,000	2,793,060,000	399,467,000	114.30%	TERUMUMKAN 100%
14	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,805,286,000		1,805,286,000	1,805,286,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4,335,453,000		4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
16	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	2,124,978,000		2,124,978,000	2,124,978,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,040,222,000		2,040,222,000	2,040,222,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
18	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	8,432,114,000		8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
19	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	367,160,664,000		367,160,664,000	367,160,664,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
20	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	1,676,910,000		1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
21	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	106,649,870,000		106,649,870,000	106,421,616,000	228,254,000	100.21%	TERUMUMKAN 100%
22	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	43,621,978,000		43,621,978,000	43,634,978,000	(13,000,000)	99.97%	TERUMUMKAN 100%
23	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	29,534,148,000		29,534,148,000	29,534,148,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,576,512,047,000		5,576,512,047,000	5,576,512,047,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			6,539,057,155,000	-	6,539,057,155,000	6,538,648,319,000	408,836,000	100.01%	Capaian IKU : 99.99

 (01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	01	SEKRETARIAT JENDERAL							
1	632004	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	13,716,776,000		13,716,776,000	13,716,776,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	622081	BIRO UMUM SETJEN KKP	251,689,866,000	1,085,000,000	252,774,866,000	252,774,866,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,469,073,000		8,469,073,000	8,380,305,000	88,768,000	101.06%	LEBIH TERUMUMKAN
TOTAL			273,875,715,000	1,085,000,000	274,960,715,000	274,871,947,000	88,768,000	100.03%	Capaian IKU : 99.97

 (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan – 42 Satker

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	791,179,000		791,179,000	791,179,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	6,529,483,000		6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRP2BKP	3,136,163,000		3,136,163,000	3,136,163,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	1,109,213,000		1,109,213,000	1,109,213,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	13,754,039,000		13,754,039,000	13,754,039,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3,541,150,000		3,541,150,000	3,541,150,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	12,257,656,000		12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	4,417,477,000		4,417,477,000	4,417,477,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	34,574,253,000		34,574,253,000	34,574,253,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	3,109,166,000		3,109,166,000	3,109,166,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	2,603,171,000		2,603,171,000	2,603,171,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	2,868,683,000		2,868,683,000	2,868,683,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	1,736,888,000		1,736,888,000	1,736,888,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBAP3	4,919,286,000		4,919,286,000	4,919,286,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBATPP	5,139,080,000		5,139,080,000	6,146,393,000	(1,007,313,000)	83.61%	KURANG TERUMUMKAN
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	904,237,000		904,237,000	904,237,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPPUPP	6,112,923,000		6,112,923,000	6,112,923,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	1,287,784,000		1,287,784,000	1,287,784,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBRL	1,105,425,000		1,105,425,000	1,105,425,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	835,677,000		835,677,000	835,677,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,682,185,000		1,682,185,000	1,682,185,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
22	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,739,060,000		1,739,060,000	1,739,060,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
23	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	57,281,778,000		57,281,778,000	57,281,778,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
24	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,633,984,000		2,633,984,000	2,633,984,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	2,723,973,000		2,723,973,000	2,723,973,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	12,461,790,000		12,461,790,000	12,461,790,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
27	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	2,064,018,000		2,064,018,000	2,064,018,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
28	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	25,349,816,000		25,349,816,000	25,349,816,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
29	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,640,748,000		1,640,748,000	1,640,748,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
30	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,467,483,000		2,467,483,000	2,467,483,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	16,713,583,000		16,713,583,000	16,713,583,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
32	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,709,753,000		2,709,753,000	2,747,126,000	(37,373,000)	98.64%	KURANG TERUMUMKAN
33	403821	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5,838,732,000		5,838,732,000	5,838,732,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
34	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	5,240,629,000		5,240,629,000	4,764,876,000	475,753,000	109.98%	LEBIH TERUMUMKAN
35	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	2,241,459,000		2,241,459,000	2,216,403,000	25,056,000	101.13%	LEBIH TERUMUMKAN
36	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	4,035,922,000	25,900,000	4,061,822,000	4,061,822,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
37	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	1,375,951,000		1,375,951,000	1,375,951,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
38	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,326,290,000		1,326,290,000	1,102,825,000	223,465,000	120.26%	LEBIH TERUMUMKAN
39	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	2,366,032,000		2,366,032,000	2,366,032,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
40	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	1,852,257,000		1,852,257,000	1,852,257,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
41	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	777,685,374,000		777,685,374,000	777,685,374,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
42	389090	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELUTAN DAN PERIKANAN	2,071,986,000		2,071,986,000	2,071,986,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			1,044,235,736,000	25,900,000	1,044,261,636,000	1,044,582,048,000	(320,412,000)	99.97%	Capaian IKU : 99.97

 (04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	04	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA							
1	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	34,210,072,000		34,210,072,000	33,793,812,000	416,260,000	101.23%	LEBIH TERUMUMKAN
2	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	26,278,799,000		26,278,799,000	26,278,799,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	17,815,644,000		17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	140,988,207,000		140,988,207,000	140,988,207,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,287,862,000		3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	48,342,980,000	712,340,000	49,055,320,000	49,055,320,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	15,769,606,000		15,769,606,000	15,769,606,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000		10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000		16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000		19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000		11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	14,325,630,000		14,325,630,000	14,325,630,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	9,238,563,000		9,238,563,000	9,238,563,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	13,441,592,000		13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,052,853,000	69,361,000	6,122,214,000	6,122,214,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
16	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	1,570,143,034,304	8,138,554,000	1,578,281,588,304	1,583,503,278,000	(5,221,689,696)	99.67%	KURANG TERUMUMKAN
TOTAL			1,958,027,715,304	8,920,255,000	1,966,947,970,304	1,971,753,400,000	(4,805,429,696)	99.76%	Capaian IKU : 99.76

 (03) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,336,525,000		20,336,525,000	20,336,525,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	14,138,759,000		14,138,759,000	13,244,623,000	894,136,000	106.75%	LEBIH TERUMUMKAN
3	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	21,094,321,000		21,094,321,000	21,094,321,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	325156	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	18,809,471,000		18,809,471,000	18,809,471,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	225135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	15,234,749,000		15,234,749,000	15,234,749,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	065135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	21,461,321,000		21,461,321,000	21,461,321,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	449520	SETDITJEN PENGAWASAN SDKP	1,408,211,201,400	296,000,000	1,408,507,201,400	1,413,260,698,000	(4,753,496,600)	99.66%	KURANG TERUMUMKAN

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
8	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,703,883,000	148,800,000	16,852,683,000	16,852,683,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,599,397,000		18,599,397,000	18,599,397,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	215141	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,715,404,000		9,715,404,000	9,715,404,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	250263	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	7,494,664,000		7,494,664,000	7,617,665,000	(123,001,000)	98.39%	KURANG TERUMUMKAN
12	031665	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	15,532,133,000		15,532,133,000	15,477,487,000	54,646,000	100.35%	LEBIH TERUMUMKAN
13	245160	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	8,923,976,000		8,923,976,000	8,923,976,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	170445	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	9,681,302,000		9,681,302,000	9,681,302,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	355105	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,569,187,000		6,569,187,000	6,569,187,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			1,612,506,293,400	444,800,000	1,612,951,093,400	1,616,878,809,000	(3,927,715,600)	99.76%	Capaian IKU : 99.76

 (13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	18,787,046,000		18,787,046,000	18,787,046,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	726,519,000		726,519,000	726,519,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000		1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000		1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000		1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000		2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000		526,628,000	526,628,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000		2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000		942,893,000	942,893,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000		1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000		922,433,000	922,433,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,263,624,000		1,263,624,000	1,263,624,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,433,853,000		1,433,853,000	1,433,853,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,131,730,000		2,131,730,000	2,131,730,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	909,530,000	2,380,979,000	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TANJUNG PINANG	388,074,000		388,074,000	388,074,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000		872,480,000	872,480,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,377,763,000		23,377,763,000	23,377,763,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
19	440807	SEKRETARIAT BADAN KIPM DAN KHP	100,174,507,000		100,174,507,000	99,351,660,000	822,847,000	100.83%	LEBIH TERUMUMKAN
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000		228,306,000	228,306,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000		132,060,000	132,060,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000		264,756,000	264,756,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000		1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000		753,105,000	753,105,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	737,668,000		737,668,000	768,388,000	(30,720,000)	96.00%	KURANG TERUMUMKAN
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000		160,800,000	160,800,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000		574,268,000	574,268,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000		784,570,000	784,570,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	758,484,000		758,484,000	758,484,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000		493,789,000	493,789,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000		195,176,000	195,176,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000		380,500,000	380,500,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000		171,170,000	171,170,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000		978,651,000	978,651,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000		996,270,000	996,270,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000		903,509,000	903,509,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000		748,892,000	748,892,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	853,490,000		853,490,000	853,490,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000		390,073,000	390,073,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000		397,648,000	397,648,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000		1,284,545,000	1,284,545,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000		754,512,000	754,512,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000		833,020,000	833,020,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	444,470,000		444,470,000	444,470,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TANJUNG BALAI ASAHAN	656,615,000	69,720,000	726,335,000	726,335,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000		705,319,000	705,319,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000		1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			178,884,647,000	2,450,699,000	181,335,346,000	180,543,219,000	792,127,000	100.44%	Capaian IKU : 99.56

 (02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	02	INSPEKTORAT JENDERAL							
1	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	13,093,680,000		13,093,680,000	13,030,248,000	63,432,000	100.49%	LEBIH TERUMUMKAN
TOTAL			13,093,680,000	-	13,093,680,000	13,030,248,000	63,432,000	100.49%	Capaian IKU : 99.51



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I
TRIWULAN II TAHUN 2026



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II	5
PENGUMPULAN DATA SKM	5
2.1 Pelaksana SKM	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	6
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	6
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	7
BAB III	9
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	9
3.1 Jumlah Responden SKM	9
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	10
BAB IV	11
ANALISIS HASIL SKM	11
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	11
4.2 Rencana Tindak Lanjut	12
4.3 Tren Nilai SKM	13
BAB V	14
KESIMPULAN	14
LAMPIRAN	15
1. Kuisisioner SKM	15
2. Hasil Pengolahan Data SKM	16
3. Dokumentasi Pelaksanaan SKM.....	19
4. Surat Tugas Tim Pengelola SKM.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I (Balai Besar PPMHKP Surabaya I) sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Balai Besar PPMHKP Surabaya I. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/20> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kecepatan respon dari aplikasi** : Kecepatan respon dari aplikasi adalah kecepatan dari aplikasi layanan dalam membuka halaman, konten, pencarian informasi, mengunduh atau mengunggah file.
7. **Kemudahan dari aplikasi** : Kemudahan dari aplikasi adalah kemudahan dalam penggunaan fitur dari aplikasi layanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	April 2026	8
2.	Pengumpulan Data	April - Juni 2026	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2026	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni 2026	5

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan pada triwulan I tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam kurun waktu triwulan II tahun 2026 adalah sebanyak 125 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan dengan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan.

Tabel 1. Tabel Sampel Krejcie dan Morgan

TABEL SAMPEL KREJCIE DAN MORGAN

By : <http://teorionline.wordpress.com/>

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Source : Uma Sekaran, 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat, p. 159

Untuk jumlah populasi sebanyak 125 orang, maka penentuan jumlah sampelnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$S = \frac{\lambda^2 . N . P (1-P)}{d^2 (N-1) + \lambda^2 . P . (1-P)} \quad (2.1)$$

$$S = \frac{3.841 \cdot 125 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{(0.0025 \cdot 124) + (3.841 \cdot 0.5 \cdot 0.5)}$$

$$S = 95,83 \sim 96$$

, dimana: S = jumlah sampel

χ^2 = Nilai Chi Square tabel = 3,841, dimana df = taraf kesalahan
bisa 1% dan α = 5% atau 0,05

P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka P = 0.5
atau populasi menyebar normal)

N = Jumlah populasi

d = Tingkat toleransi kesalahan = 0,05

Berdasarkan rumus Tabel Krejcie and Morgan , jumlah minimum sampel responden SKM yang harus dikumpulkan dalam periode triwulan II tahun 2026 adalah 96 orang.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 182 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	135	74,17%
		Perempuan	47	25,83%
7,2	Usia	<25	41	22,53%
		25-45	111	60,99%
		46-60	30	16,48%
		>60	0	0
3	Pendidikan	SD	0	0
		SMP	1	0,55%
		SMA	76	41,75%
		D3	47	25,83%
		S1	57	31,32%
		S2	1	0,55%
		S3	0	0
4	Pekerjaan	ASN	0	0
		TNI/POLRI	0	0
		Pelaku Usaha KKP	22	12,1%
		Pegawai Swasta	151	82,95%
		Wirausaha Non KKP	5	2,75%
		Pelajar/Mahasiswa	4	2,1%

5	Jenis Layanan	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	10	5,49%
		Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	172	94,51%

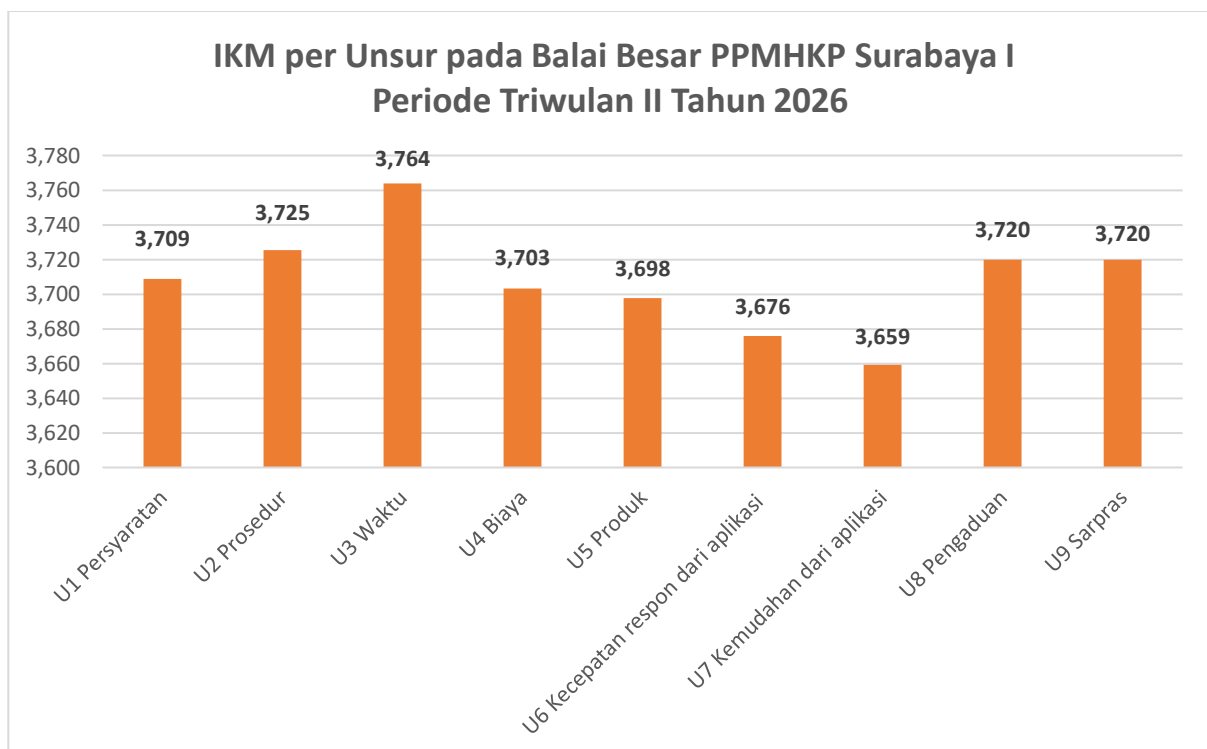
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Detail Indeks SKM per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.709	3.725	3.764	3.703	3.698	3.676	3.659	3.720	3.720
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3,708 (92,70 atau A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Indeks SKM Periode Triwulan II - 2026 per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah **Kemudahan dari aplikasi (U7)** mendapatkan nilai terendah yaitu 3,659, **Kecepatan respon dari aplikasi (U6)**, mendapatkan nilai terendah kedua yaitu 3,676. Sedangkan **Produk Spesifikasi Jenis Layanan (U5)** mendapatkan nilai terendah ketiga yaitu 3,698.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu **“Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)”** mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,720. Selanjutnya **“Sistem, mekanisme dan prosedur (U2)”** mendapatkan nilai 3,725 dan **“Waktu penyelesaian (U3)”** mendapatkan nilai yaitu 3,764.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Semoga semakin pagi saya datang ambil hasil jam 7an
- Pelayanan cepat dan mantap untuk P. Aris Jatmiko
- Pelayanan fast respon sangat baik
- Pelayanan p. Feri cepat dan mantap
- Mohon untuk memberikan info tidak dadakan, terima kasih
- Semoga kedepannya untuk pelayanannya semakin baik dan memudahkan pengguna jasa.
- Pelayanan the best. Bu Titin, Bu Rina, Pak budi, Pak Wahyu, Pak nuri, dkk. Terima kasih
- Pelayanan masyarakat aris cepat mantap
- Fasilitas sangat nyaman pegawai semua ramah dan sopan
- Petugas memberikan pelayanan yg sangat cepat dan professional
- Pak irwan good jobb
- Pelayanan sudah cukup baik, informasi terkait proses pelayanan juga cukup jelas. Mohon petugas untuk tetap mempertahankan pelayanan secara prima.
- Pelayanan konsultasi baik
- Untuk pelayanan sudah bagus, namun pada web ketika membuka halaman, konten dll kurang cepat
- Pelayanan baik dan cepat tanggap ketika kita membutuhkan.
- Sudah sesuai prosedur. Perlu ditingkatkan kembali

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kemudahan dari aplikasi perlu ditingkatkan lagi melalui pengembangan aplikasi SiapMutu secara berkala.

- Kecepatan respon dari aplikasi perlu ditingkatkan lagi melalui pemanfaatan teknologi baru dibidang IT yang dapat mendukung dan mempercepat kinerja aplikasi Siap Mutu.
- Produk Spesifikasi Jenis Layanan perlu dilakukan evaluasi berkala guna memastikan produk layanan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

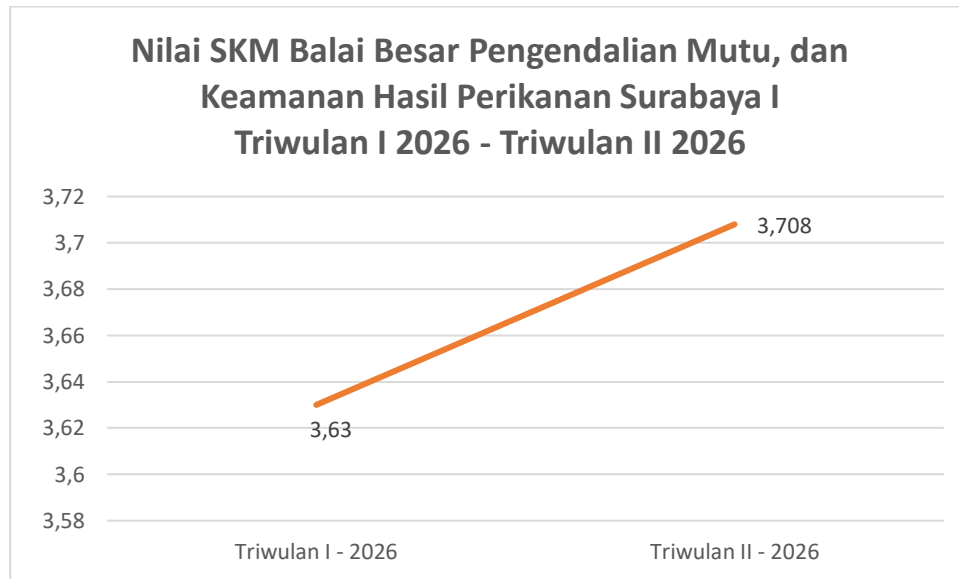
Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (2026)			Penanggung Jawab
			JULI	AUG	SEP	
1	Kemudahan dari aplikasi	Menyediakan fasilitas pendampingan langsung kepada pengguna layanan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi layanan	√			Tim IT, Katimja. Pengendalian MHKP dan Petugas <i>Front Office</i>
2	Kecepatan respon dari aplikasi	- Menyediakan mekanisme pelaporan gangguan (helpdesk) agar kendala yang dialami pengguna dapat ditindaklanjuti dengan cepat	√			Tim IT, Katimja. Pengendalian MHKP dan Petugas <i>Front Office</i>
3	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	- Melaksanakan evaluasi berkala terhadap Produk Spesifikasi Jenis Layanan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan regulasi yang berlaku	√			Tim IT, Katimja. Pengendalian MHKP dan Petugas <i>Front Office</i>

4.3 Tren Indeks SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan

kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Besar PPMHKP Surabaya I dapat dilihat melalui grafik berikut :



Grafik 1. Tren Indeks SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I TW. I 2026 – TW. II 2026

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan I - 2026 hingga triwulan II - 2026 pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan II mulai April hingga Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar PPMHKP Surabaya I, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan indeks SKM sebesar 3,708 (92,70). Tren indeks SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I menunjukkan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan I hingga triwulan II tahun 2026.
- 3. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan, antara lain yaitu : Kemudahan dari aplikasi , Kecepatan respon dari aplikasi dan Produk Spesifikasi Jenis Layanan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi adalah Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sistem, mekanisme dan prosedur serta Waktu penyelesaian.

Sidoarjo, 9 Juli 2026

Kapala Balai Besar PPMHKP Surabaya I,



Sr. Anggoro

NIP. 197207251995031001

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Apps

All Bookmarks

Survey Kepuasan Masyarakat

Unit : Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)

Data Responden

Waktu Survey

29-Jun-2026 10:57

Nama

Jenis Usaha

☐ Perseorangan

☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki

☐ Wanita/Perempuan

Usia

☐ < 25 Tahun

☐ 25 s/d 45 Tahun

☐ 46 s/d 60 Tahun

☐ > 60 Tahun

Pendidikan

☐ SD

☐ SMP

☐ SMA

☐ D3

☐ S1

☐ S2

☐ S3

Pekerjaan

☐ ASN

☐ TNI/POLRI

☐ Pelaku Usaha KKP

☐ Pegawai Swasta

☐ Wirausaha Non IKKP

☐ Pelajar / Mahasiswa

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat Cepat

☐ Cepat

☐ Kurang cepat

☐ Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/indak lanjut)?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (**sikap, keterampilan dan penampilan**)

Kritik dan Saran

*) Harus diisi minimal 3 kata

Submit Form

5 Petikan anda telah mengisi seluruh pertanyaan sebelum submit

2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUKUSAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I
PERIODE TRIWULAN II-2025

No.	Nama_Layanan	Jenis_Layanan	Jenis_Kategori	Uraian_Pelayanan	Pendidikan	Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Keterangan	Nilai_per_Jenis_Layanan	NRR_per_Jenis_Layanan
1	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	96,11
2	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	P	05	D3	swasta	3	4	4	3	4	4	3	4	4	---	94,67	
3	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	05	S1	swasta	4	3	4	4	4	4	3	4	3	sudah sangat cepat dan baik pelayanan nya	94,67	
4	layanan baliqi mutupodut perikanan	P	L	25-45	SMA	swasta	3	4	4	3	4	4	3	3	3	salah satu dari layanan	86,11	
5	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga semua baliqi saya datang nanti hari jam 7-an	100,00	
6	layanan baliqi mutupodut perikanan	P	L	46-60	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat bagus sekali	100,00	
7	layanan baliqi mutupodut perikanan	P	L	46-60	SMA	swasta	4	4	4	3	4	4	4	4	4	sangat bagus sekali	97,22	
8	layanan baliqi mutupodut perikanan	P	L	46-60	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat bagus sekali	100,00	
9	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	P	25-45	D3	swasta	4	4	3	4	4	4	4	3	4	kualitas layanan sudah sangat baik, mohon untuk dipertahankan. Terimakasih	94,44	
10	layanan baliqi mutupodut perikanan	P	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semua sudah sesuai standar, dan harus dipertahankan	100,00	

31	layanan baliqi mutupodut perikanan	P	L	05	S1	petajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi sangat baik dan cepat	100,00	96,11
32	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	46-60	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
33	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	35-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
34	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
35	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
36	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
37	layanan baliqi mutupodut perikanan	P	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
38	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	46-60	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
39	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
40	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
41	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
42	layanan baliqi mutupodut perikanan	P	P	05	D3	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
43	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
44	layanan baliqi mutupodut perikanan	P	P	05	D3	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
45	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
46	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
47	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
48	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
49	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
50	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
51	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
52	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
53	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
54	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
55	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
56	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
57	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
58	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
59	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
60	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
61	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
62	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
63	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
64	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
65	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
66	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
67	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
68	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
69	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
70	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
71	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
72	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
73	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
74	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
75	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
76	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
77	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
78	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
79	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	
80	layanan baliqi mutupodut perikanan	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	layanan baliqi forum sangat mudah dan cepat	100,00	

[illegible]

92,51

149	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	P	D5	D3	F. I. KEP	3	3	4	4	3	2	3	4	3	utuh pelayanan sudah bagus, namun pada waktu ketika menerima keluhan, respon di kurang cepat	80,56
150	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	SMA	F. I. KEP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat bagus dan mudah, tinggal diinformasikan dan diinformasikan	100,00
151	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	SMA	F. I. KEP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat baik, di perhalus dan diinformasikan	100,00
152	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	P	25-45	S2	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	sangat puas dan tetap di pertahankan	75,00
153	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	46-60	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terima kasih banyak, kerja yang sangat bagus dan penyelesaian yang sangat puas cepat	100,00
154	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	L	25-45	SMA	swasta	3	4	4	4	4	3	3	4	4	masih baik bagus	91,67
155	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	D5	S1	swasta	3	3	3	4	3	3	4	3	3	sudah baik, semoga pelayanan semakin baik	80,56
156	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	D5	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat oke sekali	100,00
157	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bagus bagus bagus	100,00
158	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	3	3	3	4	3	3	Baik scope dan lain	86,11
159	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat amat rapi dan baik	100,00
160	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tetap di pertahankan	100,00
161	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	P	D5	D3	swasta	4	4	4	4	4	4	4	3	4	sudah sangat sesuai	97,22
162	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	P	D5	S1	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Terima kasih banyak bantunya	75,00
163	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	46-60	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah cukup baik	100,00
164	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	P	D5	S1	swasta	3	4	4	3	3	4	3	3	3	Pelayanan sangat baik, terima kasih	86,11
165	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	P	D5	SMA	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	pelayanan cukup baik	75,00
166	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	L	25-45	SMA	swasta	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan baik dan cepat tanggap ketika ada keluhan	97,22
167	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	L	D5	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat puas dengan pelayanan	100,00
168	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Masa Syukur Allah	100,00
169	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Baik dan di tingkatkan	97,22
170	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	P	25-45	D3	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pertahanan dan terimakasih atas pelayanan sudah di berikan dengan baik	100,00
171	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan memuaskan	100,00
172	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	46-60	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tingkatkan terus pelayanan	100,00
173	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	D3	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat memuaskan sekali	100,00
174	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jose Jose	100,00
175	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	D3	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat bagus sekali	100,00
176	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	D5	SMP	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat baik dan cepat	100,00
177	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	D5	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan pelayanannya cepat	100,00
178	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	P	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	3	3	4	4	sangat baik sekali	94,44
179	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	L	46-60	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat baik ramah dan cepat	100,00
180	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	S1	swasta	3	3	3	3	3	3	2	3	3	sudah sesuai prosedur, perlu di tingkatkan kembali	72,22
181	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	K	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat puas sekali	100,0
182	Sertifikasi Mutu dan Keimanan Hasil Pertanian (SMKH)	P	L	25-45	D3	swasta	4	3	4	3	4	4	4	3	3	pengawasan berisikan pelayanan yg sangat memuaskan	88,9
Jumlah Nilai per unsur							675	678	685	674	673	660	666	677	677		
RATA-RATA PER UNSUR							3,709	3,725	3,764	3,703	3,698	3,676	3,629	3,720	3,720		
NILAI INDEKS PER UNSUR							100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000		
NILAI SKM							92,70										
INDEKS KEPUKASAN MASYARAKAT (IKM)							3,708										

SANGAT BAIK

92,70 (3,708)

92,70

3,708

SANGAT BAIK

92,70 (3,708)

NO	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,0000 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

KODE	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		INDEKS KONVERSI	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan		A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian		A	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif		A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		A	Sangat Baik
U6	Kecepatan respon dari aplikasi		B	Baik
U7	Kemudahan dari aplikasi		A	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana		A	Sangat Baik

3. Dokumentasi Pelaksanaan SKM



4. Surat Tugas Tim Pengelola SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I

JALAN RAYA BANDARA IR.H.JUANDA NOMOR 23 SIDOARJO, 61254 JAWA TIMUR
TELEPON (031) 8688099/8688118 , FAKSIMILE (031) 8678471
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bbppmhkp.sby1@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.1434/BKIPM.SBY.I/KP.440/IV/2026

Menimbang : Sehubungan dengan adanya pembaharuan pemetaan tugas pegawai di lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I, maka perlu dilakukan Perubahan Kesatu atas Surat Tugas Tim SKM dan Penerapan *Rewards* Tahun 2026 di lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I;

Dasar : 1. Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 57/KEP-BKIPM/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian *Rewards/Punishment* Pada Unit Pelayanan Publik BKIPM;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Memberi Tugas :

Kepada : TERLAMPIR

Untuk : 1. menjadi Pengarah, Penanggungjawab, Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim SKM dan Penerapan *Rewards* Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. melaksanakan kegiatan SKM dan Penerapan *Rewards* di Balai Besar PPMHKP Surabaya I selama tahun 2026;
3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan;

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Sidoarjo, 1 April 2026

Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I,



Lampiran I Surat Tugas

Nomor : B.1434/BKIPM.SBY.I/KP.440/IV/2026

Tanggal : 1 April 2026

**PERUBAHAN KESATU SUSUNAN TIM SKM DAN PENERAPAN *REWARDS*
LINGKUP BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I
TAHUN 2026**

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Sri Anggoro, S.P., M.M. NIP. 19720725 199503 1 001	Pengarah / Penanggung jawab	Memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan SKM dan Penerapan <i>Rewards</i>
2	Eny Susilowati, S.Si., M.Ling. NIP. 19800721 200801 2 026	Ketua	Mengendalikan terlaksananya kegiatan SKM dan Penerapan <i>Rewards</i> agar berjalan sesuai ketentuan
3	Iin Widya Astuti, S.Si. NIP. 197903132009012002	Sekretaris / Anggota	1. Merekapitulasi data hasil SKM dan Penerapan <i>Rewards</i> 2. Menyusun konsep Laporan Hasil Pelaksanaan SKM dan Penerapan <i>Rewards</i> 3. Menyusun konsep Laporan Tindak Lanjut Hasil SKM dan Penerapan <i>Rewards</i>
4	Rachmat Noer Soelistyoadi, S.Pi., M.P. NIP. 197803172005021001	Anggota	1. Menganalisa konsep Lapoan Hasil Pelaksanaan SKM dan Penerapan <i>Rewards</i> 2. Merumuskan Tindak Lanjut Hasil SKM dan Penerapan <i>Rewards</i>
5	Puji Sugeng Ariadi, S.Pi., M.Ling. NIP. 198307122005021001		
6	Suswanto, S.Pi, M.H NIP. 19730607 200604 1 014	Anggota	1. Menyampaikan Kuisisioner SKM dan Penerapan <i>Rewards</i> kepada UPI pengguna layanan SMKHP 2. Memastikan UPI telah mengisi Kuisisioner SKM dan Penerapan <i>Rewards</i> dengan baik dan benar
7	Kristina Natalia, S.Pi, M.Biotek NIP. 19830413 200502 2 001		
8	Reddy Dwi Pradipta Wardhana, S.Pi NIP. 19861106 201001 1 010		
9	Farid Mangku Alam, S.Pi NIP. 19811127 201101 1 009		
10	Susanto Adi Saputro, A.Md NIP. 19870111 200901 1 001		
11	Medya Putra, S. Pi NIP. 19780529 200312 1 002		
12	Aris Jatmiko, S.Si. NIP. 19910827 201503 1 001		
13	Ayuda Dyah Nurekawati, S.Pi, M.Si NIP. 19770821 200212 2 002		
14	Muhammad Ferry Mauludi NIP. 198709032025211047		

15	Ahmad Arum, S.St.Pi NIP. 19850402 201012 1 003		
16	Budhi Prihanta, S.Pi NIP. 19710426 200003 1 006		
17	Wahyu Jatmiko Purwono, A.Md NIP. 19780603 200312 1 001		
18	Galih Bayu Widya Laksana, A.Md NIP. 19820927 200502 1 002		
19	Ririn Rizqiyah, A.Md, S.Pi NIP. 19780728 200312 2 005	Anggota	1. Menyampaikan Kuisisioner SKM dan Penerapan <i>Rewards</i> kepada UPI pengguna layanan Uji Laboratorium 2. Memastikan UPI telah mengisi Kuisisioner SKM dan Penerapan <i>Rewards</i> dengan baik dan benar
20	Rosmawati Rahayu, A.Md.Pi NIP. 19791015 200312 2 011		
21	Yustina Novianti, A.Md NIP. 19800415 200502 2 001		
22	Rachmad Hidayat, S.Si. NIP. 19851225 201012 1 002		
23	Ria Ratnasari, A.Md. NIP. 19820513 200604 2 003		
24	Hilaliatul Aini, A.Md NIP. 19961111 201902 2 005		
25	Mahfudin, S.Pi., M.Si. NIP. 19891106 201902 1 007		
26	Eka Anis Rhofita, S.Kom NIP. 19831214 200901 2 003	Anggota	1. Desain <i>Flyer</i> hasil SKM dan Penerapan <i>Rewards</i> 2. Mempublikasikan hasil SKM dan Penerapan <i>Rewards</i> pada website dan sosmed Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Sidoarjo, 1 April 2026

Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I,



Sri Anggoro

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Triwulan I Tahun 2026**



**Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I**

**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I (Balai Besar PPMHKP Surabaya I) perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat oleh Balai Balai Besar PPMHKP Surabaya I periode triwulan I tahun 2026 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan I Tahun 2026

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	91,73	A
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	90,79	A
3	Waktu Penyelesaian	90,60	A
4	Biaya /Tarif	92,11	A
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,79	A
6	Kompetensi Pelaksana	88,91	A
7	Perilaku Pelaksana	89,66	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	91,35	A
9	Sarana dan Prasarana	90,79	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (2026)			Penanggung Jawab
			APR	MEI	JUNI	
1	U6 – Kecepatan respon dari aplikasi	Menyediakan petugas dan sarana <i>Helpdesk</i> untuk membantu pengguna layanan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi layanan	√			Katimja. Pengendalian MHKP dan Katimja. Penerapan Standar & Metode Uji Mutu MHKP
2	U7- Kemudahan dari aplikasi	Memberikan pendampingan langsung kepada pengguna layanan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi layanan	√			Tim IT, Katimja. Pengendalian MHKP dan Petugas <i>Front Office</i>
3	U9 – Waktu Penyelesaian	Melakukan monitoring waktu layanan internal dengan <i>spreadsheet</i>	√			Tim IT, Katimja. Pengendalian MHKP, Katimja. Pengawasan MHKP dan Katimja. Penerapan Standar & Metode Uji Mutu MHKP

BAB III

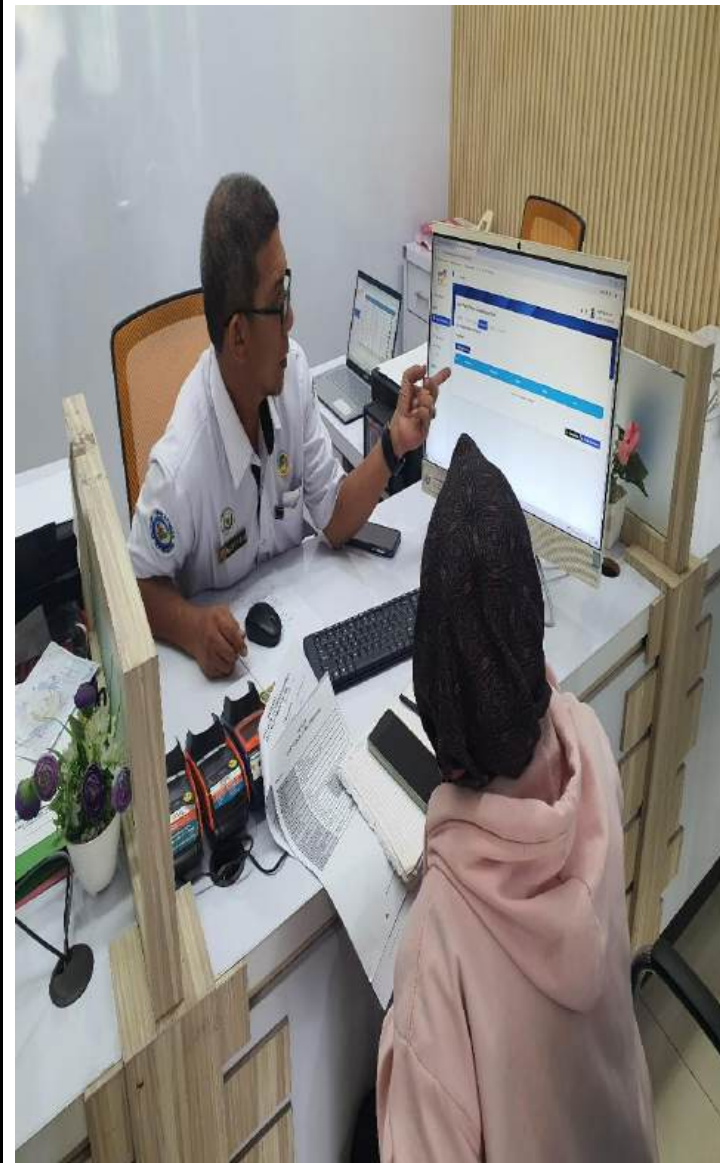
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

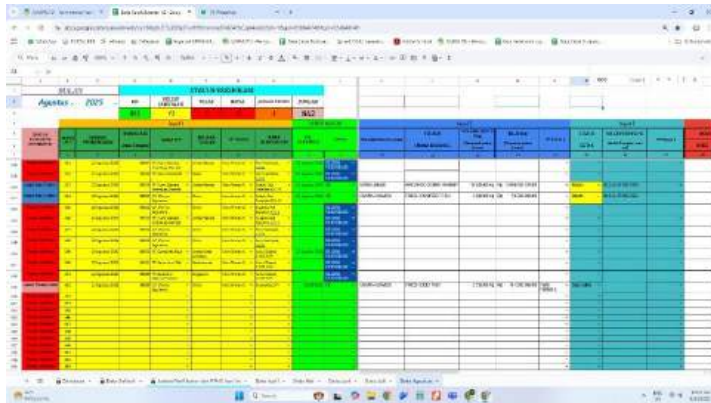
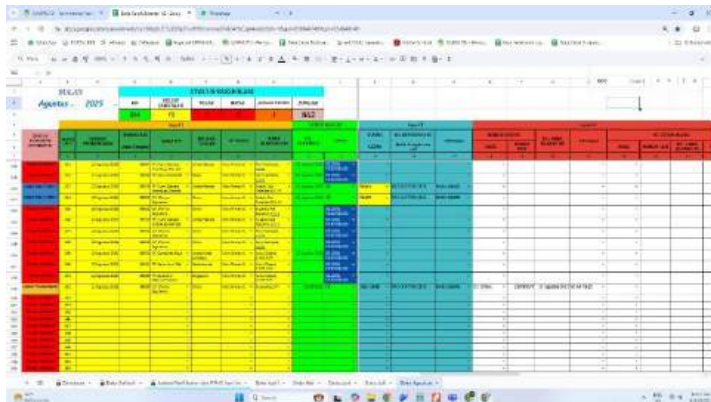
Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	Menyediakan petugas dan sarana <i>Helpdesk</i> untuk membantu pengguna layanan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi layanan	Sudah	Sebagai salah satu bentuk implementasi komitmen penyelenggaraan “Pelayanan Prima”, Balai Besar PPMHKP Surabaya I menyediakan fasilitas petugas dan sarana “ <i>Helpdesk</i> ” guna memberikan informasi terkait prosedur, persyaratan, alur layanan, dan penggunaan aplikasi secara aktual kepada pengguna layanan		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

No	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
2	Memberikan pendampingan langsung kepada pengguna layanan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi layanan	Sudah	Katimja. Pengendalian MHKP bersama Tim IT dan Petugas <i>Front Office</i> balai Besar PPMHKP Surabaya I siap melakukan pendampingan guna membantu pengguna layanan yang mengalami kesulitan dalam mengakses atau menggunakan sistem/aplikasi layanan serta membantu menangani atau mengarahkan penyelesaian masalah teknis yang dialami pengguna layanan baik secara langsung maupun melalui koordinasi dengan tim terkait.		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan





No	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
3	Melakukan monitoring waktu layanan internal dengan <i>spreadsheet</i>	Sudah	Tim Pelayanan Publik bersama Tim IT telah berhasil merancang sistem monitoring internal terhadap proses pelayanan SMKHP di Balai Besar PPMHKP Surabaya I dengan memanfaatkan aplikasi <i>Google Spreadsheet</i>	 	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

[illegible]

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Balai Besar PPMHKP Surabaya I telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Menyediakan petugas dan sarana <i>Helpdesk</i> untuk membantu pengguna layanan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi layanan	Aktif memantau setiap pertanyaan, keluhan dan/atau saran yang masuk melalui saluran “Helpdesk” Balai Besar PPMHKP Surabaya I	+/- 3 bulan	Petugas “ <i>Helpdesk</i> ” dan Petugas <i>Front Office</i>	PT. Telkomsel
2	Memberikan pendampingan langsung kepada pengguna layanan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi layanan	Siap setiap saat memberikan pendampingan bagi pengguna layanan yang mengalami kesulitan dalam mengakses atau menggunakan sistem/aplikasi layanan serta membantu menangani atau mengarahkan penyelesaian masalah teknis yang dialami pengguna layanan baik secara langsung maupun melalui koordinasi dengan tim terkait.	+/- 3 bulan	Katimja. Pengendalian MHKP, Tim IT dan Petugas <i>Front Office</i>	Seluruh pengguna layanan dan masyarakat

3	Melakukan monitoring waktu layanan internal dengan <i>spreadsheet</i>	Memastikan seluruh petugas pelayanan mampu mengoperasikan dan aktif memantau <i>spreadsheet</i> "Data Cetak Bulanan"	+/- 3 bulan	Katimja. Pengendalian MHKP, Tim IT dan Petugas Layanan	Petugas Layanan Balai Besar PPMHKP Surabaya I
---	---	--	-------------	--	---



Sidoarjo, 14 April 2026

Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I,

Sri Anggoro, S.P., M.M.

NIP. 197207251995031001

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM SURABAYA I
TRIWULAN II TAHUN 2026

Nama Kegiatan	Sasaran	:	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I
Nama Kinerja Kegiatan (IKK)	Indikator	:	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm I	Q3	Q4	Sm II	Tahunan		
Target (%)	89	89	89						89
Realisasi	90.71	92.70	91.71						
% Capaian	101.92	104.15	103.04						

Catatan:

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan 4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Deskripsi

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>
- Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Kriteria dan Bobot Penilaian:

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/20> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kecepatan respon dari aplikasi : Kecepatan respon dari aplikasi adalah kecepatan dari aplikasi layanan dalam membuka halaman, konten, pencarian informasi, mengunduh atau mengunggah file.
7. Kemudahan dari aplikasi : Kemudahan dari aplikasi adalah kemudahan dalam penggunaan fitur dari aplikasi layanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

CARA PENGUKURAN

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terisi}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $\text{IKM unit pelayanan} \times 25$

Capaian IKK:

Mengacu Surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan PerikananKepala ke UPT BPPMHKP **No. 1955/BPPMHK.1/HM.450/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026 mengenai Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan II** dapat disimpulkan bahwa Nilai Capaian IKU UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I sebesar 92.70 % Nilai IKU UPT tersebut sudah melebihi target nilai IKU UPT yang ditetapkan yaitu 89%.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
• Untuk dapat memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasa Mutu Pascapanen  Eny Susilowati, S.Si, M.Ling NIP. 19800721 200801 2 026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	: 1955/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2026	09 Juli 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026	

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan II tahun 2026 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Target nilai SKM yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2026 adalah 89 sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 masing-masing OP lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian hasil validasi SKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 2290/SJ.8/TU.140/VII/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan periode Triwulan II Tahun 2026 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh OP BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2026 adalah **96,67** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,87** dan mutu pelayanan diperoleh “A” kategori “**Sangat Baik**”. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.001 (tiga ribu satu) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah OP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori “**Sangat Baik**” tercatat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) atau seluruh OP lingkup BPPMHKP.
3. Hasil SKM berdasarkan rekap per produk layanan mendapatkan kategori “**Sangat Baik**” tercatat sebanyak 13 (tiga belas) produk layanan atau seluruh produk layanan lingkup BPPMHKP.

4. Rekapitulasi per unsur layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai SKM	Indeks
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	97,11	3,88
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	96,77	3,87
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	96,79	3,87
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	96,62	3,86
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,90	3,88
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	96,03	3,84
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	96,11	3,84
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,90	3,88
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	96,77	3,87

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana) dan U4 (Biaya/Tarif Pelayanan).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala OP untuk dapat memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh OP masing-masing.
6. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh OP lingkup BPPMHKP yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan baik dan penuh tanggung jawab. Partisipasi aktif serta komitmen yang telah ditunjukkan dalam penyelenggaraan survei ini menjadi kontribusi penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 1955/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2026

Tanggal : 09 Juli 2026

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP)
lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026

NO	OP	INDEKS DAN NILAI PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	27	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	11	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Stasiun PPMHKP Tahuna	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	2	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	3,99	3,99	3,99	4,00	99,90	A	Sangat Baik	142	Online
		99,82	100,00	99,82	100,00	100,00	100,00	99,82	99,82	99,82						
5	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	99,90	A	Sangat Baik	27	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,07	100,00	100,00	100,00						
6	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	3,98	3,98	3,98	4,00	3,98	4,00	3,98	3,98	3,99	99,72	A	Sangat Baik	59	Online
		100,00	99,58	99,58	99,58	100,00	99,58	100,00	99,58	99,58						
7	Balai PPMHKP Jayapura	3,88	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,99	99,65	A	Sangat Baik	8	Online
		96,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,98	3,98	3,97	3,98	3,98	3,98	3,98	3,97	3,98	99,57	A	Sangat Baik	64	Online
		100,00	99,61	99,61	99,22	99,61	99,61	99,61	99,61	99,22						
9	Stasiun PPMHKP Ternate	3,96	3,98	3,98	3,98	3,98	3,96	3,96	3,96	3,96	3,97	99,25	A	Sangat Baik	52	Online
		99,04	99,52	99,52	99,52	99,52	99,04	99,04	99,04	99,04						
10	Balai PPMHKP Surabaya II	4,00	3,99	3,99	3,99	3,99	3,90	3,85	3,99	3,99	3,97	99,16	A	Sangat Baik	119	Online
		100,00	99,79	99,79	99,79	99,79	97,48	96,22	99,79	99,79						
11	Balai PPMHKP Makassar	3,96	3,97	3,97	3,96	3,97	3,95	3,96	3,96	3,96	3,96	99,08	A	Sangat Baik	363	Online
		99,04	99,24	99,17	99,10	99,24	98,83	99,10	99,04	98,97						
12	Balai PPMHKP Ambon	3,97	3,97	3,93	3,97	3,96	3,95	3,96	3,97	3,96	3,96	99,00	A	Sangat Baik	100	Online
		99,25	99,25	98,25	99,25	99,00	98,75	99,00	99,25	99,00						
13	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,97	3,96	3,97	3,94	3,96	3,94	3,94	3,95	3,96	3,95	98,86	A	Sangat Baik	234	Online
		99,15	98,93	99,25	98,50	98,93	98,50	98,61	98,82	99,04						
14	Stasiun PPMHKP Pontianak	4,00	4,00	3,99	4,00	4,00	3,89	3,88	3,89	3,89	3,95	98,72	A	Sangat Baik	74	Online
		100,00	100,00	99,66	100,00	100,00	97,30	96,96	97,30	97,30						
15	Balai PPMHKP	3,92	3,92	3,86	3,92	3,94	3,93	3,91	3,94	3,95	3,92	98,00	A	Sangat Baik	111	Online

	Tanjung Pinang	97,97	97,97	96,62	97,97	98,42	98,20	97,75	98,42	98,65						
16	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,96	3,92	3,96	3,88	3,96	3,85	3,88	3,92	3,88	3,91	97,86	A	Sangat Baik	26	Online
		99,04	98,08	99,04	97,12	99,04	96,15	97,12	98,08	97,12						
17	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	3,93	4,00	3,87	3,87	3,93	3,93	3,87	3,93	3,87	3,91	97,78	A	Sangat Baik	15	Online
		98,33	100,00	96,67	96,67	98,33	98,33	96,67	98,33	96,67						
18	Stasiun PPMHKP Cirebon	3,93	3,92	3,93	3,94	3,91	3,83	3,86	3,90	3,90	3,90	97,56	A	Sangat Baik	115	Online
		98,26	98,04	98,26	98,48	97,83	95,65	96,52	97,39	97,61						
19	Stasiun PPMHKP Medan II	3,91	3,92	3,89	3,92	3,92	3,88	3,88	3,92	3,88	3,90	97,53	A	Sangat Baik	64	Online
		97,66	98,05	97,27	98,05	98,05	96,88	96,88	98,05	96,88						
20	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,91	3,83	3,91	3,87	3,91	3,91	3,91	3,96	3,87	3,90	97,46	A	Sangat Baik	23	Online
		97,83	95,65	97,83	96,74	97,83	97,83	97,83	98,91	96,74						
21	Stasiun PPMHKP Bima	4,00	4,00	4,00	3,50	3,83	3,83	4,00	4,00	3,83	3,89	97,22	A	Sangat Baik	6	Online
		100,00	100,00	100,00	87,50	95,83	95,83	100,00	100,00	95,83						
22	Stasiun PPMHKP Sorong	3,90	3,94	3,81	3,87	3,84	3,84	3,87	3,87	3,90	3,87	96,77	A	Sangat Baik	31	Online
		97,58	98,39	95,16	96,77	95,97	95,97	96,77	96,77	97,58						
23	Balai PPMHKP Mataram	3,84	3,84	3,87	3,90	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	96,68	A	Sangat Baik	31	Online
		95,97	95,97	96,77	97,58	96,77	96,77	96,77	96,77	96,77						
24	Stasiun PPMHKP Kendari	3,96	3,89	3,89	3,71	3,86	3,86	3,82	3,82	3,93	3,86	96,53	A	Sangat Baik	28	Online
		99,11	97,32	97,32	92,86	96,43	96,43	95,54	95,54	98,21						
25	Stasiun PPMHKP Aceh	3,90	3,80	3,80	3,90	3,90	3,80	3,80	3,90	3,80	3,84	96,11	A	Sangat Baik	10	Online
		97,50	95,00	95,00	97,50	97,50	95,00	95,00	97,50	95,00						
26	Balai PPMHKP Denpasar	3,87	3,83	3,81	3,82	3,81	3,84	3,84	3,83	3,86	3,83	95,87	A	Sangat Baik	154	Online
		96,75	95,78	95,13	95,62	95,29	95,94	96,10	95,78	96,43						
27	Stasiun PPMHKP Bandung	3,83	3,92	3,92	3,83	3,75	3,83	3,75	3,83	3,83	3,83	95,83	A	Sangat Baik	12	Online
		95,83	97,92	97,92	95,83	93,75	95,83	93,75	95,83	95,83						
28	Balai PPMHKP Medan I	3,87	3,85	3,85	3,87	3,85	3,81	3,83	3,83	3,70	3,83	95,70	A	Sangat Baik	53	Online
		96,70	96,23	96,23	96,70	96,23	95,28	95,75	95,75	92,45						
29	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	3,72	3,83	3,72	3,78	3,83	3,83	3,94	3,83	3,89	3,82	95,52	A	Sangat Baik	18	Online
		93,06	95,83	93,06	94,44	95,83	95,83	98,61	95,83	97,22						
30	Stasiun PPMHKP Kupang	3,83	3,80	3,80	3,78	3,82	3,83	3,83	3,82	3,82	3,81	95,35	A	Sangat Baik	157	Online
		95,70	95,06	95,06	94,59	95,38	95,70	95,86	95,38	95,38						
31	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,75	4,00	4,00	3,75	3,50	3,50	3,75	3,81	95,14	A	Sangat Baik	4	Online
		100,00	100,00	93,75	100,00	100,00	93,75	87,50	87,50	93,75						
32	Balai PPMHKP	3,82	3,81	3,78	3,78	3,81	3,78	3,77	3,81	3,80	3,80	94,93	A	Sangat Baik	74	Online

	Jakarta	95,61	95,27	94,59	94,59	95,27	94,59	94,26	95,27	94,93						
33	Balai PPMHKP Semarang	3,78	3,78	3,83	3,82	3,83	3,70	3,75	3,82	3,82	3,79	94,74	A	Sangat Baik	76	Online
		94,41	94,41	95,72	95,39	95,72	92,43	93,75	95,39	95,39						
34	Balai PPMHKP Balikpapan	3,78	3,63	3,90	3,61	3,85	3,46	3,63	4,00	4,00	3,76	94,11	A	Sangat Baik	41	Online
		94,51	90,85	97,56	90,24	96,34	86,59	90,85	100,00	100,00						
35	Balai Uji Standar PPMHKP Jakarta	3,80	3,78	3,72	3,73	3,77	3,72	3,73	3,77	3,78	3,76	93,88	A	Sangat Baik	74	Online
		94,93	94,59	92,91	93,24	94,26	92,91	93,24	94,26	94,59						
36	Stasiun PPMHKP Palembang	3,78	3,72	3,72	3,69	3,75	3,75	3,78	3,81	3,67	3,74	93,52	A	Sangat Baik	36	Online
		94,44	93,06	93,06	92,36	93,75	93,75	94,44	95,14	91,67						
37	Balai PPMHKP Lampung	3,83	3,76	3,65	3,65	3,76	3,74	3,72	3,76	3,72	3,73	93,30	A	Sangat Baik	46	Online
		95,65	94,02	91,30	91,30	94,02	93,48	92,93	94,02	92,93						
38	Balai PPMHKP Entikong	3,78	3,69	3,77	3,64	3,71	3,71	3,68	3,73	3,79	3,72	93,06	A	Sangat Baik	90	Online
		94,44	92,22	94,17	91,11	92,78	92,78	91,94	93,33	94,72						
39	Balai PPMHKP Manado	3,71	3,79	3,64	3,71	3,71	3,68	3,79	3,75	3,68	3,72	92,96	A	Sangat Baik	28	Online
		92,86	94,64	91,07	92,86	92,86	91,96	94,64	93,75	91,96						
40	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	3,71	3,73	3,76	3,70	3,70	3,68	3,66	3,72	3,72	3,71	92,70	A	Sangat Baik	182	Online
		92,72	93,13	94,09	92,58	92,45	91,90	91,48	92,99	92,99						
41	Stasiun PPMHKP Mamuju	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,83	3,67	3,67	3,69	92,13	A	Sangat Baik	6	Online
		91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	95,83	91,67	91,67						
42	Pusat Manajemen Mutu	3,72	3,67	3,56	3,67	3,78	3,56	3,50	3,78	3,67	3,65	91,36	A	Sangat Baik	18	Online
		93,06	91,67	88,89	91,67	94,44	88,89	87,50	94,44	91,67						
43	Stasiun PPMHKP Jambi	3,73	3,64	3,73	3,91	3,61	3,52	3,45	3,70	3,61	3,65	91,33	A	Sangat Baik	33	Online
		93,18	90,91	93,18	97,73	90,15	87,88	86,36	92,42	90,15						
44	Balai PPMHKP Tarakan	3,66	3,69	3,66	3,69	3,66	3,59	3,63	3,63	3,61	3,64	91,10	A	Sangat Baik	64	Online
		91,41	92,19	91,41	92,19	91,41	89,84	90,63	90,63	90,23						
45	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	3,65	3,69	3,58	3,58	3,69	3,62	3,62	3,54	3,65	3,62	90,60	A	Sangat Baik	26	Online
		91,35	92,31	89,42	89,42	92,31	90,38	90,38	88,46	91,35						
46	Stasiun PPMHKP Batam	3,70	3,46	3,71	3,71	3,64	3,54	3,48	3,71	3,64	3,62	90,58	A	Sangat Baik	56	Online
		92,41	86,61	92,86	92,86	91,07	88,39	87,05	92,86	91,07						
47	Stasiun PPMHKP Merauke	3,55	3,55	3,55	3,64	3,73	3,64	3,55	3,64	3,64	3,61	90,15	A	Sangat Baik	11	Online
		88,64	88,64	88,64	90,91	93,18	90,91	88,64	90,91	90,91						

**Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan
lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026**

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS DAN NILAI PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
1	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00
2	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	2129	3,91	3,90	3,91	3,90	3,90	3,88	3,88	3,90	3,91	3,90	97,48	A	Sangat Baik	
			97,84	97,48	97,72	97,52	97,58	96,94	97,01	97,57	97,64					
3	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	8	4,00	4,00	3,88	3,88	4,00	3,75	3,75	3,88	3,88	3,89	97,22	A	Sangat Baik	
			100,00	100,00	96,88	96,88	100,00	93,75	93,75	96,88	96,88					
4	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	13	3,92	3,92	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	4,00	3,85	3,88	97,01	A	Sangat Baik	
			98,08	98,08	96,15	96,15	96,15	96,15	96,15	100,00	96,15					
5	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	50	3,84	3,82	3,80	3,80	3,84	3,88	3,88	3,86	3,82	3,84	95,94	A	Sangat Baik	
			96,00	95,50	95,00	95,00	96,00	97,00	97,00	96,50	95,50					
6	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	104	3,88	3,85	3,83	3,85	3,85	3,81	3,78	3,87	3,83	3,84	95,89	A	Sangat Baik	
			96,88	96,15	95,67	96,15	96,15	95,19	94,47	96,63	95,67					
7	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	366	3,82	3,83	3,80	3,78	3,83	3,78	3,79	3,82	3,81	3,81	95,15	A	Sangat Baik	
			95,56	95,77	94,95	94,60	95,77	94,40	94,67	95,49	95,15					
8	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	5	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	95,00	A	Sangat Baik	
			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00					95,00
9	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)	200	3,80	3,81	3,78	3,77	3,82	3,75	3,76	3,83	3,81	3,79	94,75	A	Sangat Baik	
			95,00	95,13	94,50	94,25	95,38	93,75	93,88	95,75	95,13					
10	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	79	3,72	3,65	3,73	3,71	3,68	3,58	3,62	3,66	3,63	3,67	91,63	A	Sangat Baik	
			93,04	91,14	93,35	92,72	92,09	89,56	90,51	91,46	90,82					
11	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>)	18	3,72	3,67	3,56	3,67	3,78	3,56	3,50	3,78	3,67	3,65	91,36	A	Sangat Baik	
			93,06	91,67	88,89	91,67	94,44	88,89	87,50	94,44	91,67					
12	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>	17	3,76	3,71	3,59	3,65	3,65	3,59	3,59	3,65	3,65	3,65	91,18	A	Sangat Baik	
			94,12	92,65	89,71	91,18	91,18	89,71	89,71	91,18	91,18					
13	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	11	3,64	3,45	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	88,64	A	Sangat Baik	
			90,91	86,36	88,64	88,64	88,64	88,64	88,64	88,64	88,64					
Seluruh Layanan BPPMHKP			3001	3,88	3,87	3,87	3,86	3,88	3,84	3,84	3,88	3,87	96,67	3,87	A	Sangat Baik
				97,11	96,77	96,79	96,62	96,90	96,03	96,11	96,90	96,77				



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	: 1955/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2026	09 Juli 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026	

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan II tahun 2026 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Target nilai SKM yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2026 adalah 89 sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 masing-masing OP lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian hasil validasi SKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 2290/SJ.8/TU.140/VII/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan periode Triwulan II Tahun 2026 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh OP BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2026 adalah **96,67** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,87** dan mutu pelayanan diperoleh “A” kategori “**Sangat Baik**”. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.001 (tiga ribu satu) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah OP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori “**Sangat Baik**” tercatat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) atau seluruh OP lingkup BPPMHKP.
3. Hasil SKM berdasarkan rekap per produk layanan mendapatkan kategori “**Sangat Baik**” tercatat sebanyak 13 (tiga belas) produk layanan atau seluruh produk layanan lingkup BPPMHKP.

4. Rekapitulasi per unsur layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai SKM	Indeks
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	97,11	3,88
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	96,77	3,87
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	96,79	3,87
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	96,62	3,86
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,90	3,88
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	96,03	3,84
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	96,11	3,84
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,90	3,88
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	96,77	3,87

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana) dan U4 (Biaya/Tarif Pelayanan).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala OP untuk dapat memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh OP masing-masing.
6. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh OP lingkup BPPMHKP yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan baik dan penuh tanggung jawab. Partisipasi aktif serta komitmen yang telah ditunjukkan dalam penyelenggaraan survei ini menjadi kontribusi penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 1955/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2026

Tanggal : 09 Juli 2026

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP)
lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026

NO	OP	INDEKS DAN NILAI PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	27	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	11	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Stasiun PPMHKP Tahuna	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	2	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	3,99	3,99	3,99	4,00	99,90	A	Sangat Baik	142	Online
		99,82	100,00	99,82	100,00	100,00	100,00	99,82	99,82	99,82						
5	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	99,90	A	Sangat Baik	27	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,07	100,00	100,00	100,00						
6	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	3,98	3,98	3,98	4,00	3,98	4,00	3,98	3,98	3,99	99,72	A	Sangat Baik	59	Online
		100,00	99,58	99,58	99,58	100,00	99,58	100,00	99,58	99,58						
7	Balai PPMHKP Jayapura	3,88	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,99	99,65	A	Sangat Baik	8	Online
		96,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,98	3,98	3,97	3,98	3,98	3,98	3,98	3,97	3,98	99,57	A	Sangat Baik	64	Online
		100,00	99,61	99,61	99,22	99,61	99,61	99,61	99,61	99,22						
9	Stasiun PPMHKP Ternate	3,96	3,98	3,98	3,98	3,98	3,96	3,96	3,96	3,96	3,97	99,25	A	Sangat Baik	52	Online
		99,04	99,52	99,52	99,52	99,52	99,04	99,04	99,04	99,04						
10	Balai PPMHKP Surabaya II	4,00	3,99	3,99	3,99	3,99	3,90	3,85	3,99	3,99	3,97	99,16	A	Sangat Baik	119	Online
		100,00	99,79	99,79	99,79	99,79	97,48	96,22	99,79	99,79						
11	Balai PPMHKP Makassar	3,96	3,97	3,97	3,96	3,97	3,95	3,96	3,96	3,96	3,96	99,08	A	Sangat Baik	363	Online
		99,04	99,24	99,17	99,10	99,24	98,83	99,10	99,04	98,97						
12	Balai PPMHKP Ambon	3,97	3,97	3,93	3,97	3,96	3,95	3,96	3,97	3,96	3,96	99,00	A	Sangat Baik	100	Online
		99,25	99,25	98,25	99,25	99,00	98,75	99,00	99,25	99,00						
13	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,97	3,96	3,97	3,94	3,96	3,94	3,94	3,95	3,96	3,95	98,86	A	Sangat Baik	234	Online
		99,15	98,93	99,25	98,50	98,93	98,50	98,61	98,82	99,04						
14	Stasiun PPMHKP Pontianak	4,00	4,00	3,99	4,00	4,00	3,89	3,88	3,89	3,89	3,95	98,72	A	Sangat Baik	74	Online
		100,00	100,00	99,66	100,00	100,00	97,30	96,96	97,30	97,30						
15	Balai PPMHKP	3,92	3,92	3,86	3,92	3,94	3,93	3,91	3,94	3,95	3,92	98,00	A	Sangat Baik	111	Online

	Tanjung Pinang	97,97	97,97	96,62	97,97	98,42	98,20	97,75	98,42	98,65						
16	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,96	3,92	3,96	3,88	3,96	3,85	3,88	3,92	3,88	3,91	97,86	A	Sangat Baik	26	Online
		99,04	98,08	99,04	97,12	99,04	96,15	97,12	98,08	97,12						
17	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	3,93	4,00	3,87	3,87	3,93	3,93	3,87	3,93	3,87	3,91	97,78	A	Sangat Baik	15	Online
		98,33	100,00	96,67	96,67	98,33	98,33	96,67	98,33	96,67						
18	Stasiun PPMHKP Cirebon	3,93	3,92	3,93	3,94	3,91	3,83	3,86	3,90	3,90	3,90	97,56	A	Sangat Baik	115	Online
		98,26	98,04	98,26	98,48	97,83	95,65	96,52	97,39	97,61						
19	Stasiun PPMHKP Medan II	3,91	3,92	3,89	3,92	3,92	3,88	3,88	3,92	3,88	3,90	97,53	A	Sangat Baik	64	Online
		97,66	98,05	97,27	98,05	98,05	96,88	96,88	98,05	96,88						
20	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,91	3,83	3,91	3,87	3,91	3,91	3,91	3,96	3,87	3,90	97,46	A	Sangat Baik	23	Online
		97,83	95,65	97,83	96,74	97,83	97,83	97,83	98,91	96,74						
21	Stasiun PPMHKP Bima	4,00	4,00	4,00	3,50	3,83	3,83	4,00	4,00	3,83	3,89	97,22	A	Sangat Baik	6	Online
		100,00	100,00	100,00	87,50	95,83	95,83	100,00	100,00	95,83						
22	Stasiun PPMHKP Sorong	3,90	3,94	3,81	3,87	3,84	3,84	3,87	3,87	3,90	3,87	96,77	A	Sangat Baik	31	Online
		97,58	98,39	95,16	96,77	95,97	95,97	96,77	96,77	97,58						
23	Balai PPMHKP Mataram	3,84	3,84	3,87	3,90	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	96,68	A	Sangat Baik	31	Online
		95,97	95,97	96,77	97,58	96,77	96,77	96,77	96,77	96,77						
24	Stasiun PPMHKP Kendari	3,96	3,89	3,89	3,71	3,86	3,86	3,82	3,82	3,93	3,86	96,53	A	Sangat Baik	28	Online
		99,11	97,32	97,32	92,86	96,43	96,43	95,54	95,54	98,21						
25	Stasiun PPMHKP Aceh	3,90	3,80	3,80	3,90	3,90	3,80	3,80	3,90	3,80	3,84	96,11	A	Sangat Baik	10	Online
		97,50	95,00	95,00	97,50	97,50	95,00	95,00	97,50	95,00						
26	Balai PPMHKP Denpasar	3,87	3,83	3,81	3,82	3,81	3,84	3,84	3,83	3,86	3,83	95,87	A	Sangat Baik	154	Online
		96,75	95,78	95,13	95,62	95,29	95,94	96,10	95,78	96,43						
27	Stasiun PPMHKP Bandung	3,83	3,92	3,92	3,83	3,75	3,83	3,75	3,83	3,83	3,83	95,83	A	Sangat Baik	12	Online
		95,83	97,92	97,92	95,83	93,75	95,83	93,75	95,83	95,83						
28	Balai PPMHKP Medan I	3,87	3,85	3,85	3,87	3,85	3,81	3,83	3,83	3,70	3,83	95,70	A	Sangat Baik	53	Online
		96,70	96,23	96,23	96,70	96,23	95,28	95,75	95,75	92,45						
29	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	3,72	3,83	3,72	3,78	3,83	3,83	3,94	3,83	3,89	3,82	95,52	A	Sangat Baik	18	Online
		93,06	95,83	93,06	94,44	95,83	95,83	98,61	95,83	97,22						
30	Stasiun PPMHKP Kupang	3,83	3,80	3,80	3,78	3,82	3,83	3,83	3,82	3,82	3,81	95,35	A	Sangat Baik	157	Online
		95,70	95,06	95,06	94,59	95,38	95,70	95,86	95,38	95,38						
31	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,75	4,00	4,00	3,75	3,50	3,50	3,75	3,81	95,14	A	Sangat Baik	4	Online
		100,00	100,00	93,75	100,00	100,00	93,75	87,50	87,50	93,75						
32	Balai PPMHKP	3,82	3,81	3,78	3,78	3,81	3,78	3,77	3,81	3,80	3,80	94,93	A	Sangat Baik	74	Online

	Jakarta	95,61	95,27	94,59	94,59	95,27	94,59	94,26	95,27	94,93						
33	Balai PPMHKP Semarang	3,78	3,78	3,83	3,82	3,83	3,70	3,75	3,82	3,82	3,79	94,74	A	Sangat Baik	76	Online
		94,41	94,41	95,72	95,39	95,72	92,43	93,75	95,39	95,39						
34	Balai PPMHKP Balikpapan	3,78	3,63	3,90	3,61	3,85	3,46	3,63	4,00	4,00	3,76	94,11	A	Sangat Baik	41	Online
		94,51	90,85	97,56	90,24	96,34	86,59	90,85	100,00	100,00						
35	Balai Uji Standar PPMHKP Jakarta	3,80	3,78	3,72	3,73	3,77	3,72	3,73	3,77	3,78	3,76	93,88	A	Sangat Baik	74	Online
		94,93	94,59	92,91	93,24	94,26	92,91	93,24	94,26	94,59						
36	Stasiun PPMHKP Palembang	3,78	3,72	3,72	3,69	3,75	3,75	3,78	3,81	3,67	3,74	93,52	A	Sangat Baik	36	Online
		94,44	93,06	93,06	92,36	93,75	93,75	94,44	95,14	91,67						
37	Balai PPMHKP Lampung	3,83	3,76	3,65	3,65	3,76	3,74	3,72	3,76	3,72	3,73	93,30	A	Sangat Baik	46	Online
		95,65	94,02	91,30	91,30	94,02	93,48	92,93	94,02	92,93						
38	Balai PPMHKP Entikong	3,78	3,69	3,77	3,64	3,71	3,71	3,68	3,73	3,79	3,72	93,06	A	Sangat Baik	90	Online
		94,44	92,22	94,17	91,11	92,78	92,78	91,94	93,33	94,72						
39	Balai PPMHKP Manado	3,71	3,79	3,64	3,71	3,71	3,68	3,79	3,75	3,68	3,72	92,96	A	Sangat Baik	28	Online
		92,86	94,64	91,07	92,86	92,86	91,96	94,64	93,75	91,96						
40	Balai Besar PPMHKP Surabaya	3,71	3,73	3,76	3,70	3,70	3,68	3,66	3,72	3,72	3,71	92,70	A	Sangat Baik	182	Online
		92,72	93,13	94,09	92,58	92,45	91,90	91,48	92,99	92,99						
41	Stasiun PPMHKP Mamuju	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,83	3,67	3,67	3,69	92,13	A	Sangat Baik	6	Online
		91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	95,83	91,67	91,67						
42	Pusat Manajemen Mutu	3,72	3,67	3,56	3,67	3,78	3,56	3,50	3,78	3,67	3,65	91,36	A	Sangat Baik	18	Online
		93,06	91,67	88,89	91,67	94,44	88,89	87,50	94,44	91,67						
43	Stasiun PPMHKP Jambi	3,73	3,64	3,73	3,91	3,61	3,52	3,45	3,70	3,61	3,65	91,33	A	Sangat Baik	33	Online
		93,18	90,91	93,18	97,73	90,15	87,88	86,36	92,42	90,15						
44	Balai PPMHKP Tarakan	3,66	3,69	3,66	3,69	3,66	3,59	3,63	3,63	3,61	3,64	91,10	A	Sangat Baik	64	Online
		91,41	92,19	91,41	92,19	91,41	89,84	90,63	90,63	90,23						
45	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	3,65	3,69	3,58	3,58	3,69	3,62	3,62	3,54	3,65	3,62	90,60	A	Sangat Baik	26	Online
		91,35	92,31	89,42	89,42	92,31	90,38	90,38	88,46	91,35						
46	Stasiun PPMHKP Batam	3,70	3,46	3,71	3,71	3,64	3,54	3,48	3,71	3,64	3,62	90,58	A	Sangat Baik	56	Online
		92,41	86,61	92,86	92,86	91,07	88,39	87,05	92,86	91,07						
47	Stasiun PPMHKP Merauke	3,55	3,55	3,55	3,64	3,73	3,64	3,55	3,64	3,64	3,61	90,15	A	Sangat Baik	11	Online
		88,64	88,64	88,64	90,91	93,18	90,91	88,64	90,91	90,91						

**Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan
lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026**

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS DAN NILAI PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
1	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00
2	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	2129	3,91	3,90	3,91	3,90	3,90	3,88	3,88	3,90	3,91	3,90	97,48	A	Sangat Baik	
			97,84	97,48	97,72	97,52	97,58	96,94	97,01	97,57	97,64					
3	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	8	4,00	4,00	3,88	3,88	4,00	3,75	3,75	3,88	3,88	3,89	97,22	A	Sangat Baik	
			100,00	100,00	96,88	96,88	100,00	93,75	93,75	96,88	96,88					
4	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	13	3,92	3,92	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	4,00	3,85	3,88	97,01	A	Sangat Baik	
			98,08	98,08	96,15	96,15	96,15	96,15	96,15	100,00	96,15					
5	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	50	3,84	3,82	3,80	3,80	3,84	3,88	3,88	3,86	3,82	3,84	95,94	A	Sangat Baik	
			96,00	95,50	95,00	95,00	96,00	97,00	97,00	96,50	95,50					
6	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	104	3,88	3,85	3,83	3,85	3,85	3,81	3,78	3,87	3,83	3,84	95,89	A	Sangat Baik	
			96,88	96,15	95,67	96,15	96,15	95,19	94,47	96,63	95,67					
7	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	366	3,82	3,83	3,80	3,78	3,83	3,78	3,79	3,82	3,81	3,81	95,15	A	Sangat Baik	
			95,56	95,77	94,95	94,60	95,77	94,40	94,67	95,49	95,15					
8	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	5	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	95,00	A	Sangat Baik	
			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00					95,00
9	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)	200	3,80	3,81	3,78	3,77	3,82	3,75	3,76	3,83	3,81	3,79	94,75	A	Sangat Baik	
			95,00	95,13	94,50	94,25	95,38	93,75	93,88	95,75	95,13					
10	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	79	3,72	3,65	3,73	3,71	3,68	3,58	3,62	3,66	3,63	3,67	91,63	A	Sangat Baik	
			93,04	91,14	93,35	92,72	92,09	89,56	90,51	91,46	90,82					
11	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>)	18	3,72	3,67	3,56	3,67	3,78	3,56	3,50	3,78	3,67	3,65	91,36	A	Sangat Baik	
			93,06	91,67	88,89	91,67	94,44	88,89	87,50	94,44	91,67					
12	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>	17	3,76	3,71	3,59	3,65	3,65	3,59	3,59	3,65	3,65	3,65	91,18	A	Sangat Baik	
			94,12	92,65	89,71	91,18	91,18	89,71	89,71	91,18	91,18					
13	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	11	3,64	3,45	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	88,64	A	Sangat Baik	
			90,91	86,36	88,64	88,64	88,64	88,64	88,64	88,64	88,64					
Seluruh Layanan BPPMHKP			3001	3,88	3,87	3,87	3,86	3,88	3,84	3,84	3,88	3,87	96,67	3,87	A	Sangat Baik
				97,11	96,77	96,79	96,62	96,90	96,03	96,11	96,90	96,77				



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I

JALAN RAYA BANDARA IR.H.JUANDA NOMOR 23 SIDOARJO, 61254 JAWA TIMUR

TELEPON (031) 8688099/8688118 , FAKSIMILE (031) 8678471

LAMAM www.kkp.go.id SUREL bbppmhkp.sby1@kkp.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Kerja : Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Bulan : Juli

Tahun : 2026

A. Upaya Penghematan Energi Yang Telah Dilakukan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program penghematan energi serta mendukung efisiensi penggunaan sumber daya serta penerapan budaya kerja yang ramah lingkungan, seluruh pegawai berkomitmen melaksanakan penghematan energi di lingkungan kantor. Balai Besar Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Surabaya I telah melaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Melakukan pengaturan penggunaan lampu dan peralatan listrik sesuai dengan jam operasional kantor sehingga pemakaian energi dapat lebih terkontrol dan efisien.
- Mematikan lampu, AC, komputer, serta perangkat elektronik lainnya apabila tidak sedang digunakan, terutama setelah jam kerja berakhir.
- Mengoptimalkan pemanfaatan pencahayaan alami pada siang hari dengan membuka tirai atau jendela sehingga kebutuhan penggunaan lampu dapat dikurangi.
- Mengatur suhu pendingin ruangan (AC) pada kisaran 24–25°C guna menjaga keseimbangan antara kenyamanan kerja dan efisiensi penggunaan energi listrik.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya penghematan energi serta mendorong partisipasi aktif pegawai dalam menjaga penggunaan energi secara efisien di lingkungan kantor.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan tercipta budaya kerja yang lebih peduli terhadap efisiensi energi di lingkungan kerja.

Selain itu, penggunaan peralatan listrik dilakukan secara bijaksana sesuai kebutuhan, termasuk pengaturan suhu AC pada tingkat yang efisien dan memastikan seluruh perangkat

elektronik dalam kondisi mati sebelum meninggalkan ruangan kerja. Melalui penerapan kebiasaan tersebut secara konsisten, diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi listrik, menekan biaya operasional, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. Kendala Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan program penghematan energi masih terdapat beberapa Kendala yang dihadapi, antara lain:

- Masih terdapat beberapa perangkat listrik yang belum menggunakan teknologi hemat energi sehingga konsumsi energi masih relatif tinggi.
- Kedisiplinan sebagian pegawai dalam mematikan perangkat listrik setelah digunakan masih perlu ditingkatkan.
- Belum tersedianya sistem monitoring penggunaan energi secara real-time sehingga pengawasan penggunaan energi belum dapat dilakukan secara optimal.

Kendala-kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program penghematan energi pada periode berikutnya

C. Pengeluaran Langganan Daya dan Jasa

Berdasarkan data tagihan utilitas kantor, perbandingan pengeluaran antara Tahun 2026 (Triwulan I) dan tahun 2026 (Triwulan II) adalah sebagai berikut:

No	Utilitas	2026 (Triwulan I)	2026 (Triwulan II)	% (+/-)
1	Listrik	78.332.446	83.417.438	- 6,49%
2	Telepon	12.937.716	12.937.716	- 0,00%
3	Air	6.644.260	5.847.066	+12%

Keterangan :

1. Listrik

- Tahun 2026 (Triwulan I): Rp.78.332.446
- Tahun 2026 (Triwulan II): Rp.83.417.438

Listrik mengalami **kenaikan pengeluaran sebesar 6,49%**, dari Rp.78.332.446 menjadi Rp83.417.438. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi energi listrik pada Triwulan II meningkat dibandingkan Triwulan I. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh bertambahnya aktivitas operasional, penggunaan peralatan laboratorium, maupun peningkatan penggunaan pendingin ruangan akibat kondisi cuaca. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan langkah-langkah

penghematan listrik, seperti mematikan peralatan yang tidak digunakan, mengoptimalkan penggunaan AC sesuai kebutuhan, serta melakukan pengawasan terhadap pemakaian listrik di setiap unit kerja.

2. Telepon

- Tahun 2026 (Triwulan I): Rp.12.937.716
- Tahun 2026 (Triwulan II): Rp.12.937.716

Telepon menunjukkan **tidak terdapat perubahan pengeluaran (0%)**, yaitu tetap sebesar Rp.12.937.716. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan layanan telekomunikasi masih terkendali dan sesuai dengan kebutuhan operasional.

3. Air

- **Air** mengalami **penurunan pengeluaran sebesar 12%**, dari Rp.6.644.260 menjadi Rp.5.847.066. Penurunan ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan air yang kemungkinan didukung oleh meningkatnya kesadaran pegawai dalam menggunakan air secara bijak serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas sanitasi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penghematan utilitas pada **Triwulan II Tahun 2026** telah berhasil dicapai pada penggunaan **air**, sedangkan penggunaan **telepon** tetap stabil. Namun demikian, **penggunaan listrik masih mengalami peningkatan**, sehingga diperlukan upaya pengendalian yang lebih optimal melalui penerapan budaya hemat energi, sosialisasi kepada seluruh pegawai, pemantauan konsumsi listrik secara berkala, serta optimalisasi penggunaan peralatan listrik sesuai kebutuhan operasional. Diharapkan langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi pada triwulan berikutnya dan mendukung penerapan prinsip kantor yang hemat energi serta ramah lingkungan.

Kepala Balai Besar PPMHKP
Surabaya I



Sri Anggoro, S.P,M.M
NIP.19720725 199503 1 001

DOKUMENTASI UPAYA PENHEMATAN ENERGI BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I





surabaya I

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	BPPMHPK SURABAYA I	60	22.67	90.68 %	29.59	73.98 %	25.08	83.6 %	5	100 %	82.34	TINGGI



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Badan Mutu KKP Surabaya I

TRIWULAN II TAHUN 2026

Periode April s/d Juni 2026



Melayani dengan
**SENYUM, CEPAT,
TRANSPARAN, dan
PROFESIONAL**



NILAI IKM



92,70

KATEGORI

A

SANGAT BAIK

Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan.
Masukan Anda sangat bermanfaat untuk peningkatan
kualitas layanan kami.

JENIS LAYANAN



Sertifikat Mutu dan
Keamanan Hasil
Perikanan (SMKHP)

172

Responden



Laporan hasil uji
mutu produk
perikanan

10

Responden

TOTAL RESPONDEN

182
Orang



PRIA
135 Orang



WANITA
47 Orang

UMUR



- < 25 Tahun
41 Orang
- 25 - 45 Tahun
111 Orang
- 46 - 60 Tahun
30 Orang
- > 60 Tahun
0 Orang

PENDIDIKAN



- SMP 1 Orang
- SMA 76 Orang
- D3 47 Orang
- S1 57 Orang
- S2 1 Orang

PEKERJAAN



- PELAKU USAHA KKP
22 Orang
- PEGAWAI SWASTA
151 Orang
- WIRAUSAHA NON KKP
5 Orang
- PELAJAR/MAHASISWA
4 Orang

NILAI UNSUR PELAYANAN

No.	Unsur Pelayanan	Nilai IKM per Unsur	
1.	Persyaratan	3,709	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,725	
3.	Waktu Penyelesaian	3,764	
4.	Biaya/Tarif	3,703	
5.	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,698	
6.	Kecepatan Respon dari Aplikasi	3,676	
7.	Kemudahan Aplikasi	3,659	
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,720	
9.	Sarana dan Prasarana	3,720	



Kami berkomitmen untuk
terus memberikan pelayanan
terbaik bagi Anda. Terima kasih
atas kepercayaan Anda kepada
Badan Mutu KKP Surabaya I.



BERMUTU

Produk terjamin
mutunya



AMAN

Aman untuk
dikonsumsi



TERPERCAYA

Dipercaya pasar
domestik & global



BERDAYA SAING

Mendorong daya saing
produk perikanan